RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029
DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2025

SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029.

Pasal 1

(1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029.

(2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

(3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

a. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan

b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2025

GUBERNUR RIAU,

TTD

ABDUL WAHID

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

TTD

SYAHRIAL ABDI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YAN DHARMADI, SH, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19840326 200903 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan rahmat-Nya setelah melalui proses pembahasan dalam rapat Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2025-2029 telah menyelesaikan tugasnya.

Maksud dan tujuan dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau harus cepat mengantisipasi yang dibutuhkan dalam organisasi dan mengikuti kebutuhan organisasi. Dimana rancangan dilakukan dengan maksud agar indikator yang disusun dalam Renstra Strategis menjadi lebih SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bounded).

Begitu pentingnya Rencana Strategis ini, maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk newujudkan kinerja organisasi yang baik dan berorientasi pada hasil. Kami mengharapkan kehadiran buku ini dapat bermanfaat khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan dukungan dan pelayanan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan di Provinsi Riau, baik dukungan secara administratif, teknis, maupun keahlian di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan untuk terlaksananya penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-12
2.2.1 Sumber daya Manusia.....	II-12
2.2.2 Sumber Daya Aset dan Status Akreditasi	II-13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-17
2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan	II-17
2.3.2 Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	II-44
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	II-47
2.5 Mitra Perangkat Daerah	II-47
2.6 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II-48
2.6.1 Indentifikasi Permasalahan terkait RPJMN dengan Urusan Pendidikan	II-48
2.6.2 Indentifikasi Permasalahan terkait RPJMD dengan Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau	II-49
2.7 Isu Strategis	II-51
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	III-2
3.2 Strategi Renstra Perangkat Daerah	III-4
3.3 Pentahapan	III-4

3.4 Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 ..... III-5

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..... IV-1

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan IV-191

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Kondisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan Tahun 2024	II-13
2.2 Data Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2024	II-13
2.3 Rekapitulasi Aset Tanah dan Bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2024	II-14
2.4 Rekapitulasi Aset Tanah dan Bangunan di Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2024	II-15
2.5 Rekapitulasi Status Asset Tanah Satuan Pendidikan Negeri Tahun 2024	II-15
2.6 Rekapitulasi Aset Jumlah Barang Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2024	II-17
2.7 Data Sarana dan Prasarana Pendukung Inklusi dan Gender	II-17
2.8 Angka Literasi/Numerasi Provinsi Riau Tahun 2021-2023	II-22
2.9 Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA Provinsi Riau Tahun 2020-2023	II-23
2.10 Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-25
2.11 Angka Partisipasi Sekolah Riau dan Indonesia Sesuai Jenjang Pendidikan Tahun 2021-2023 di Provinsi Riau	II-28
2.12 Angka Partisipasi Sekolah Penyandang Disabilitas Usia 4-18 tahun	II-29
2.13 Rasio Ketersediaan Ruang Kelas dengan Penduduk Usia Sekolah	II-30
2.14 Kondisi Ruang Kelas SMA dan SMK di Provinsi Riau Tahun 2023	II-31
2.15 Rasio Siswa/Guru SMA/MA Tahun 2020-2023	II-32
2.16 Rasio Siswa/Guru SMK Tahun 2020-2023	II-33
2.17 Rekapitulasi Status Akreditasi Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta Tahun 2024	II-34
2.18 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II-37
2.19 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2021-2024	II-45
2.20 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-50
2.21 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau	II-51
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau	III-3
3.2 Rumusan Strategi Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029	III-4
3.3 Tahapan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau	III-5
3.4 Perumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau	III-5
4.1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra PD	IV-2
4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan	IV-54
4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-174
4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2025-2030	IV-192
4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2025-2030	IV-193

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Bagan Struktur Dinas Pendidikan Provinsi Riau	II-2
2.2 Bagan Struktur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah	II-2
2.3 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Riau Tahun 2024	II-18
2.4 Rata-Rata Lama Sekolah Per Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024	II-18
2.5 Tingkat Partisipasi Pendidikan Partisipasi Murni APM SMA Berdasarkan Status Kesejahteraan Penduduk (Persentase dan Jumlah Individu) di Provinsi Riau, Tahun 2024	II-19
2.6 Tingkat Keberlanjutan Sekolah Penduduk Usia 15-24 Tahun di Provinsi Riau, Tahun 2024	II-20
2.7 Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Riau Tahun 2024	II-21
2.8 Angka Harapan Lama Sekolah per Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024	II-21
2.9 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA Se- Provinsi Riau Tahun 2023	II-23
2.10 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA Nasional Tahun 2023	II-24
2.11 Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau Tahun 2024	II-25
2.12 Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Nasional Tahun 2024	II-26
2.13 Tingkat Partisipasi Pendidikan Partisipasi Murni APM SMA Berdasarkan Status Kesejahteraan Penduduk (Persentase dan Jumlah Individu) di Provinsi Riau, Tahun 2024	II-27
2.14 Tingkat Keberlanjutan Sekolah Penduduk Usia 15-24 Tahun di Provinsi Riau, Tahun 2024	II-28
2.15 Capaian Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun (Persen dan Jumlah) Berdasarkan Status Kesejahteraan di Provinsi Riau, Tahun 2024	II-19
2.16 Posisi Relatif Rasio Siswa/Guru SMA/MA Nasional Tahun 2023	II-32
2.17 Posisi Relatif Rasio Siswa/Guru SMK Nasional Tahun 2023	II-33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 bahwa Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah mutlak diperlukan sejalan pendekatan perencanaan pembangunan sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan Daerah secara sistimatis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.

Fungsi Renstra adalah Menjadi Pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD; Sebagai Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa setiap OPD wajib menyusun Rencana Strategis untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Disamping itu, sesuai dengan Diktum Keenam poin b Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat

Daerah Tahun 2025-2029, disebutkan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang memperhatikan keselarasan perencanaan pembangunan Wilayah, Nasional, dan Sektoral dengan tetap menyesuaikan terhadap kondisi dan karakteristik daerah sesuai prinsip otonomi daerah.

Renstra OPD di Pemerintah Provinsi Riau nantinya juga dijadikan acuan untuk masing-masing OPD di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini disusun secara holistik, terintegrasi, partisipatif dan responsif gender sehingga dapat dijabarkan dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang responsif gender.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 ini memperhatikan dan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, yakni;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
27. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045;
29. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029
30. Peraturan Gubernur Riau Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
31. Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemuatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi melalui Kemitraan dengan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja;
32. Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar pada Satuan Pendidikan Menengah;

33. Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
34. Peraturan Gubernur Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau adalah untuk menentukan arah strategis Perangkat Daerah dalam Tahun 2025-2029 berdasarkan capaian kinerja, permasalahan dan isu strategis aktual guna mendukung atau mewujudkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029;
2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan guna mencapai target kinerja Program Prioritas, yang menjadi Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029;
3. Merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2025-2029;
4. Merumuskan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2025 – 2029.
5. Merumuskan perencanaan pembangunan bidang Pendidikan yang responsif gender dan inklusif.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) ini terdiri dari 5 (lima) BAB dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang memuat gambaran umum penyusunan Dokumen Renstra yang memuat sub-sub tentang Latar Belakang Penyusunan Renstra, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat tentang gambaran kondisi objektif Perangkat Daerah dan hasil capaian yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir serta menyajikan data dan informasi seperti Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumberdaya Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan Kelompok Sasaran Layanan, Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah, dan Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025 - 2029 berdasarkan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Cascading kinerja mulai dari tujuan sampai dengan outcome dan output serta merumuskan strategis dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VIII PENUTUP

Berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila adanya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Pendidikan bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas Dinas Pendidikan menyeleggarakan fungsi:

1) Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, dan Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;
2) Pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan pada Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, dan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
3) Pelaksanaan kebijakan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, dan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, dan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
5) Pelaksanaan administrasi Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, dan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dapat dilihat dari bagan berikut ini :

Gambar 2.1 Bagan Struktur Dinas Pendidikan Provinsi Riau

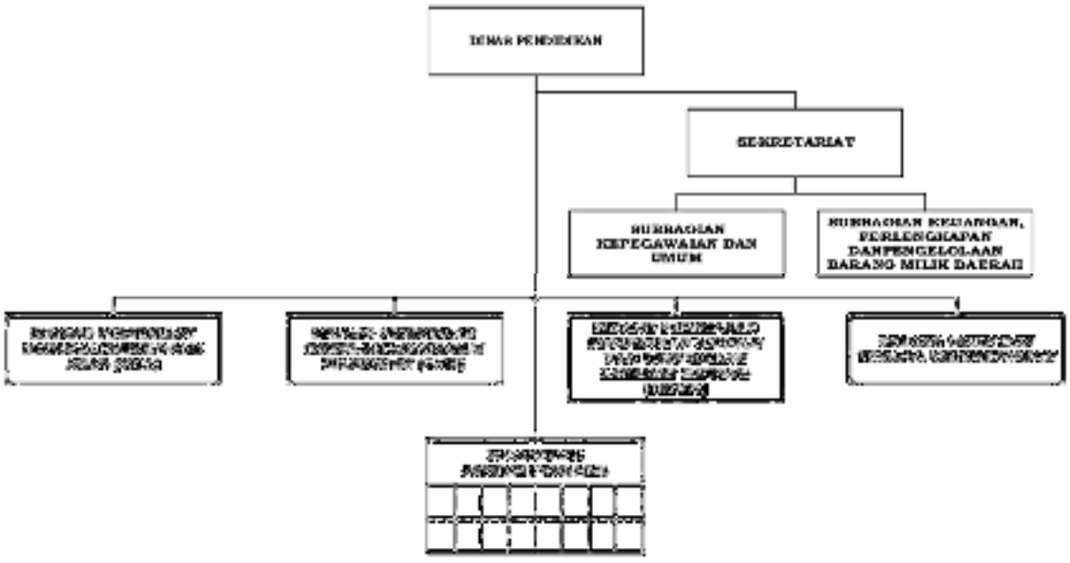

(***Sumber data***: *Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah)*

Gambar 2.2 Bagan Struktur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah

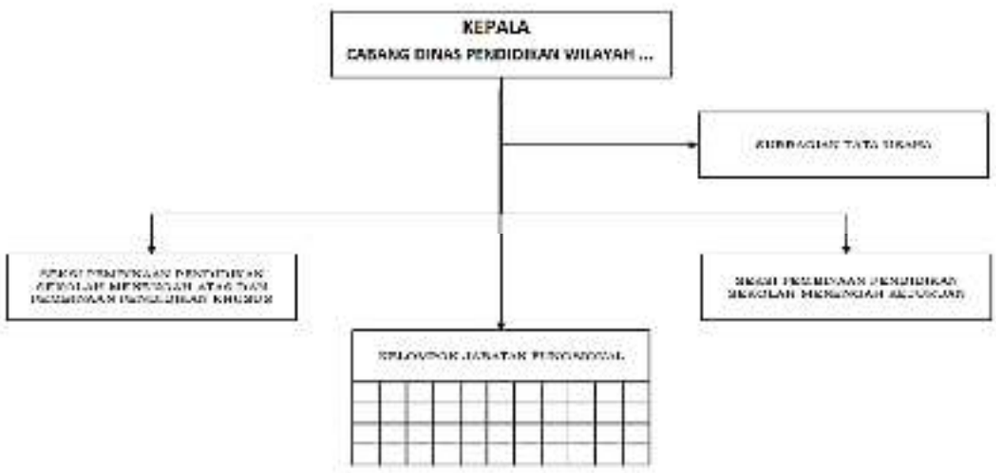

(***Sumber data***: *Peraturan Gubernur Riau Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau)*

Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh struktur lainnya dengan tugas sebagai berikut :

1) **Sekretariat** menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, dan kepegawaian dan umum. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. Membantu dan mewakili Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas fungsi Dinas, Cabang Dinas serta antar Instansi Pemerintah;
b. Pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan pada Sekretariat;
c. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Kesekretariatan;
e. Mengkoordinasikan perumusan, pengkajian bahan saran pertimbangan bidang Pendidikan sebagai penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;
f. Mengkoordinasikan penyusunan, merencanakan, dan pelaksanaan Urusan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus;
g. Mengkoordinasikan pengendalian, penyusunan, pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran, serta pemantauan realisasi capaian kinerja program kerja dan kegiatan serta pelaporan keuangan di lingkungan Dinas;
h. Mengkoordinasikan pemantauan/monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di lingkungan Dinas;
i. Mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan di lingkungan Dinas;
j. Mengkoordinasikan pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Pendidikan Khusus;
k. Mengkoordinasikan manajemen, pengkajian, pengendalian, pengelolaan dan pemanfaatan data pokok Pendidikan serta pengembangan sistem informasi Pendidikan;
l. Mengkoordinasikan penyusunan perumusan kebijakan operasional peningkatan efisiensi dan efektifitas, serta pembinaan, pemantauan, evaluasi, bimbingan teknis penyelenggaraan pembiayaan pengelolaan Pendidikan;
m. Mengkoordinasikan pengkajian, penyiapan, penyusunan, pengusulan dan pengumpulan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (Penja serta Rencana Aksi), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ

PD), Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), Inovasi PD;

n. Pengkajian verifikasi, rekomendasi, pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pendidikan;
o. Mengkoordinasikan penyusunan bahan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkungan Dinas;
p. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan analisa realisasi pelaksanaan program/kegiatan pada Perangkat Daerah;
q. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan baik Sekretariat, Bidang, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Satuan Pendidikan;
r. Memfasilitasi penyelesaian masalah hukum di lingkungan Dinas, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta pelaksanaan pengembangan Kerjasama, penyiapan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
s. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian dan umum, administrasi keuangan, perlengkapan, pengelolaan aset dan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
t. Penyelenggaraan, pengelolaan dan menyediakan layanan administratif urusan rumah tangga di lingkungan Dinas; dan
u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

2) **Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)** menyelenggarakan tugas melaksanakan koordinasi penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, pengendalian kebijakan Sekolah Menengah Atas. Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dibantu oleh Kelompok

Jabatan Fungsional. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas menyelenggarakan fungsi:

a. Membantu dan mewakili Kepala Dinas dalam pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas fungsi Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
b. Mengkoordinasi perumusan kebijakan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
c. Pelaksanaan kebijakan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
e. Perumusan dan pengkajian bahan saran pertimbangan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas sebagai penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;
f. Pengkajian, penyusunan, penyelenggaraan, pelaksanaan program kerja, kegiatan dan anggaran Urusan Bidang, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, serta pemantauan realisasi capaian kinerja pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
g. Penyusunan perumusan kebijakan operasional perluasan dan pemerataan memperoleh Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
h. Penyusunan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, perluasan akses layanan Pendidikan dan peserta didik pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
i. Penyusunan perumusan kebijakan teknis serta penyelenggaraan pengawasan proses pembelajaran pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
j. Penyusunan perumusan kebijakan, pembinaan, pemantauan, evaluasi teknis pembiayaan pengelolaan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
k. Penyusunan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan minat, bakat dan prestasi peserta didik pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
l. Penyelenggaraan kebijakan peningkatan dan pemenuhan standar profesi, kompetensi, kurikulum, penilaian, kelembagaan, dan

pembangunan karakter pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;

m. Penyelenggaraan perumusan kebijakan operasional kelembagaan yang meliputi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan mutasi peserta didik pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;

n. Penyelenggaraan perumusan kebijakan rekomendasi penerbitan izin pendirian, izin operasional, penataan, perubahan dan penutupan meliputi perubahan nama dan bentuk, pemecahan dan perubahan status satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;

o. Penyelenggaraan pendataan, analisis dan evaluasi kebutuhan pembangunan, pengembangan serta pengadaan sarana prasarana satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;

p. Penyelenggaraan pengkoordinasian dan pembinaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;

q. Pelaksanaan penyusunan bahan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkupan jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;

r. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja, kegiatan dan anggaran pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas; dan

s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3) **Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)** menyelenggarakan tugas melaksanakan koordinasi penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, pengendalian kebijakan Sekolah Menengah Kejuruan. Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan menyelenggarakan fungsi:

a. Membantu dan mewakili Kepala Dinas dalam pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas fungsi Bidang, Cabang Dinas serta antar Instansi Pemerintah;

b. Mengkoordinasi perumusan kebijakan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;

c. Pelaksanaan kebijakan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
e. Perumusan dan pengkajian bahan saran pertimbangan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sebagai penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;
f. Pengkajian, penyusunan, penyelenggaraan, pelaksanaan program kerja, kegiatan dan anggaran Urusan Bidang, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, serta pemantauan realisasi capaian kinerja pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
g. Penyusunan perumusan kebijakan operasional perluasan dan pemerataan memperoleh Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
h. Penyusunan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, perluasan akses layanan Pendidikan dan peserta pendidik pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
i. Penyusunan perumusan kebijakan teknis serta penyelenggaraan pengawasan proses pembelajaran pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
j. Penyusunan perumusan kebijakan, peningkatan efisiensi dan efektifitas, serta pembinaan, pemantauan, evaluasi, bimbingan teknis pembiayaan pengelolaan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
k. Penyusunan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan minat, bakat dan prestasi peserta didik pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
l. Penyelenggaraan kebijakan peningkatan dan pemenuhan standar profesi, kompetensi, kurikulum, penilaian, kelembagaan, dan pembangunan karakter pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
m. Penyelenggaraan perumusan kebijakan operasional kelembagaan yang meliputi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan mutasi peserta didik pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
n. penyelenggaraan perumusan kebijakan rekomendasi penerbitan izin pendirian, izin operasional, penataan, perubahan dan penutupan meliputi perubahan nama dan bentuk, pemecahan dan perubahan status satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;

o. Penyelenggaraan pendataan, analisis dan evaluasi kebutuhan pembangunan, pengembangan dan pengadaan sarana prasarana satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
p. Penyelenggaraan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat dan dunia usaha/dunia industri di sekolah pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
q. Penyelenggaraan kegiatan bina karakter dan Pendidikan Vokasi serta revitalisasi di era industri pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
r. Penyelenggaraan pengkoordinasian dan pembinaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
s. Pelaksanaan penyusunan bahan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkup jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
t. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja, kegiatan dan anggaran pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4) **Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)** menyelenggarakan tugas melaksanakan koordinasi penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, pengendalian kebijakan Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan layanan inklusif, Pendidikan cerdas istimewa/bakat istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar, tidak mampu dari segi sosial ekonomi. Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus menyelenggarakan fungsi:
a. membantu dan mewakili Kepala Dinas dalam pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas fungsi Bidang, Cabang Dinas serta antar Instasi Pemerintah;
b. mengkoordinasi perumusan kebijakan pada Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
c. pelaksanaan kebijakan pada Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
e. perumusan dan pengkajian bahan saran pertimbangan Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus sebagai penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;
f. pengkajian, penyusunan, penyelenggaraan, pelaksanaan program kerja, kegiatan dan anggaran Urusan Bidang, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, serta pemantauan realisasi capaian kinerja pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
g. penyusunan perumusan kebijakan operasional perluasan dan pemerataan memperoleh Pendidikan pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
h. penyusunan perumusan kebijakan teknis serta penyelenggaraan pengawasan proses pembelajaran pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
i. penyusunan perumusan kebijakan, peningkatan efisiensi dan efektifitas, serta pembinaan, pemantauan, evaluasi, bimbingan teknis pembiayaan pengelolaan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
j. Penyusunan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan minat, bakat dan prestasi peserta didik bidang pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan layanan inklusif, Pendidikan cerdas istimewa/bakat istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar, dan tidak mampu dari segi sosial ekonomi;
k. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, perluasan akses layanan Pendidikan, peningkatan dan pemenuhan standar profesi, kompetensi, kurikulum, penilaian, kelembagaan, dan pembangunan karakter pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
l. penyelenggaraan perumusan kebijakan operasional kelembagaan yang meliputi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan mutasi peserta didik pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
m. penyelenggaraan perumusan kebijakan rekomendasi penerbitan izin pendirian, izin operasional, penataan, perubahan dan penutupan meliputi perubahan nama dan bentuk, pemecahan dan perubahan status satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;

n. penyelenggaraan pendataan, analisis dan evaluasi kebutuhan pembangunan, pengembangan dan pengadaan sarana prasarana satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
o. penyelenggaraan asesmen autis, terapi serta transisi untuk persiapan mengikuti pendidkan inklusif di sekolah regular;
p. penyelenggaraan pengkoordinasian dan pembinaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
q. pelaksanaan penyusunan bahan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkup jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
r. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja, kegiatan dan anggaran pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus; dan
s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5) **Bidang Pendataan Guru dan Tenaga Kependidikan** menyelenggarakan tugas melaksanakan koordinasi kebijakan operasional pembinaan dan peningkatan karir, peningkatan mutu dan profesionalisme, pemberian penghargaan, pelayanan perlindungan profesi serta peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk melaksanakan tugas Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi:

a. membantu dan mewakili Kepala Dinas dalam pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas fungsi Bidang, Cabang Dinas serta antar Instasi Pemerintah;
b. mengkoordinasi perumusan kebijakan pada Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
c. pelaksanaan kebijakan pada Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
e. peningkatan mutu serta karakter pendidik;
f. perumusan dan pengkajian bahan saran pertimbangan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;
g. pengkajian, penyusunan, penyelenggaraan, pelaksanaan program kerja, kegiatan dan anggaran Urusan Bidang, Dekonsentrasi, Tugas

Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, serta pemantauan realisasi capaian kinerja pada jenjang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;

h. penyusunan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, peningkatan mutu dan profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan;
i. penyusunan dan penyelenggaraan Pendidikan berbasis muatan lokal budaya melayu Riau baik Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
j. penyusunan perumusan dan pelaksanaan pembinaan serta peningkatan karir Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
k. penyusunan perumusan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi dan assesment Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
l. penyusunan perumusan dan pelaksanaan pelayanan serta peningkatan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
m. penyusunan perumusan dan pelaksanaan pemberian penghargaan serta memberikan pelayanan perlindungan profesi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
n. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan organisasi profesi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
o. pelaksanaan penyusunan bahan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkup jenjang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus; dan
q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6) **Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau** terdiri dari Wilayah I dengan wilayah kerja Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kepulauan Meranti berkedudukan di Siak Sri Indrapura, Wilayah II

dengan wilayah kerja Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai berkedudukan di Duri, Wilayah III dengan wilayah kerja Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru berkedudukan di Kecamatan Tambang, dan Wilayah IV dengan wilayah kerja Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi berkedudukan di Rengat. Cabang Dinas sebagaimana tersebut, menyelenggarakan tugas pelaksanaan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Cabang Dinas Pendidikan dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional yaitu untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan teknis teknis penunjang tertentu yaitu untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan. Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam menyelenggarakan fungsi nya terdiri dari;

a. penyelenggaraan perencanaan program kerja dan rencana operasional pada Cabang Dinas Pendidikan wilayah kerjanya;
b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan di wilayah kerjanya;
c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas;
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan modal yang paling berharga serta merupakan aset yang paling penting dan sangat diperhatikan dalam organisasi. Hal ini karena kinerja suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang ada. Sumber daya manusia/personil di Dinas Pendidikan terdiri dari 14.817 pegawai termasuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Kondisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan
Tahun 2024

NO	JABATAN	L	P	JLH	%	DISABILITAS
1	ESSELON II	1	-	1	0,01	-
2	ESSELON III	9	-	9	0,06	-
3	ESSELON IV	11	4	15	0,10	-
4	FUNGSIONAL TERTENTU	56	52	108	0,73	-
5	FUNGSIONAL UMUM	78	65	143	0,97	-
6	KEPALA SEKOLAH	315	137	452	3,05	1
7	PENDIDIK PNS	1.513	3.888	5.401	36,45	3
8	PENDIDIK PPPK	2.730	5.650	8.380	56,56	4
9	TENAGA KEPENDIDIKAN PNS	130	187	308	2,08	3
JUMLAH		**4.843**	**9.983**	**14.817**	**100**	**11**

Sumber data *: Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2024*

Dalam memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia di lingkungan Dinas Pendidikan memerlukan tenaga teknis / Non ASN, adapun datanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Data Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau
Tahun 2024

NO	JABATAN	L	P	JLH	%	DISABILITAS
1	Non ASN Dinas Pendidikan Provinsi Riau	125	122	247	4,19	-
2	Non ASN Pendidik	408	1.361	1.769	30,04	7
3	Non ASN Tenaga Kependidikan	1.723	2.150	3.873	65,77	31
JUMLAH		**2.256**	**3.633**	**5.889**	**100**	**38**

Sumber data *: Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2024*

Data tabel tersebut terlihat data non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau berjumlah 5.889 dengan gender terbanyak ada pada perempuan yaitu 3.633 dan laki-laki sebanyak 2.256.

2.2.2. Sumber Daya Aset

Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam memberikan pelayanan publik sektor pendidikan selain didukung oleh personil Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diuraikan di atas, didukung juga oleh fasilitas

sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional (yang merupakan aset daerah), sebagaimana daftar dibawah ini :

1) Aset Tanah

Rekapitulasi Aset Tanah Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Aset Tanah dan Bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2024

NO	Uraian	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Penggunaan
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	600	2009	Jl. Cemara Pekanbaru	-
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.550	1982	Jl. Suka Terus	Gedung Graha / Mes Wisma Handayani
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8.360	1999	Jl. Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru	Dinas Pendidikan
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.740	2009	Jl. Sukaterus No. 3 Pekanbaru	BTP dan BPKB
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6.305	1995	Jl. Jend. Sudirman Simpang Tiga Pekanbaru	Gedung Guru
6	Tanah Lapangan Tenis	2.730	1982	Jl. Suka Terus Kec. Jadirejo Sukajadi Pekanbaru	SMA Handayani
7	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	-	2007	Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru	Gedung Autis
8	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	3.385	2004	Kec. Marpoyan Damai, Kel. Wonorejo Pekanbaru	Gedung Sekolah SMP
9	Tanah Kosong Lainnya	2.370	1977	JL. DR. Sutomo	

Sumber data *: Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Tahun 2024*

Berdasarkan data pada tabel tersebut diketahui bahwa Aset Tanah Dinas Pendidikan Provinsi Riau ada 9 lokasi diluar Satuan Pendidikan Negeri dari aset tersebut yang memiliki Luas terbesar adalah Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) dengan Luas 14.345 (M^2) dan yang terkecil Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I dengan Luas 600 (M^2). Sedangkan aset dengan tahun pengadaan terlama yaitu Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) di Jln. Kubang Raya dan Jln. Segar Rejosari, Kec. Tenayan Raya.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Aset Tanah dan Bangunan di Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2024

NO	Uraian	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Penggunaan
1	Tanah Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Rengat / Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	4.370	1986	Jl. Lintas Timur Pematang Reba Rengat (Inhu) Berdasarkan Surat Persetujuan Gubernur Riau Pengalihan Status Nomor : 930/BPKAD/1539 Tanggal 21 Juni 2021	Rencana UPTD Wil IV (Inhu)
2	Tanah Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Duri / Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	1.000	1992	Jl. Desa Pengharapan No. 61 Duri Berdasarkan Surat Persetujuan Gubernur Riau Pengalihan Status Nomor : 930/BPKAD/1539 Tanggal 21 Juni 2021	Rencana UPTD Wil II (Duri)

Sumber data *: Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Tahun 2024*

Berdasarkan data pada tabel tersebut diketahui bahwa Aset Tanah dan Bangunan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau ada 2 lokasi dari aset tersebut yang memiliki Luas terbesar adalah Tanah Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Rengat / Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja dengan Luas 4.370 (M^2) dan yang terkecil Tanah Tanah Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Duri / Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja 1.000 (M^2). Sedangkan aset dengan tahun pengadaan terlama yaitu Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) di Jln. Kubang Raya dan Jln. Segar Rejosari Kec. Tenayan Raya.

Selanjutnya rekapitulasi Asset Jumlah Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta di Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.5
Rekapitulasi Status Asset Tanah Satuan Pendidikan Negeri Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota/ Satuan Pendidikan Negeri	Jumlah	Status Kepemilikan / Jenis Surat Kepemilikan	
			Bersertifikat Hak Milik	Belum Bersertifikat Hak Milik
1	**TOTAL PROVINSI**	478	206	272
	SMA	321	147	176
	SMK	139	57	85
	SLB	18	2	16
2	**Kota Pekanbaru**	33	19	14
	SMA	21	14	7
	SMK	10	4	6
	SLB	2	1	1
3	**Kota Dumai**	16	7	9

No.	Kabupaten/Kota/ Satuan Pendidikan Negeri	Jumlah	Status Kepemilikan / Jenis Surat Kepemilikan	
			Bersertifikat Hak Milik	Belum Bersertifikat Hak Milik
	SMA	8	3	7
	SMK	7	4	3
	SLB	1	0	1
4	**Kab. Bengkalis**	56	27	29
	SMA	35	20	15
	SMK	19	7	12
	SLB	2	0	2
5	**Kab. Kepulauan Meranti**	20	3	17
	SMA	17	2	15
	SMK	2	1	4
	SLB	1	0	1
6	**Kab. Kuantan Singingi**	34	22	12
	SMA	21	15	6
	SMK	12	7	5
	SLB	1	0	1
7	**Kab. Indragiri Hulu**	38	13	25
	SMA	25	7	18
	SMK	12	6	6
	SLB	1	0	1
8	**Kab. Indragiri Hilir**	35	21	14
	SMA	25	15	10
	SMK	9	6	3
	SLB	1	0	1
9	**Kab. Rokan Hulu**	55	25	30
	SMA	31	16	15
	SMK	23	9	14
	SLB	1	0	1
10	**Kab. Rokan Hilir**	48	17	31
	SMA	41	16	25
	SMK	6	1	5
	SLB	1	0	1
11	**Kab. Siak**	48	21	27
	SMA	34	14	20
	SMK	13	6	7
	SLB	1	1	0
12	**Kab. Pelalawan**	32	19	13
	SMA	20	14	6
	SMK	10	5	5
	SLB	2	0	2
13	**Kab. Kampar**	63	12	51
	SMA	43	11	32
	SMK	16	1	15
	SLB	4	0	4

Sumber data *: Data Aset Dinas Pendidikan Provinsi Riau 2024*

2) Aset Barang

Rekapitulasi Aset Jumlah Barang Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.6
Rekapitulasi Aset Jumlah Barang
Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2024

No.	Nama Barang	Jumlah
1	Mobil Dinas Operational	10
2	Mobil Operasional Mini Bus	1
3	Mobil Operasional Double Cabin	3
4	Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	23
5	Komputer Unit	189
6	Peralatan Komputer	48
7	Printer	160
8	Mesin Fotocopy	7

Sumber data *: Data Aset Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2024*

Berdasarkan data pada tabel tersebut diketahui bahwa Aset Barang Dinas Pendidikan Provinsi Riau ada 49 jenis barang dari aset tersebut terbanyak adalah Alat Rumah Tangga yang berjumlah 560.498 buah.

Tabel. 2.7

Data Sarana dan Prasarana Pendukung Inklusi dan Gender

No.	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Ruang Menyusui	1
2	WC Disabilitas	1
3	WC Laki-Laki	5
4	WC Perempuan	5
5	Tangga Disabilitas	2
6	Kursi Roda	1
	Total	**15**

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Capaian Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

2.3.1.1 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah tahun 2020-2024 Provinsi Riau berdasarkan sumber data Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki trend meningkat, Pencapaian angka rata-rata lama sekolah Provinsi Riau hingga

tahun 2024 yaitu 0,79 tahun sudah diatas wajib belajar 9 tahun. Namun demikian, pencapaian angka rata-rata lama sekolah Provinsi Riau lebih baik dibandingkan Nasional 8,85 tahun. Oleh karena itu, upaya peningkatan angka rata-rata lama sekolah minimal 9 tahun tetap menjadi prioritas pembangunan sumberdaya manusia di Provinsi Riau ke depannya melalui program peningkatan wajib belajar 15 tahun dan didukung pendidikan universal. Terdapat 5 kabupaten yang perlu mendapatkan prioritas utama dalam peningkatan RLS karena berada di bawah rata-rata RLS Provinsi yaitu Kampar, Bengkalis, Siak, Dumai dan Pekanbaru lengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah.

Gambar 2.3 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Riau Tahun 2024

Gambar 2.4 Rata-Rata Lama Sekolah Per Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024

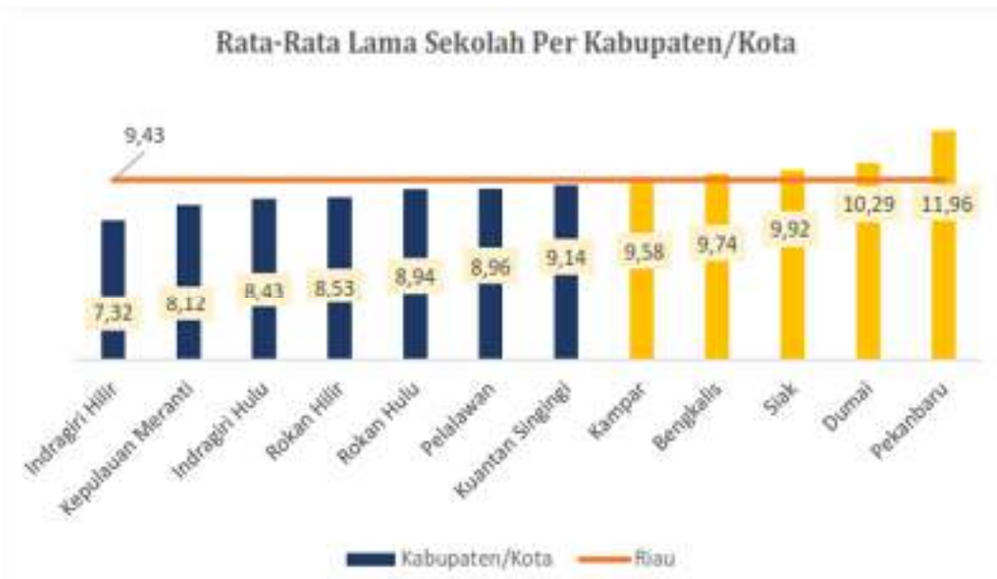

Selain itu, Provinsi Riau juga masih menghadapi tantangan yang berat untuk sektor Pendidikan, terutama untuk meningkatkan akses layanan Pendidikan dasar bagi penduduk miskin maupun upaya untuk menjamin

kesinambungan terhadap akses layanan pendidikan. Hal ini tergambar dari hasil analisis data yang terdeskripsi dalam gambar berikut:

Gambar 2.5 Tingkat Partisipasi Pendidikan Partisipasi Murni APM SMA Berdasarkan Status Kesejahteraan Penduduk (Persentase dan Jumlah Individu) di Provinsi Riau, Tahun 2024

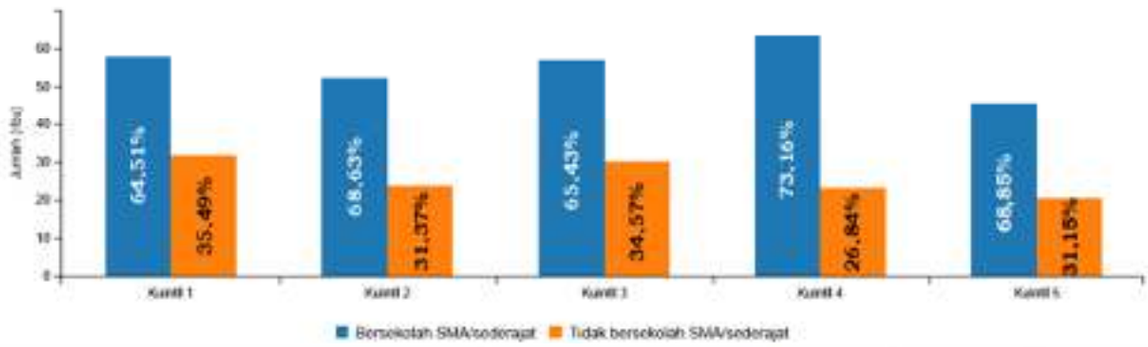

Pendidikan_SMA	Kuintil 1	Kuintil 2	Kuintil 3	Kuintil 4	Kuintil 5	Total
Bersekolah SMA/sederajat	57,850	52,129	56,797	63,370	45,476	275,622
Tidak bersekolah SMA/sederajat	31,828	23,029	30,006	23,248	20,575	129,486
total	89,678	75,858	86,803	86,618	66,051	405,108

Sumber: Sepakat (Susenas) Bappenas, Tahun 2025

Berdasarkan gambar diatas, hambatan akses pendidikan tidak hanya pada penduduk kuintil 1 yang miskin dan rentan, namun juga pada kelompok penduduk kaya, namun demikian hambatan untuk kelompok kaya hampir sama dibandingkan dengan kelompok penduduk miskin dimana terdapat 35,49% lebih penduduk miskin yang tidak bersekolah di SMA/sederajat sedangkan kelompok penduduk kaya di kuintil 5 terdapat 31,15% penduduk kaya yang tidak bersekolah di SMA/sederajat. Konsisten dengan data diatas, untuk kesinambungan lanjutan pendidikan juga menunjukan bahwa pada rumah tangga miskin akses terhadap kesinambungan pendidikan juga lebih rendah dibandingkan dengan kelompok rumah tangga yang kaya. Kondisi ini merupakan faktor yang menyebabkan rendahnya angka harapan lama sekolah dan juga rata-rata tingkat pendidikan penduduk di Provinsi Riau. Tingkat keberlanjutan sekolah menyajikan persentase tahun belajar yang sudah diselesaikan oleh penduduk yang sudah bersekolah lagi. Tahun belajar bersifat exhaustive, artinya penduduk yang sudah menamatkan 6 tahun belajar akan dihitung sudah menamatkan 1 sampai 5 tahun belajar juga. Tingkat keberlanjutan sekolah disajikan dalam bentuk kurva yang menunjukkan pada tahun belajar berapa tingkat partisipasi sekolah menurun secara

signifikan yang menandakan momentum terjadinya putus sekolah. Sesuai dengan tahun belajar masing-masing jenjang pendidikan, transisi SD ke SMP ditandai dengan tahun belajar 6 ke 7, dan transisi dari SMP ke SMA ditandai dengantahun belajar 9 ke 10. Hal ini tergambar dalam gambar berikut :

Gambar 2.6 Tingkat Keberlanjutan Sekolah Penduduk Usia 15-24 Tahun di Provinsi Riau, Tahun 2024

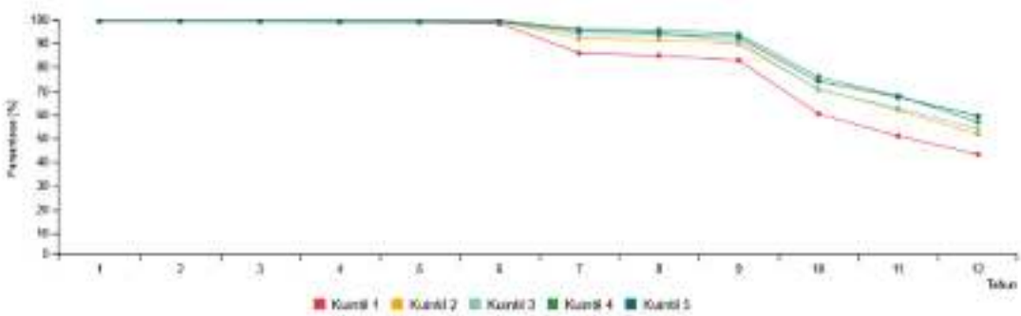

Kuintil	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kuintil_1	99.54	99.54	99.54	99.31	99.05	99.66	86.12	85.01	83.12	60.61	51.26	43.43
Kuintil_2	99.66	99.66	99.55	99.38	99.38	99.38	92.19	91.78	89.99	70.94	62.02	52.00
Kuintil_3	99.70	99.70	99.70	99.63	99.63	99.63	94.03	93.78	91.18	70.57	62.95	54.38
Kuintil_4	99.90	99.90	99.90	99.89	99.89	99.89	96.19	95.95	94.01	76.15	68.15	57.16
Kuintil_5	99.58	99.58	99.55	99.28	99.28	99.28	95.39	94.41	92.77	74.28	67.58	59.61

Sumber: Sepakat (Susenas) Bappenas, Tahun 2025

2.3.1.2 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Perkembangan angka harapan lama sekolah tahun 2020-2024 Provinsi Riau memiliki trend meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,41 persen per tahun. Pencapaian angka rata-rata harapan lama sekolah Provinsi Riau hingga tahun 2024 yaitu 13,42 tahun sudah di atas wajib belajar 9 tahun. Berdasarkan gambar dibawah menunjukkan bahwa terdapat tiga wilayah yang memiliki HLS lebih tinggi dari rata-rata HLS Provinsi Riau yaitu Kabupaten Bengkalis (13,44 tahun), Kabupaten Kampar (13,61) tahun dan Kota Pekanbaru (15,84 tahun). Hal ini sejalan dengan jumlah penduduk berumur 19-24 tahun yang melanjutkan ke perguruan tinggi dimana kabupaten/kota tersebut menjadi kabupaten/kota dengan urutan tertinggi dari jumlah penduduknya yang masuk perguruan tinggi.

Gambar 2.7 Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Riau Tahun 2024

Gambar 2.8 Angka Harapan Lama Sekolah per Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024

2.3.1.3 Angka Literasi/Numerasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan pada pasal 11 yang menyatakan bahwa kualitas hasil belajar peserta didik mencakup Literasi dan Numerasi. Kemampuan Literasi dianggap sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan informasi untuk mengembangkan pengetahuan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Literasi merujuk pada kemampuan sesorang untuk membaca, menulis dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk kepada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka. Literasi dan numerasi sangat penting dalam kehidupan modern karena hampir semua aspek kehidupan memerlukan keterampilan ini. Misalnya, untuk memahami instruksi dokter, membaca label makanan, atau mengelola keuangan pribadi seseorang harus memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang baik.

Kemampuan literasi dan numerasi juga sangat penting dalam pendidikan. Siswa yang memiliki keterampilan literasi numerasi yang baik memiliki keunggulan dalam memahami pelajaran dan memecahkan masalah. Oleh karena itu literasi numerasi adalah dua keterampilan dasar yang harus dipelajari dan dikuasai oleh semua orang terutama anak-anak di usia sekolah.

Berikut ini disajikan angka literasi/numerasi Provinsi Riau selama tahun 2021 sampai dengan 2023.

Tabel 2.8

Angka Literasi/Numerasi Provinsi Riau Tahun 2021-2023

Kelompok Indikator	Capaian		
	2021	2022	2023
Kemampuan Literasi			
SMA	62,84	63,27	69,23
SMK	60,71	60,41	65,94
SMALB	57,63	57,48	64,80
SMPLB	67,68	69,58	65,96
SDLB	57,43	57,09	69,45
Kemampuan Numerasi			
SMA	50,47	52,89	58,64
SMK	49,64	50,94	55,81
SMALB	58,30	54,86	59,56
SMPLB	55,38	60,26	65,75
SMALB	48,15	52,70	58,90

Sumber: Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan Tahun 2024

Rata-rata kemampuan literasi pada setiap jenjang pendidikan di Provinsi Riau masih berkisar pada angka 60 persen pada tahun 2023, sedangkan untuk kemampuan numerasi masih berkisar 50-60 persen dan dilihat dari trend dari tahun ketahun mengalami peningkatan rata- rata 2-4 persen.

2.3.1.4 Angka Partisipasi Kasar SMA Sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah aktif pada suatu jenjang 22endidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia yang sesuai dengan jenjang 22endidikan tersebut. Tujuan pengukuran APK adalah untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat 22endidikan di suatu wilayah/negara. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah disuatu jenjang 22endidikan pada suatu wilayah.

Tabel. 2.9

Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA Provinsi Riau Tahun 2020-2023

No	Kab./Kota	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA			
		2020	2021	2022	2023
1	Kuantan Singingi	90.32	95.82	81	94.75
2	Indragiri Hulu	88.50	82.49	71.21	86.10
3	Indragiri Hilir	91.56	99.97	65.96	94.42
4	Pelalawan	90.44	89.67	86.46	88.48
5	Siak	89.57	92.33	81.73	93.79
6	Kampar	90.67	100.30	83.72	94.91
7	Rokan Hulu	91.46	90.41	85.39	98.48
8	Bengkalis	88.21	96.67	90.07	98.22
9	Rokan Hilir	91.38	95.60	78.70	84.83
10	Kep. Meranti	91.97	105.41	85.22	99.88
11	Pekanbaru	92.30	98	93.03	93.86
12	Dumai	92.73	92	76.27	89.94
	RIAU	**93.44**	**95.24**	**94.45**	**92.91**
	NASIONAL	**92.56**	**92.80**	**92.11**	**92.51**

***Sumber Data**: BPS (Susenas) Tahun 2024*

Selama kurun waktu 2020-2023 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Provinsi Riau cenderung mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2020 APK SMA/MA/SMK Provinsi Riau sebesar 84,89% , tahun 2021 turun menjadi 84,11%, tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 84,85% dan pada tahun 2023 naik menjadi 85,12%. Capaian APK SMA/MA/SMK Provinsi Riau tahun 2023 lebih rendah dari capaian rata-rata nasional yaitu capaian provinsi sebesar 85,12 % dan capaian nasional sebesar 92,51%.

Gambar 2.9 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA Se-Provinsi Riau Tahun 2023

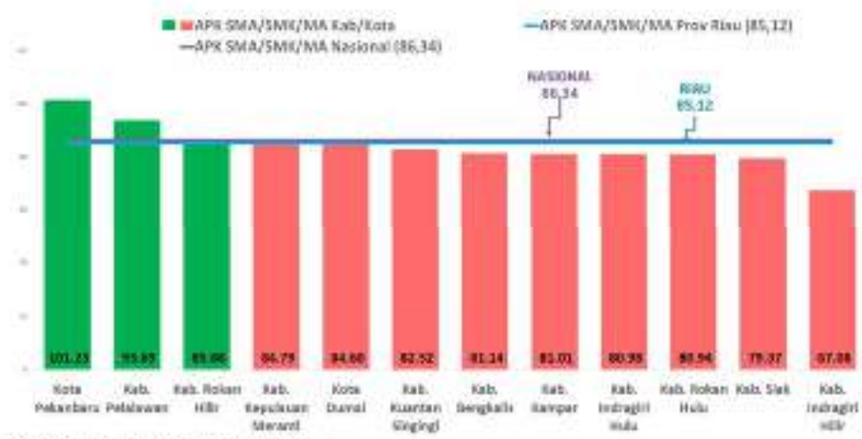

Sumber: BPS (Susenas) Tahun 2024

Berdasarkan grafik posisi relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA se Provinsi Riau Tahun 2023 sebesar 85,12 %, di bawah capaian Nasional sebesar 86,34%. Untuk sebaran APK SMA/SMK/MA se Provinsi Riau Kabupaten/Kota, terdapat 9 Kabupaten yang dibawah APK Provinsi yaitu Kab. Kepulauan Meranti, Kota Dumai, Kab. Pelalawan, Kab. Kuantan Singinngi, Kab. Bengkalis, Kab. Kampar, Kab. Indragiri Hulu dan Kab. Rokan Hulu, Kab. Siak. Sedangkan 3 Kabupaten/Kota diatas APK Provinsi/Nasional yaitu Kota Pekanbaru, Kab. Pelalawan, Kab. Rokan Hilir.

Gambar 2.10 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA Nasional Tahun 2023

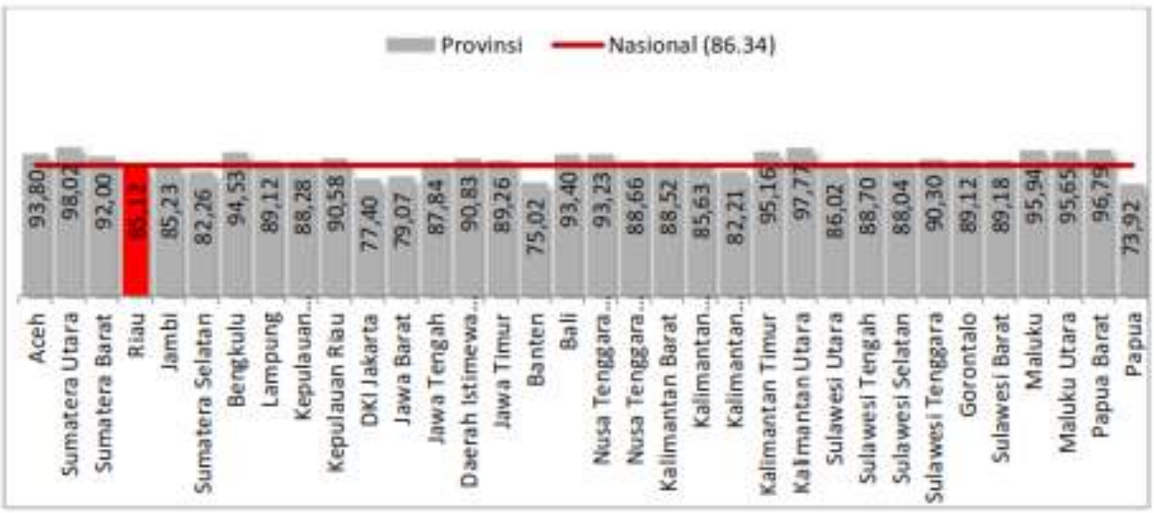

Sumber: BPS (Susenas) Tahun 2024

Berdasarkan grafik posisis relatif APK SMA/SMK/MA Nasional tahun 2023, APK SMA/SMK/ MA Provinsi Riau sebesar 85,12% sedangkan posisi nasional sebesar 86,34%. Capaian APK SMA/SMK/MA Provinsi Riau berada dibawah capaian Nasional. Ada beberapa provinsi yang berada di atas capaian provinsi Riau yaitu, Aceh, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat,Daerah Istimewa Jogyakarta, Bali dan Kalimantan Utara.

2.3.1.4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA

Angka Partisipasi Murni adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai jenjang pendidikannya. Perkembangan APM SMA/SMK/MA Provinsi Riau tahun 2020 sampai dengan 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10

Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Kode	Provinsi/Kabupaten/ Kota	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA				
		2020	2021	2022	2023	2024
	NASIONAL	**62.36**	**61.65**	**61.97**	**62.53**	**64.32**
14	**RIAU**	**64.01**	**64.00**	**63.87**	**64.81**	**68.04**
14.01	Kampar	60.49	60.89	61.35	64.35	67.40
14.02	Indragiri Hulu	59.83	58.85	58.82	59.63	63.50
14.03	Bengkalis	66.98	67.05	67.22	65.32	69.99
14.04	Indragiri Hilir	51.73	51.61	51.75	53.75	57.85
14.05	Pelalawan	59.17	59.71	60.36	67.83	70.08
14.06	Rokan Hulu	68.49	68.51	65.37	54.92	52.61
14.07	Rokan Hilir	57.71	57.80	57.76	63.44	68.56
14.08	Siak	71.88	71.93	71.94	70.13	71.52
14.09	Kuantan Singingi	64.87	64.34	63.87	64.66	65.85
14.10	Kepulauan Meranti	70.03	70.39	70.09	68.42	68.98
14.71	Pekanbaru	71.92	72.28	72.61	74.63	80.97
14.72	Dumai	71.14	70.77	69.58	64.83	67.64

Sumber: Badan Pusat Statistik

Selama kurun waktu 2020-2024 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Provinsi Riau mengalami fluktuatif. Dimana pada tahun 2020 (APM) SMA/MA Provinsi Riau sebesar 64,01 persen, tahun 2021 mengalami penuruan menjadi 64,00 persen, tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 63,87 persen, dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 64,81 persen, dan tahun 2024 naik menjadi 68,04 persen. Capaian APM SMA/MA Provinsi Riau tahun 2024 lebih tinggi dari capaian rata-rata nasional yaitu capaian provinsi sebesar 68,04 persen dan capaian nasional sebesar 64,32 persen.

Gambar 2.11 Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau Tahun 2024

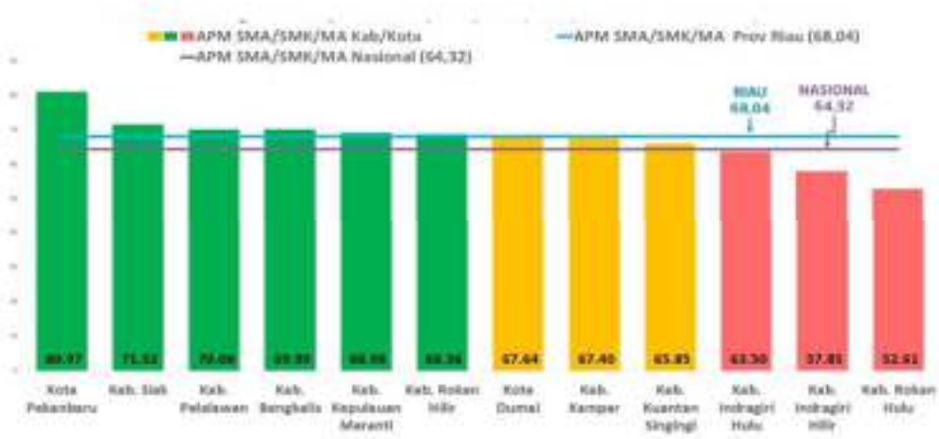

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan grafik posisi relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA se Provinsi Riau tahun 2024 sebesar 68,04 persen diatas capaian Nasional yang sebesar 64,32 persen. Untuk sebaran APM SMA/MA kabupaten/kota, terdapat 5 (lima) kabupaten yang dibawah APM Provinsi yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Kampar dan Kota Dumai. Sedangkan 7 (tujuh) kabupaten/kota di atas APM Provinsi/Nasional yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Pelalawan, Bengkalis, Kepulauan Meranti dan Kota Dumai.

Gambar 2.12 Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Nasional Tahun 2024

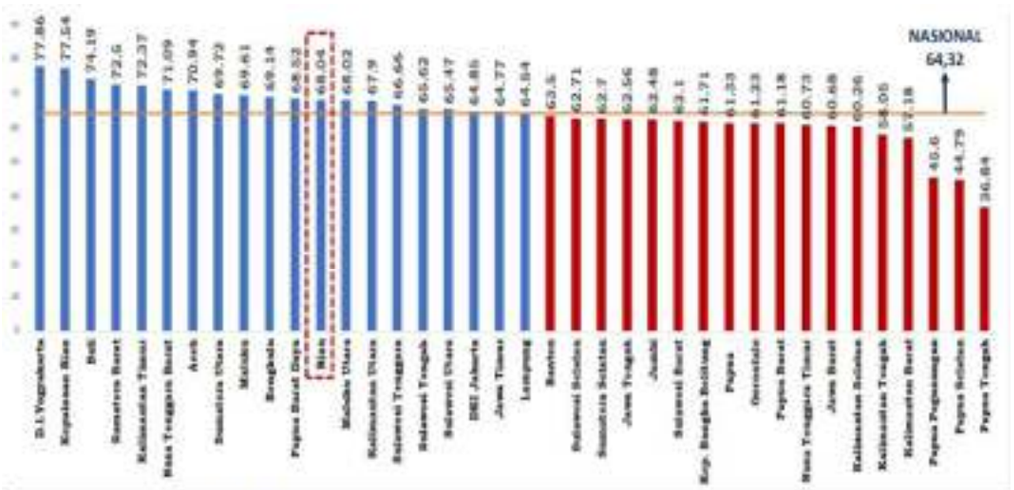

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Berdasarkan posisi relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA tahun 2024 Provinsi Riau berada pada posisi ke 12 (dua belas) di tingkat Nasional, dengan angka APM sebesar 68.04, berada diatas posisi Nasional sebesar yang sebesar 64,32. Dalam hal ini menunjukkan bahwa partisipasi Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA yang bersekolah dengan usia sekolah di Provinsi Riau cukup tinggi.

Angka Partisipasi Murni Miskin Provinsi Riau juga masih menghadapi tantangan yang berat untuk sektor Pendidikan, terutama untuk meningkatkan akses layanan pendidikan dasar bagi penduduk miskin maupun upaya untuk menjamin kesinambungan terhadap akses layanan pendidikan. Hal ini tergambar dari hasil analisis data yang terdeskripsi dalam gambar berikut:

Gambar 2.13 Tingkat Partisipasi Pendidikan Partisipasi Murni APM SMA Berdasarkan Status Kesejahteraan Penduduk (Persentase dan Jumlah Individu) di Provinsi Riau, Tahun 2024

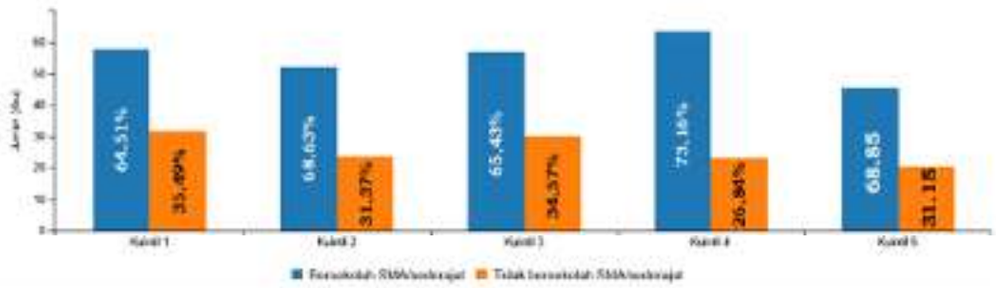

PendidikanSMA	Kuintil 1	Kuintil 2	Kuintil 3	Kuintil 4	Kuintil 5	Total
Bersekolah SMA/sederajat	57,850	52,129	56,787	63,370	45,476	275,612
Tidak bersekolah SMA/sederajat	31,628	23,829	30,006	25,248	20,575	129,486
total	89,478	75,958	86,803	88,618	66,051	405,108

Sumber: Bappenas

Berdasarkan gambar diatas, hambatan akses pendidikan tidak hanya pada penduduk kuintil 1 yang miskin dan rentan, namun juga pada kelompok penduduk kaya, namun demikian hambatan untuk kelompok kaya hampir sama dibandingkan dengan kelompok penduduk miskin dimana terdapat 35,49 persen lebih penduduk miskin yang tidak bersekolah di SMA/sederajat sedangkan kelompok penduduk kaya di kuintil 5 terdapat 31,15 persen penduduk kaya yang tidak bersekolah di SMA/sederajat. Konsisten dengan data diatas, untuk kesinambungan lanjutan pendidikan juga menunjukan bahwa pada rumah tangga miskin akses terhadap kesinambungan pendidikan juga lebih rendah dibandingkan dengan kelompok rumah tangga yang kaya.

Kondisi ini merupakan faktor yang menyebabkan rendahnya angka harapan lama sekolah dan juga rata-rata tingkat Pendidikan penduduk di Provinsi Riau. Tingkat keberlanjutan sekolah disajikan dalam bentuk persentase tahun belajar yang sudah diselesaikan oleh penduduk yang bersekolah lagi. Tahun belajar bersifat exhaustive, artinya penduduk yang sudah menamatkan 6 tahun belajar akan dihitung sudah menamatkan 1 sampai 5 tahun belajar juga. Tingkat keberlanjutan sekolah disajikan dalam bentuk kurva yang menunjukkan pada tahun belajar berapa tingkat partisipasi sekolah menurun secara signifikan yang menandakan momentum terjadinya putus sekolah. Sesuai dengan tahun belajar masing-masing jenjang pendidikan, transisi SD ke SMP ditandai dengan tahun belajar 6 ke 7, dan transisi dari SMP ke SMA ditandai dengan tahun belajar 9 ke 10. Hal ini tergambar dalam gambar berikut:

Gambar 2.14 Tingkat Keberlanjutan Sekolah Penduduk Usia 15-24 Tahun di Provinsi Riau, Tahun 2024

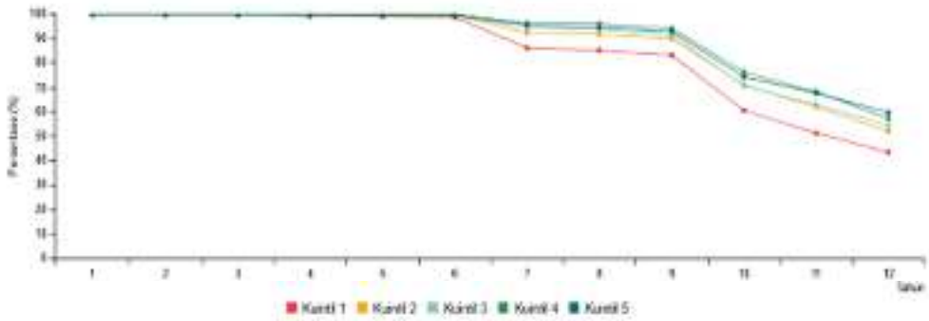

Kuintil	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kuintil_1	99.54	99.54	99.54	99.31	99.06	95.66	88.12	85.01	83.12	60.51	51.26	43.43
Kuintil_2	99.66	99.55	99.55	99.38	99.38	99.38	92.19	91.76	89.99	70.94	62.02	52.00
Kuintil_3	99.70	99.70	99.70	99.63	99.63	99.63	94.03	93.78	90.18	70.57	62.95	54.30
Kuintil_4	99.90	99.90	99.90	99.89	99.89	99.89	95.18	95.95	94.01	78.15	68.15	57.16
Kuintil_5	99.98	99.58	99.55	99.28	99.28	99.28	96.39	94.41	92.77	74.26	67.59	59.61

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

2.3.1.5 Angka Partisipasi Sekolah

Perkembangan angka partisipasi sekolah Provinsi Riau meningkat dari tahun 2020-2022. Angka partisipasi sekolah di Provinsi Riau secara umum diatas nasional, khususnya pada jenjang SD/sederajat, SMA/sederajat dan perguruan tinggi. Nilai tertinggi Angka Pertisipasi sekolah berada pada jenjang umur 7-12 tahun atau tingkat SD/Sederajat. Angka partisipasi sekolah terendah berada pada jenjang umur 19-24 tahun atau tingkat pendidikan tinggi, yang mengindikasikan bahwa hanya 28.35-28,65 % yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Secara rinci angka partisipasi sekolah di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11

Angka Partisipasi Sekolah Riau dan Indonesia Sesuai Jenjang Pendidikan Tahun 2021-2023 di Provinsi Riau

Angka Partisipasi Sekolah	Usia (Tahun)											
	7-12			13-15			16-18			19-24		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Riau	99,65	99,61	95,65	95,66	95,72	95,89	77,81	77,32	78,15	28,79	28,65	30,07
Indonesia	99,19	99,10	99,16	95,99	95,92	96,10	73,09	73,15	73,42	26,01	25,99	26,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Perkembangan angka partisipasi sekolah Provinsi Riau meningkat dari tahun 2021-2023. Angka partisipasi sekolah di Provinsi Riau secara umum diatas nasional, khususnya pada jenjang SD/sederajat (usia 7-12 tahun), SMP/sederajat (usia 13-15 tahun) SMA/sederajat (usia 16-18 tahun) dan

perguruan tinggi (usia 19-24 tahun). Nilai tertinggi Angka Pertisipasi sekolah berada pada jenjang umur 7-12 atau tingkat SD/Sederajat. Angka partisipasi sekolah terendah berada pada jenjang umur 19-24 tahun atau tingkat pendidikan tinggi. Sedangkan Angka partisipasi sekolah jenjang SMP/sederajat lebih tinggi dibandingkan dengan angka partsipasi sekolah jenjang SMA, artinya banyak anak yang tamatan SMP tidak melanjutkan lagi ke sekolah jenjang SMA, begitu juga anak yang jenjang SMA/sederajatbanyak tidak melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Hal trsebut bisa disebabkan beberapa factor, antara lain anak tersebut sudah bekerja membantu orang tua, menikah pada usia sekolah atau sekolah yang tidak dapat diakses. Adapun Angka Partisipasi Sekolah Penyandang Disabilitas Usia 4-18 tahun dapat dilihat pada table berikut

Tabel 2.12

Angka Partisipasi Sekolah Penyandang Disabilitas Usia 4-18 tahun

Angka Partisipasi Sekolah Penyandang Disabilitas Usia 4-18 tahun	Tahun		
	2022	2023	2024
Riau	20,35	56,75	56.75

Sumber : Rapor Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah Penyandang Disabilitas Usia 4-18 tahun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kinerja dalam upaya meningkatkan partisipasi anak sekolah penyandang disabilitas tersebut.

Gambar 2.15 Capaian Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun (Persen dan Jumlah) Berdasarkan Status Kesejahteraan di Provinsi Riau, Tahun 2024

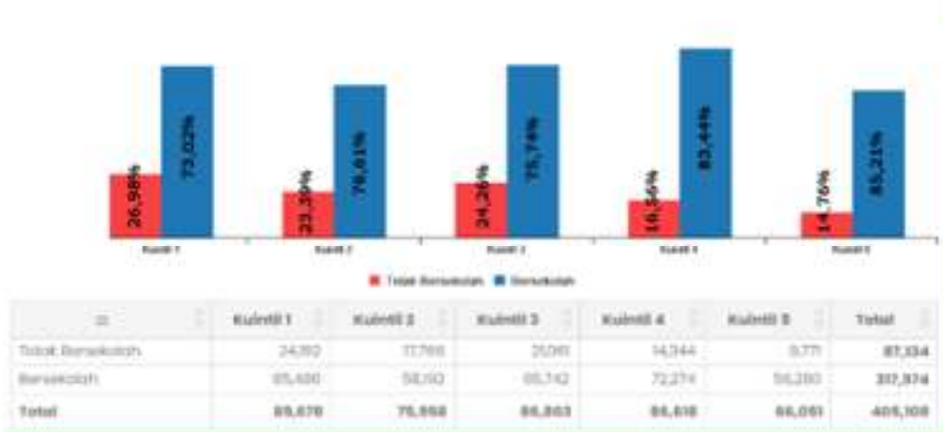

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun berdasarkan status kesejahteraan penduduk khususnya di Kuintil 1 terdapat 26,98 persen yang tidak bersekolah, namun hal ini juga terjadi pada penduduk dengan status kesejahteraan tertinggi yaitu di Kuintil 5 sebesar 14,76 persen. Berdasarkan data tersebut diatas perlu

dilakukan peningkatan kualitas pendataan anak yang tidak sekolah dan penguatan pola asuh pendidikan keluarga agar tingkat
partisipasi sekolah dapat ditingkatkan.

2.3.1.6 Rasio Ketersediaan Ruang Kelas dengan Penduduk Usia Sekolah

Tabel 2.13

Rasio Ketersediaan Ruang Kelas dengan Penduduk Usia Sekolah

Kabupaten/Kota	Penduduk Usia (7-12)	Jumlah Ruang Kelas	Rasio	Penduduk Usia (13-15)	Jumlah Ruang kelas	Rasio	Penduduk Usia (16-18)	Jumlah Ruang Kelas	Rasio
Kampar	104207	4579	22.76	54373	1369	39.72	67501	785	86.26
Bengkalis	78613	3420	22.40	38517	1193	32.29	37656	728	52.66
Indragiri Hulu	58269	2731	21.34	27729	849	32.67	23292	371	62.78
Indragiri Hilir	82818	3620	22.88	39898	928	42.99	41310	999	82.79
Pelalawan	56179	2406	23.35	22054	730	30.21	19651	353	56.24
Rokan Hulu	72549	3196	22.71	34527	1017	34.24	28142	423	67.52
Rokan Hilir	67154	3577	24.37	42948	1088	39.47	45793	727	62.98
Siak	59898	3023	22.04	31083	991	31.37	30107	542	55.17
Kuantan Singingi	39467	2102	18.78	20424	691	29.56	16803	308	55.09
Kepulauan Meranti	21844	1279	16.92	11187	307	36.44	10978	238	46.13
Pekanbaru	130809	3891	33.13	61336	1684	36.40	62930	1021	61.64
Dumai	37836	1443	26.22	17165	483	35.56	16932	218	77.67
Riau	617980	26487	23.47	402260	11310	35.58	377887	6210	60.85

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Data memperlihatkan bahwa di Provinsi Riau rasio ketersediaan sekolah untuk tingkat SD/MI pada tahun 2023/2024 adalah 23,47 dan sk standar pelayanan minimum berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 untuk SD/MI paling banyak 28 orang dan paling sedikit 20 orang. Ini berarti bahwa pada tingkat Provinsi Riau rasio ketersediaan sekolah sudah baik karena masih dibawah standar pelayanan minimum yang ditetapkan. Dilihat sebarannya pada kabupaten/kota di Provinsi Riau, terdapat Kota Pekanbaru yang melebihi standar pelayanan minimum. Hal ini disebabkan tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk dengan pertambahan ruangan kelas untuk SD. Oleh sebab itu dalam upaya untuk mensukseskan wajib belajar 12 tahun kebijakan terhadap kota tersebut adalah penambahan ruangan kelas atau menambah sekolah baru untuk memenuhi SPM yang telah ditetapkan.

Kemudian pada tingkat SLTA, ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah SLTA di Provinsi Riau pada tahun 2023 sebesar 60,85 sedangkan SPM SMA/MA/SMK yang ditetapkan berdasarkan Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 adalah sebesar 15 orang paling sedikit dan 36 orang paling banyak. Keadaan ini menggambarkan ketersediaan sekolah SLTA di Provinsi Riau saat ini masih jauh dari SPM yang sudah ditetapkan. Dilihat dari sebarannya, semua kabupaten/kota melebihi SPM. Jika pemerintah Provinsi Riau melakukan kebijakan wajib belajar 12 tahun dengan asumsi penduduk usia sekolah 16-18 semuanya sekolah, maka untuk mencapai SPM diperlukan penambahan ruang kelas.

Bangunan gedung sekolah merupakan salah satu prasarana pendidikan yang mempunyai peran penting untuk kelancaran proses pendidikan. Bangunan gedung sekolah dalam kondisi baik akan memberikan kontribusi bagi semangat belajar, karena memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik. Dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan terbaik kepada masyarakat diperlukan sarana dan prasarana sekolah yang memadai.

Tabel 2.14

Kondisi Ruang Kelas SMA dan SMK di Provinsi Riau Tahun 2023

Kabupaten /Kota	SMA Negeri					SMK Negeri				
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Jumlah	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Jumlah
Kampar	549	127	27	11	714	129	47	28	6	210
Bengkalis	429	126	39	22	616	160	49	27	28	264
Indragiri Hulu	189	111	16	8	324	98	76	10	4	188
Indragiri Hilir	222	89	49	36	396	93	53	4	7	157
Pelalawan	233	39	26	6	304	103	51	11	9	174
Rokan Hulu	231	111	46	11	399	175	41	47	4	267
Rokan Hilir	375	85	45	52	557	40	20	4	2	66
Siak	340	120	34	20	514	134	47	10	17	208
Kuantan Singingi	202	79	24	-	305	97	78	15	5	195
Kepulauan Meranti	94	63	20	17	194	18	-	8	17	43
Pekanbaru	390	63	17	32	502	283	6	4	4	297
Dumai	116	26	12	-	154	58	83	1	9	151
Provinsi Riau	**3.370**	**1.039**	**355**	**215**	**4.979**	**1.388**	**551**	**169**	**112**	**2.220**
	67,68%	**20,87%**	**7,13%**	**4,32%**	**100%**	**62,52%**	**24,82%**	**7,61%**	**5,05%**	**100%**

Sebaran kondisi ruang kelas SMA/SMK di Provinsi Riau pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di atas. Dimana sebagian besar ruang kelas SMA dalam kondisi baik sebesar 67,68% rusak ringan 20,87%, rusak sedang 7,13 % dan rusak berat 4,32%. Sedangkan ruang kelas SMK untuk kondisi baik sebesar 62,52%, rusak ringan 24,82%, rusak sedang 7,61% dan rusak berat 5,05 %.

2.3.1.7 Rasio Siswa/Guru SMA/MA/SMK

Berdasarkan Permendikbud Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, idealnya seorang guru pada jenjang SMA bertanggungjawab atas 20 murid dan untuk jenjang SMK seorang guru bertanggung jawab atas 15 murid. Sebaran secara kewilayahan rasio guru dan murid pada jenjang SMA/MA dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15

Rasio Siswa/Guru SMA/MA Tahun 2020-2023

No	Kabupaten/ Kota	Rasio Siswa / Guru SMA/MA (Siswa)			
		2020	2021	2022	2023
1	Kuantan Singingi	12.10	12.21	12	12.70
2	Indragiri Hulu	14.76	15.06	14.38	15.00
3	Indragiri Hilir	15.73	15.30	16.12	16.03
4	Pelalawan	14.32	13.79	14.33	14.73
5	Siak	15.81	15.41	15.27	14.69
6	Kampar	13.62	13.37	13.38	13.67
7	Rokan Hulu	14.13	13.61	13.68	13.72
8	Bengkalis	15.44	14.85	14.64	14.53
9	RokanHilir	15.90	15.54	15.29	15.13
10	Kep. Meranti	11.07	10.42	10.45	10.64
11	Pekanbaru	13.84	14	14.47	14.81
12	Dumai	14.80	15	15.42	15.74
	RIAU	**14.45**	**14.23**	**14.31**	**14.43**

Sumber : Kemendikbud Tahun 2024

Selama kurun waktu 2020-2023 Rasio Siswa/Guru Provinsi Riau mengalami fluktuatif. Dimana pada tahun 2020 Rasio Siswa/Guru sebesar 14,45 siswa, tahun 2021 mengalami penuruan menjadi 14,23 siswa tahun 2022 kembali naik menjadi 14,31 siswa dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 14,43 siswa. Walaupun demikian perbandingan rasio siswa/guru di Provinsi Riau untuk jenjang SMA//MA masih dalam kondisi ideal.

Gambar 2.16 Posisi Relatif Rasio Siswa/Guru SMA/MA Nasional Tahun 2023

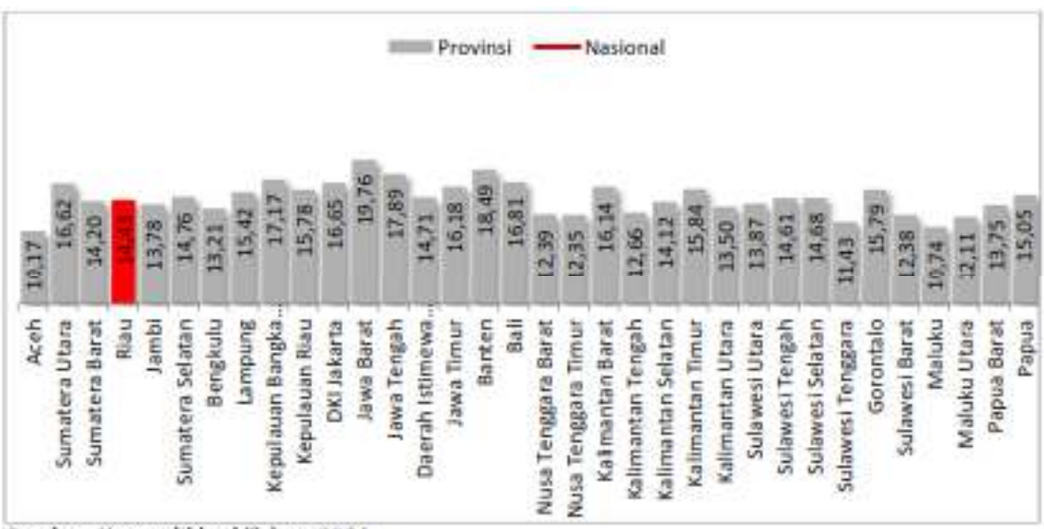

Sumber: Kemendikbud Tahun 2024

Berdasarkan grafik posisi relatif Rasio Siswa/guru tahun 2023 Provinsi Riau sebesar 14,43 siswa. Ada beberapa provinsi rasio siswa/gurunya yang berada di atas capaian provinsi Riau yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa

Tengah, DIY, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimatan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Papua.

Sebaran secara kewilayahan rasio guru dan murid pada jenjang SMK dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16 Rasio Siswa/Guru SMK Tahun 2020-2023

No	Kabupaten/ Kota	Rasio Siswa/Guru SMK (Siswa)			
		2020	2021	2022	2023
1	Kuantan Singingi	10.52	10.35	10	9.93
2	Indragiri Hulu	13.94	13.86	13.30	13.83
3	Indragiri Hilir	11.95	10.89	10.08	10.51
4	Pelalawan	14.62	13.50	13.44	13.36
5	Siak	13.29	12.63	12.04	11.53
6	Kampar	12.25	11.20	11.13	11.80
7	Rokan Hulu	13.08	12.96	12.88	12.71
8	Bengkalis	11.29	11.09	10.55	10.65
9	RokanHilir	14.85	14.41	13.69	13.31
10	Kep. Meranti	14.01	11.75	10.72	11.24
11	Pekanbaru	14.66	14	14.52	14.82
12	Dumai	14.76	15	14.75	14.47
	RIAU	**13.46**	**13.00**	**12.74**	**12.86**

Sumber : Kemendikbud Tahun 2024

Selama kurun waktu 2020-2023 Rasio Siswa/Guru SMK Provinsi Riau mengalami penurunan Dimana pada tahun 2020 Rasio Siswa/Guru SMK sebesar 13,46 siswa, tahun 2021 mengalami penuruan menjadi 13 siswa tahun 2022 kembali turun menjadi 12,74 siswa dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sedikit menjadi 12,86 siswa. Walaupun demikian perbandingan rasio siswa/guru SMK di Provinsi Riau masih dalam kondisi ideal.

Gambar 2.17 Posisi Relatif Rasio Siswa/Guru SMK Nasional Tahun 2023

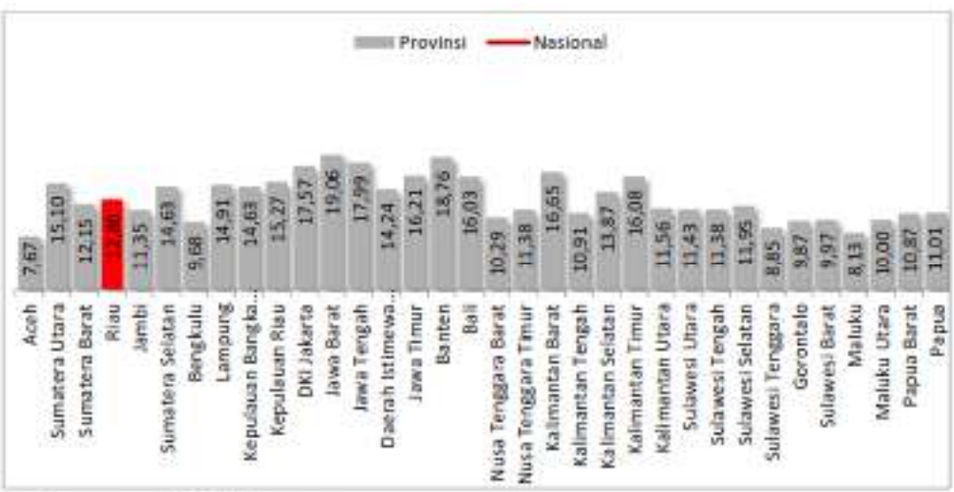

Sumber: Kemendikbud Tahun 2024

Berdasarkan grafik posisi relatif Rasio Siswa/guru SMK tahun 2023 Provinsi Riau sebesar 12,86 siswa. Ada beberapa provinsi rasio siswa/gurunya yang berada di atas capaian Provinsi Riau yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan,

Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

2.3.1.8 Status Akreditasi Satuan Pendidikan

Berikut ini adalah Gambaran Status Akreditasi Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta se-Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut:-

Tabel. 2.17
Rekapitulasi Status Akreditasi Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta Tahun 2024

No	KAB./KOTA	JENJANG	JUMLAH SEKOLAH	JUMLAH AKFREDITASI			
				A	B	C	TIDAK TERAKREDITASI
1	PROVINSI RIAU	SMA NEGERI	321	205	82	18	16
		SMA SWASTA	165	54	58	23	30
		SMK NEGERI	139	55	62	17	5
		SMK SWASTA	179	44	91	28	16
		SLB NEGERI	18	8	10	0	0
		SLB SWASTA	36	3	13	13	7
2	PEKANBARU	SMA NEGERI	21	17	1	-	3
		SMA SWASTA	53	29	13	-	11
		SMK NEGERI	10	9	1	-	-
		SMK SWASTA	53	28	18	5	2
		SLB NEGERI	2	2	-	-	-
		SLB SWASTA	13	2	6	5	-
3	DUMAI	SMA NEGERI	8	6	1	-	1
		SMA SWASTA	9	4	3	1	1
		SMK NEGERI	7	5	2	-	-
		SMK SWASTA	12	1	6	3	2
		SLB NEGERI	1	-	1	-	-
		SLB SWASTA	6	-	2	-	4
4	PELALAWAN	SMA NEGERI	20	13	5	2	-
		SMA SWASTA	7	1	3	2	1
		SMK NEGERI	10	6	3	-	1
		SMK SWASTA	11	-	7	2	2
		SLB NEGERI	2	1	1	-	-
		SLB SWASTA	-	-	-	-	-
5	SIAK	SMA NEGERI	34	19	9	4	2
		SMA SWASTA	4	1	2	1	-
		SMK NEGERI	13	9	3	-	1
		SMK SWASTA	15	2	9	3	1
		SLB NEGERI	1	1	-	-	-

No	KAB./KOTA	JENJANG	JUMLAH SEKOLAH	JUMLAH AKFREDITASI			
				A	B	C	TIDAK TERAKREDITASI
		SLB SWASTA	2	-	2	-	-
6	KAMPAR	SMA NEGERI	43	29	12	1	1
		SMA SWASTA	12	3	3	2	4
		SMK NEGERI	16	3	9	4	-
		SMK SWASTA	19	5	9	1	4
		SLB NEGERI	4	2	2	-	-
		SLB SWASTA	-	-	-	-	-
7	BENGKALIS	SMA NEGERI	35	30	4	-	1
		SMA SWASTA	14	3	6	2	3
		SMK NEGERI	19	6	9	1	3
		SMK SWASTA	11	1	8	1	1
		SLB NEGERI	2	-	2	-	-
		SLB SWASTA	6	1	2	2	1
8	ROKAN HULU	SMA NEGERI	31	19	10	-	2
		SMA SWASTA	7	2	3	-	2
		SMK NEGERI	23	5	13	5	-
		SMK SWASTA	15	-	11	3	1
		SLB NEGERI	1	1	-	-	-
		SLB SWASTA	2	-	1	1	-
9	ROKAN HILIR	SMA NEGERI	41	20	16	3	2
		SMA SWASTA	23	9	9	4	1
		SMK NEGERI	6	-	2	4	-
		SMK SWASTA	20	5	11	3	1
		SLB NEGERI	1	-	1	-	-
		SLB SWASTA	3	-	-	1	2
10	INDRAGIRI HULU	SMA NEGERI	25	11	7	4	3
		SMA SWASTA	8	1	5	-	2
		SMK NEGERI	12	4	7	1	-
		SMK SWASTA	6	-	3	2	1
		SLB NEGERI	1	1	-	-	-
		SLB SWASTA	-	-	-	-	-
11	INDRAGIRI HILIR	SMA NEGERI	25	16	6	2	1
		SMA SWASTA	20	-	9	9	2
		SMK NEGERI	9	3	5	1	-
		SMK SWASTA	10	2	4	4	-
		SLB NEGERI	1	-	1	-	-
		SLB SWASTA	1	-	-	1	-
12		SMA NEGERI	21	19	2	-	-

No	KAB./KOTA	JENJANG	JUMLAH SEKOLAH	JUMLAH AKFREDITASI			
				A	B	C	TIDAK TERAKREDITASI
	KUANTAN SINGINGI	SMA SWASTA	-	-	-	-	-
		SMK NEGERI	12	3	8	1	-
		SMK SWASTA	2	-	1	-	1
		SLB NEGERI	1	-	1	-	-
		SLB SWASTA	-	-	-	-	-
13	KEP. MERANTI	SMA NEGERI	17	6	9	2	-
		SMA SWASTA	8	1	2	2	3
		SMK NEGERI	2	2	-	-	-
		SMK SWASTA	5	-	4	1	-
		SLB NEGERI	1	-	1		-
		SLB SWASTA	3	-	-	3	-

Sumber data *: DAPODIK Tahun 2024*

Dari data diatas terlihat total seluruh Satuan Pendidikan di Provinsi Riau berjumlah 858 Negeri dan Swasta. Terdapat 74 Satuan Pendidikan jenjang SMA, SMK dan SLB Negeri maupun Swasta yang berstatus Tidak Terakreditasi. Adapun jumlah akreditasi C sebanyak 99 Satuan Pendidikan, sedangkan akreditasi B sebanyak 315 Satuan Pendidikan dan akreditasi A sebanyak 370 Satuan Pendidikan.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada pelaksanaan Renstra disajikan berdasarkan Tabel T-C.23 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada tabel 2.9 yang menyajikan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024 meliputi indikator tujuan, sasaran, dan program serta indikator SPM Pendidikan sebagai berikut:

Tabel. 2.18

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Tujuan																		
1	Rata-rata Lama Sekolah penduduk umur > 25 tahun (Tahun)				9,14	9,19	9,24 – 9,30	9,29 – 9,35	9,35 - 9,40	9,14	9,19	9,22	9,32	9,43	100	100	99,78	100	100,13
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				13,2	13,28	13,37-13,47	13,44-13,53	13,44-13,60	13,2	13,28	13,29	13,30	13,42	100	100	99,40	98,95	99.85
	Sasaran																		
3	APK SM Sederajat				84,61	88,9	90,40	91,9	92,4	86,65	90,11	90,11	90,44	92,09	102,41	101,36	100,04	98,41	99,66
4	APM SM Sederajat				64,01	64	66,36	67,88	68,00	66,86	66,43	66,43	66,43	68,17	104,45	103,80	100,11	97,86	100,25
5	Angka Putus Sekolah SM Sederajat				0,76	0,94	0,74	0,73	0,70	0,76	0,94	0,05	0,18	78,49	100	100	6,76	24,66	89,83
6	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi				93,32	93,71	94,12	94,52	94,92	95,17	96,15	92,59	94,92		101,98	102,60	98,37	100,42	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Program																		
7	Angka partisipasi sekolah (APS) Anak Usia 16-18 tahun (Persen)				77.81	86.38	86.38	86.88	87.38	77.81	77.81	77.32	78.15	78,49					89,83
8	Persentase anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan akses pendidikan				23,98	24	24	24.02	24.04	-	23,98	20,35	56,75	56.75					56,75
9	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang terakreditasi Minimal B (Persen)				82.63	82,83	86,38	86.03	87,38	86.5	86,68	82,16	78,68	93,47	104.68	104,65	95,11	90,56	106,97
10	Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal Budaya Melayu Riau (Persen)				75	80	80	85	90			100	100	90			125,00	117,65	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
11	Persentase satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang mengajukan perizinan terlayani (Persen)				88	100	-	100	100				100	100				100	
12	Rasio kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan dengan Peserta Didik pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus (Poin)				58	70	-	65	70				100					153.85	
	SPM																		
13	Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi					100	100	100	100		77,81	77,32	78,15	78.49		77,81	77,32	78,15	78,49

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	dalam pendidikan (APS)																		
14	Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)					100	100	100	100		23,98	20,35	56,75	56.75		23,98	20,35	56,75	56,75
15	Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional					63,84	67,24	69,12	64,83		62,84	63,27	69,23	73,3		98,43	94,10	100,16	113,06
16	Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional					52,67	55,01	57,12	54,56		50,47	52,89	58,64	61,66		95,82	96,15	102,66	113,01
17	Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional					61,71	65,24	66,45	64,18		60,71	60,41	65,94	68,45		98,38	92,60	99,23	106,65

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
18	Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional					50,74	52,98	55,02	54		49,64	50,94	55,81	57,88		97,83	96,15	101,44	107,18
19	Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.					58,93	59,94	62,80	65,96		57,43	57,09	69,45	72,09		97,45	95,25	110,59	109,29
20	Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.					59,40	60,40	61,40	53,61		58,30	54,86	59,56	66,49		98,15	90,83	97,00	124,03
21	Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.					70,18	73,06	76,54	69,7		67,68	69,58	65,96	76,62		96,44	95,24	86,18	109,93
22	Rerata kompetensi Numerasi SMPLB					56,48	62,67	65,08	61,79		55,38	60,26	65,75	73,61		98,05	96,15	101,03	119,13

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	berdasarkan Asesmen Nasional.																		
23	Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.					58,63	59,63	60,63	62,84		57,63	57,48	64,80	71,71		98,29	96,39	106,88	114,12
24	Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.					85,90	90,28	56,92	56,31		48,15	52,70	58,90	64,31		56,05	58,37	103,48	114,21
25	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK					70,90	78,13	93,23	90		49,55	88,26	87,89	88,38		69,89	112,97	94,27	98,2
26	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK					76,27	78,27	79,00	79		76,90	76,90	80,98	89,86		100,83	98,25	102,51	113,75
27	Indeks Iklim Keamanan SMA					63,81	69,9	80,27	84,78		75,27	69,26	73,46	72,86		117,96	99,08	91,52	85,94

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
28	Indeks Iklim Kebinekaan SMA					56,28	59,28	72,27	85,33		61,44	67,53	74,10	72,93		109,17	113,92	102,53	85,47
29	Indeks Inklusivitas SMA					74,54	76,54	62,28	81,55		53,28	56,28	60,15	60,58		71,48	73,53	96,58	74,29
30	Indeks Iklim Keamanan SMK					62,82	68	78,54	85,31		72,54	67,00	70,50	69,41		115,47	98,53	89,76	81,36
31	Indeks Iklim Kebinekaan SMK					55,12	57,41	70,40	86,67		60,42	65,60	71,51	69,34		109,62	114,27	101,58	80
32	Indeks Inklusivitas SMK					80,84	81,84	59,57	80,82		52,96	55,25	57,14	57,02		65,51	67,51	95,92	70,55
33	Indeks Iklim Keamanan SDLB					80,84	81,84	83,84	87,88		79,84	74,88	71,97	78,52		98,76	91,50	85,84	89,35
34	Indeks Iklim Kebinekaan SDLB					62,36	71,31	73,47	92,39		60,20	69,15	65,82	68,19		96,54	96,97	89,59	73,81
35	Indeks Inklusivitas SDLB					58,55	62,39	65,65	83,58		55,29	59,13	58,64	71,6		94,43	94,77	89,32	85,67
36	Indeks Iklim Keamanan SMPLB					81,48	82,48	83,48	85,73		80,48	74,22	74,03	73,72		98,77	89,99	88,68	85,99
37	Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB					63,7	67,81	70,04	80,36		60,70	65,58	66,10	71,1		95,29	96,71	94,37	88,48

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
38	Indeks Inklusivitas SMPLB					63,3	64,12	67,42	86,48		60,00	60,82	67,67	71,52		94,79	94,85	100,37	82,7
39	Indeks Iklim Keamanan SMALB					82,85	84,85	86,85	84,25		80,85	69,79	70,74	74,45		97,59	82,25	81,45	88,37
40	Indeks Iklim Kebinekaan SMALB					64,38	67,21	69,39	78,51		60,20	65,03	64,80	72,23		93,51	96,76	93,39	92
41	Indeks Inklusivitas SMALB					62,79	62,92	66,28	85.98		58,43	59,56	60,04	70,59		93,06	94,66	90,59	82,1

2.3.2.Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Riau disajikan berdasarkan tabel 2.9 menyajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2021-2024 sebagai berikut :

Tabel. 2.19
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2021-2024

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke -				Rasio Capaian pada Tahun ke -				Rata - rata Pertumbuhan	
	2021 (Juta)	2022 (Juta)	2023 (Juta)	2024 (Juta)	2021 (Juta)	2022 (Juta)	2023 (Juta)	2024 (Juta)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENDAPATAN DAERAH														
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**21,20**	**97,80**	**321,20**	**4.244**	**20**	**240,70**	**897,67**	**1.224**	**94,34**	**246,11**	**279,47**	**28,84**	**6,04**	**4,71**
Pendapatan Retribusi Daerah	21,20	97,80	321,20	722,80	20	240,70	897,67	1.224	94,34	246,11	279,47	169,34	2,38	4,71
Lain-lain PAD yang Sah				3.521										
Jumlah Pendapatan	**21,20**	**97,80**	**321,20**	**4.244**	**20**	**240,70**	**897,67**	**1.224**	**94,34**	**246,11**	**279,47**	**28,84**	**6,04**	**4,71**
BELANJA DAERAH														
BELANJA OPERASI	**1.954.898**	**2.013.839**	**2.074.180**	**2.465.219**	**1.880.820**	**1.931.887**	**2.009.752**	**2.234.586**	**96,21**	**95,93**	**96,89**	**90,64**	**0,08**	**0,06**
Belanja Pegawai	1.052.582	1.085.824	1.181.315	1.602.579	1.042.686	1.051.638	1.147.202	1.572.240	99,06	96,85	97,11	98,11	0,16	0,16
Belanja Barang dan Jasa	738.274	773.747	750.475	715.520	687.027	740.682	717.486	522.405	93,06	95,73	95,60	73,01	-0,01	-0,08
Belanja Hibah	162.360	152.640	138.112	142.288	149.732	137.979	140.819	135.151	92,22	90,4	101,96	94,98	-0,04	-0,03
Belanja Bantuan Sosial	1.680	1.626	4.276	4.831	1.373	1.587	4.242	4.788	81,74	97,57	99,20	99,11	0,58	0,65
BELANJA MODAL	**354.753**	**360.759**	**445.071**	**449.183**	**314.407**	**338.946**	**438.037**	**469.012**	**88,63**	**93,95**	**98,42**	**104,41**	**0,09**	**0,15**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	164.206	157.191	185.551	203.098	137.984	151.790	181.438	218.096	84,03	96,56	97,78	107,38	0,08	0,17

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke -				Rasio Capaian pada Tahun ke -				Rata - rata Pertumbuhan	
	2021 (Juta)	2022 (Juta)	2023 (Juta)	2024 (Juta)	2021 (Juta)	2022 (Juta)	2023 (Juta)	2024 (Juta)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Anggaran	Realisasi
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	142.639	159.693	202.968	211.088	128.901	142.838	199.804	184.236	90,37	89,45	98,44	87,28	0,14	0,14
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	470,29	-	661,20	2,75	467,32	-	651	2,7	99,37	-	98,47	98,18		
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	47.437	43.874	55.890	34.993	47.054	44.316	56.143	66.677	99,19	101,01	100,45	190,54	-0,06	0,13
Jumlah Belanja	**2.309.651**	**2.374.598**	**2.519.251**	**2.914.402**	**2.195.228**	**2.270.833**	**2.447.790**	**2.703.598**	**95,05**	**95,63**	**97,16**	**92,77**	**0,08**	**0,07**
Total Surplus / (Defisit)	**(2.309.630)**	**(2.374.500)**	**(2.518.930)**	**(2.910.158)**	**(2.195.208)**	**(2.270.592)**	**(2.446.892)**	**(2.702.374)**	**95,05**	**95,62**	**97,14**	**92,86**	**0,08**	**0,07**

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Adapun kelompok sasaran bagi pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau diantaranya :

1. Satuan Pendidikan SMA, SMK, SLB negeri dan swasta se Provinsi Riau;
2. Peserta Didik pada Satuan Pendidikan SMA, SMK, SLB negeri dan swasta se Provinsi Riau
3. Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan SMA, SMK, SLB negeri dan swasta se Provinsi Riau
4. Aparatur Sipil Negara dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau;

2.5. Mitra Perangkat Daerah

Adapun mitra dimaksud diantaranya:

1. Badan Penjaminan Mutu Pendidikan
2. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan
3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau
4. Balai Bahasa Provinsi Riau
5. Dewan Pendidikan Provinsi Riau
6. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menegah Provinsi Riau
7. Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Riau
8. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha / CSR
9. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Riau
10. BPKAD Provinsi Riau
11. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
12. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau
14. Dinas Kesehatan Provinsi Riau
15. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau
16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau
17. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
18. Dinas Sosial Provinsi Riau
19. Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
20. Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau
21. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau

2.6. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.6.1. Indentifikasi Permasalahan terkait RPJMN dengan Urusan Pendidikan

Adapun permsalahan urusan pendidikan pada RPJMN yakni Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia. Berdasarkan Asian Productivity Organization (2024), produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US$28.600 per-pekerja, Angka tersebut masih tertinggal jauh di bawah Amerika Serikat US$149.100 per peke{a dan di bawah rata-rata kawasan Association of Southeast Asian Nations sebesar US$30.200 per pekerja. Tantangan peningkatan produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai *Programme for Intemational Student Assessmen*, siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahlun 2022. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara *The Organization for Economic Cooperation and Development* sebesar 488,33.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenoga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifrkasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruen sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2.6.2. Indentifikasi Permasalahan terkait RPJMD dengan Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Adapun permasalahan pelayanan pendidikan pada RPJMD yaitu :

1. Rendahnya Kualitas Pendidikan

   Tingkat pendidikan masyarakat di Provinsi Riau masih rendah dimana pada tahun 2024 masyarakat Riau baru menamatkan pendidikan pada angka 9,43 tahun, hal ini menunjukkan ketidaktuntasan pendidikan dasar dan menengah 13 tahun atau masih pada jenjang SMA kelas 1. Disamping itu masih terdapat ketimpangan pada Kabupaten/Kota, yaitu Kab. Indragiri Hilir, Kab. Kepulauan Meranti, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Rokan Hulu, Kab. Pelalawan masih berada pada Pendidikan dasar. Pada tahun 2024, Angka partisipasi sekolah pada umur 16-18 tahun sebesar 78,49 lebih rendah dari APS pada umur 13-15 sebesar 95,94, sehingga terdapat anak yang tidak melanjutkan atau putus sekolah di jenjang SMA/SMK/MA. Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 tahun berdasarkan status kesejahteraan penduduk khususnya di Kuintil 1 terdapat 19,36% yang tidak bersekolah. Namun hal ini juga terjadi pada penduduk dengan status kesejahteraan tertinggi yaitu di Kuntil 5 sebesar 19,60%. Sedangkan berdasarkan Angka Partisipasi Murni terdapat 35,49% lebih penduduk miskin yang tidak bersekolah di SMA/sederajat sedangkan kelompok penduduk kaya di kuintil 5 terdapat 31,15% penduduk kaya yang tidak bersekolah di SMA/sederajat. Berdasarkan data tersebut diatas perlu dilakukan peningkatan kualitas pendataan anak yang tidak sekolah dan penguatan pola asuh pendidikan keluarga. Terkait mutu Pendidikan di Provinsi Riau belum optimal, hal ini dilihat dari kemampuan angka literasi dan numerasi Provinsi Riau tahun 2024 dengan nilai 60-70 %, ,dan juga literasi Masyarakat dilihat dari Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dengan nilai 69,25 (kategori sedang), selanjutnya belum tingginya mutu pendidikan di provinsi riau juga dicerminkan oleh masih rendahnya mutu tenaga pendidik yang disebabkan oleh masih rendah guru

yang belum memenuhi kualifikasi dan sertifikasi (<40 persen), dan masih terbatasnya guru yang memiliki kompetensi didik berbasis gender. Untuk sekolah kejuruan, mutu pendidikan juga masih bermasalah dimana belum terpenuhinya standar kualitas lulusan akibat belum optimal link and match nya kurikulum pendidikan dengan dunia usaha dan lulusan yang dihasilkan belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar dunia kerja.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perumusan permasalahan perangkat daerah berupa permasalahan yang bersifatdominan disajikan sebagai berikut pada table berikut :

Tabel 2.20

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum meratanya akses pendidikan	Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan	Masih terbatasnya daya tampung pendidikan menengah dan layanan khusus
			Masih rendahnya kualitas ruang kelas
		Masih terdapat calon peserta didik/ peserta didik yang sulit menjangkau akses layanan pendidikan	Masih terbatasnya pembiayaan operasional sekolah yang dianggap memberatkan peserta didik
			Masih terdapat daerah yang secara teknis belum dapat didirikan sekolah menengah
2.	Masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan	Masih rendahnya mutu dan karakter Pendidikan dan belum terlaksananya Pendidikan inklusi	Masih rendahnya kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
			Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
			Belum optimalnya pengembangan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik
			Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas pendidikan menengah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas pendidikan khusus
		Belum Optimalnya Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan	Belum optimalnya kerjasama pendidikan kejuruan dengan Dunia Usaha Dunia Industri
			Masih rendahnya manajemen sekolah berbasis vokasi
			Masih belum terpenuhinya sarana prasarana sekolah sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri

2.7. Isu Strategis

Dalam merumuskan isu strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau disimpulkan dari permasalahan perangkat daerah, isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, dan regional) serta potensi daerag yang menjadi kewenangan perangkat daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat berkeadilan. Adapun perumusan isu strategis dapat dilihat pada kertas kerja Tabel 2.13 berikut :

Tabel 2.21
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus	Belum meratanya akses pendidikan	Kesejahteraan sosial dan sumber daya manusia belum merata	Bonus demografi	Bonus demografi	Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia	Peningkatan akses Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang merata termasuk bagi kelompok perempuan, disabilitas dan kelompok rentan lainnya
	Masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan					Peningkatan kualitas lulusan sesuai dengan kebutuhan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
						industri, dunia kerja, dan dunia usaha, termasuk dalam penyediaan lingkungan belajar yang aman, setara, dan bebas dari kekerasan berbasis gender di satuan pendidikan.
Pelesatrian Kebudayaan Melayu Riau	Belum meratanya guru seni budaya				Pelesatrian dan kearifan budaya	Peningkatan Guru Seni Budaya

Dari kertas tersebut pada table diatas dirumuskan isu strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau yaitu :

1. Peningkatan akses Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang merata termasuk bagi kelompok perempuan, disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
2. Peningkatan kualitas lulusan sesuai dengan kebutuhan industri, dunia kerja, dan dunia usaha, termasuk dalam penyediaan lingkungan belajar yang aman, setara, dan bebas dari kekerasan berbasis gender di satuan pendidikan.
3. Peningkatan Guru Seni Budaya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari dokumen perencanaan daerah yang harus selaras dan mendukung visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Visi pembangunan Provinsi Riau untuk kurun waktu 2025-2029 yaitu: **"Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju".**

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskanlah misi pembangunan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yaitu :

Misi 1 : Membangun manusia yang sehat dan berkualitas melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan serta keberpihakan pada disabilitas dan kelompok marginal

Misi 2 : Meningkatkan perekonomian, daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan

Misi 3 : Memperkuat infrastruktur yang handal, guna kemudahan akses, pelayanan masyarakat dan perekonomian serta peningkatan konektivitas antar wilayah

Misi 4 : Memerangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah serta menjaga keseimbangan dan pemerataan pembangunan

Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan berintegritas serta pelayanan publik yang berkualitas dengan dukungan aparatur yang kompeten dan profesional menuju pemerintahan yang berkelas dunia (*world class government*)

Misi 6 : Memperkuat riset dan inovasi serta kerjasama pembangunan guna akselerasi capaian pembangunan melalui *multi helix partnership*, kerjasama antar daerah maupun kerjasama global

Misi 7 : Mewujudkan kebudayaan melayu sebagai alat pemersatu dan perwujudan nilai nilai kearifan lokal serta mendorong

kehidupan bermasyarakat yang kondusif, aman, nyaman dan adil untuk semua.

Misi Gubernur Riau untuk Pendidikan adalah misi pertama yaitu membangun manusia yang sehat dan berkualitas melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan serta keberpihakan pada disabilitas dan kelompok marginal. Selanjutnya pada misi ketujuh yaitu mewujudkan kebudayaan melayu sebagai alat pemersatu dan perwujudan nilai nilai kearifan lokal serta mendorong kehidupan bermasyarakat yang kondusif, aman, nyaman dan adil untuk semua.

3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mengacu Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 penentuannya didasarkan pada :

a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
b. Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029

Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau disajikan pada Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah sebagaimana Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN											
NSPK : **-** Meningkatnya pertispasi Pendidikan menengah - Meningkatnya pertispasi Pendidikan khusus - Meningkatnya rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional **SASARAN RPJMD :** - Menguatnya Nilai - Nilai Budaya Melayu Sebagai Jati Diri Masyarakat Riau Dalam Rangka Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau - Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dan Merata		Skor Literasi Jenjang SMA (Skor)	73,30	73,90	74,50	75,10	75,70	76,30	76,90	
			Skor Literasi Jenjang SMK (Skor)	68,45	69,75	71,05	72,35	73,65	74,95	76,25	
			Skor Literasi SDLB (Skor)	72,09	73,69	75,29	76,89	78,49	80,09	81,69	
			Skor Literasi Jenjang SMPLB (Skor)	76,62	77,12	77,62	78,12	78,62	79,12	79,62	
			Skor Literasi Jenjang SMALB (Skor)	71,71	72,21	72,71	73,21	73,71	74,21	74,71	
			Skor Numerasi Jenjang SMA (Skor)	61,66	63,26	64,86	66,46	68,06	69,66	71,26	
			Skor Numerasi Jenjang SMK (Skor)	57,88	60,08	62,28	64,48	66,68	68,88	71,08	
			Skor Numerasi Jenjang SDLB (Skor)	66,49	67,09	67,69	68,29	68,89	69,49	70,09	
			Skor Numerasi Jenjang SMPLB (Skor)	73,61	73,86	74,11	74,36	74,61	74,86	75,11	
			Skor Numerasi Jenjang SMALB (Skor)	64,31	64,81	65,31	65,81	66,31	66,81	67,31	
			Rata - rata Lama Sekolah (Tahun)	9,43	9.94-9.94	10.06 - 10.06	10.18 - 10.18	10.30 - 10.31	10.42 - 10.43	10.55 - 10.56	
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,42	13.56-13.57	13.63 - 13.64	13.70 - 13.71	13.77 - 13.79	13.84 - 13.86	13.91 - 13.93	
		Meningkatnya Akses Pendidikan	APK SM Sederajat (Persentase)	92,09	92,59	93,09	93,59	94,09	94,59	95,09	
			APM SM Sederajat (Persentase)	68,17	68,47	68,77	69,07	69,37	69,67	69,97	
		Meningkatnya Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan (Indeks)	69,96	72,00	72,96	75,96	78,96	81,96	84,96	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	74,60	74,80	75,00	75,18	75,36	75,52	75,66	

3.2. Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/ sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, rumusan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rumusan Strategi Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran		Strategi	
Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dan Merata	1	Meningkatnya Akses Pendidikan	1	Membangun USB dan RKB
			2	Meningkatkan kualitas ruang kelas
			3	Penyelenggaraan layanan khusus pendidikan (Sekolah menengah terbuka)
			4	Pemberian Pakaian Seragam Gratis bagi Siswa
			5	Pemenuhan Biaya Personil (Bantuan Siswa Miskin)
	2	Meningkatnya Kualitas dan Relevansi Pendidikan	1	Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi dan berkompetensi
			2	Meningkatkan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			3	Pemenuhan operasional sekolah
			4	Pemerataan satuan Pendidikan yang menerapkan budaya Melayu Riau
			5	Meningkatkan satuan Pendidikan yang memiliki guru budaya Melayu Riau

3.3. Pentahapan

Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 disajikan seperti pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.3
Tahapan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Memperluas ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan	Pemerataan aksesibilitas layanan pendidikan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas pendidikan	Meningkatkan Mutu, Karakter dan Penerapan Pendidikan Inklusi	Perkuatan Vokasi dan Relevansi Pendidikan

3.4. Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, rumusan arah kebijakan Dinas Pendidikan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perumusan Arah
Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Menengah	- Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah) - Peningkatan akses pelayanan dasar pendidikan untuk masyarakat miskin (semua siswa miskin harus bersekolah sampai jenjang tertinggi) - Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga	- Perluasan ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan - Pemerataan aksesibilitas layanan Pendidikan - Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas Pendidikan - Peningkatan Akses Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas - Peningkatan akses pelayanan dasar pendidikan untuk	
2	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Khusus			
3	Meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan assesmen nasional			

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
		Kependidikan Berkualitas - Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan - Penguatan nilai luhur kebudayaan Melayu Riau dalam lingkungan masyarakat yang Agamis	masyarakat miskin - Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output (sebagaimana terlampir). Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan. Mengacu Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau disajikan dengan Tabel 4.1 sebaimana tabel berikut :

Tabel 4.1.
Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN							
NSPK: - Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Menengah - Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Khusus - Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan asssesmen nasional **SASARAN RPJMD YANG RELEVAN :** - Menguatnya Nilai - Nilai Budaya Melayu Sebagai Jati Diri Masyarakat Riau Dalam Rangka Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau - Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dan Merata				Skor Literasi Jenjang SMA (Skor)		
					Skor Literasi Jenjang SMK (Skor)		
					Skor Literasi SDLB (Skor)		
					Skor Literasi Jenjang SMPLB (Skor)		
					Skor Literasi Jenjang SMALB (Skor)		
					Skor Numerasi Jenjang SMA (Skor)		
					Skor Numerasi Jenjang SMK (Skor)		
					Skor Numerasi Jenjang SDLB (Skor)		
					Skor Numerasi Jenjang SMPLB (Skor)		
					Skor Numerasi Jenjang SMALB (Skor)		
					Rata - rata Lama Sekolah (Tahun)		
					Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
		Meningkatnya Akses Pendidikan			APK SM Sederajat (Persentase)		
					APM SM Sederajat (Persentase)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah		Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat (Unit)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (Orang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.01.0001 - Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.01.0010 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.01.0011 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.01.0012 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.01.0013 - Pembangunan Asrama Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.01.0014 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.1.01.0019 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.1.01.0020 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.1.01.0028 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.1.01.0029 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.01.0036 - Pengadaan Mebel Sekolah	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.01.0038 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.01.0041 - Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	1.01.02.1.01.0045 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.1.01.0049 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.1.01.0051 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.01.0052 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.01.0053 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (Orang)	1.01.02.1.01.0054 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.1.01.0057 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.1.01.0060 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.1.01.0063 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.1.01.0065 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.01.0067 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	1.01.02.1.01.0068 - Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	1.01.02.1.01.0069 - Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	
					Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.01.0070 - Pembangunan Ruang Laboratorium	
					Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.1.01.0071 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.1.01.0072 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat (Unit)	1.01.02.1.01.0073 - Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.1.01.0075 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.01.0078 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
				Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.02.0001 - Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.02.0004 - Pembangunan Ruang Praktik Siswa	
					Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.02.0005 - Pembangunan Ruang Laboratorium	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.02.0006 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.02.0007 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.02.0008 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.02.0009 - Pembangunan Asrama Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.02.0010 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.02.0012 - Pembangunan Kantin Sekolah	
					Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1.01.02.1.02.0016 - Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1.01.02.1.02.0018 - Rehabilitasi Ruang Laboratorium	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.02.0028 - Pengadaan Mebel Sekolah	
					Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.02.0030 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.02.0033 - Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	1.01.02.1.02.0037 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.1.02.0041 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	1.01.02.1.02.0043 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)		
					Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.02.0045 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.1.02.0046 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 1.01.02.1.02.0050 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.1.02.0053 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.1.02.0057 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.1.02.0059 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	1.01.02.1.02.0062 - Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1.01.02.1.02.0063 - Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.1.02.0064 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.02.0065 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1.01.02.1.02.0066 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1.01.02.1.02.0069 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	1.01.02.1.02.0071 - Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.02.0072 - Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.1.02.0073 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	1.01.02.1.02.0074 - Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1.01.02.1.02.0075 - Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	
				Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus (Orang)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus 1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat (Ruang)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.03.0013 - Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	
					Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.03.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.03.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.03.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.03.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.03.0007 - Pembangunan Asrama Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.03.0008 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.1.03.0044 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	
					Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.03.0014 - Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	
					Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.03.0015 - Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.03.0035 - Pengadaan Mebel Sekolah	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.03.0037 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.03.0040 - Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.1.03.0048 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus (Orang)	1.01.02.1.03.0049 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.1.03.0050 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.03.0051 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	
					Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.03.0052 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.1.03.0059 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.1.03.0066 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.1.03.0069 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.1.03.0070 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.03.0071 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.1.03.0073 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.1.03.0076 - Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat (Ruang)	1.01.02.1.03.0079 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan		Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
					Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
					Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal Budaya Melayu Riau (%)	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai Dasar Pelaksanaan Pendistribusian	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dokumen)	1.01.04.1.01 - Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Laporan)	1.01.04.1.01 - Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dokumen)	1.01.04.1.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Laporan)	1.01.04.1.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan		Persentase satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang mengajukan perizinan terlayani (Persentase)	1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
				Terlaksananya Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.1.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.1.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.1.01.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.1.01.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
				Terlaksananya Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.1.02 - Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.1.02 - Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.1.02.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan	1.01.05.1.02.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	Diselenggarakan oleh Masyarakat	
		Meningkatnya Kualitas dan Relevansi Pendidikan			Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan (Indeks)		
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah		Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat (Unit)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (Orang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.01.0001 - Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.01.02.1.01.0010 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					yang Telah Dibangun (Ruang)		
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.01.0011 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.01.0012 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.01.0013 - Pembangunan Asrama Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.01.0014 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.1.01.0019 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.1.01.0020 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.1.01.0028 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.1.01.0029 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.01.0036 - Pengadaan Mebel Sekolah	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.01.0038 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.01.0041 - Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	1.01.02.1.01.0045 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.1.01.0049 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.01.0051 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1.01.02.1.01.0052 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.01.0053 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (Orang)	1.01.02.1.01.0054 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.1.01.0057 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.1.01.0060 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.1.01.0063 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.1.01.0065 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.01.0067 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.01.0067 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	1.01.02.1.01.0068 - Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	1.01.02.1.01.0069 - Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	
					Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.01.0070 - Pembangunan Ruang Laboratorium	
					Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.1.01.0071 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.1.01.0072 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat (Unit)	1.01.02.1.01.0073 - Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.1.01.0075 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.01.0078 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
				Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.02.0001 - Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.02.0004 - Pembangunan Ruang Praktik Siswa	
					Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.02.0005 - Pembangunan Ruang Laboratorium	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.02.0006 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.02.0007 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.02.0008 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.02.0009 - Pembangunan Asrama Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.02.0010 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.02.0012 - Pembangunan Kantin Sekolah	
					Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1.01.02.1.02.0016 - Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1.01.02.1.02.0018 - Rehabilitasi Ruang Laboratorium	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.02.0028 - Pengadaan Mebel Sekolah	
					Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.02.0030 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.02.0033 - Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	1.01.02.1.02.0037 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.1.02.0041 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.1.02.0043 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.02.0045 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.02.0046 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.1.02.0050 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.1.02.0053 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.1.02.0057 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.1.02.0059 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	1.01.02.1.02.0062 - Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1.01.02.1.02.0063 - Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.1.02.0064 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.02.0065 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1.01.02.1.02.0066 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1.01.02.1.02.0069 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	1.01.02.1.02.0071 - Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.02.0072 - Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.1.02.0073 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	1.01.02.1.02.0074 - Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1.01.02.1.02.0075 - Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus (Orang)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat (Ruang)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.03.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.03.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.03.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.03.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.03.0007 - Pembangunan Asrama Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.03.0008 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.03.0013 - Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	
					Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.03.0014 - Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	
					Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.03.0015 - Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.03.0035 - Pengadaan Mebel Sekolah	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.03.0037 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.03.0040 - Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
					Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.1.03.0044 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.1.03.0048 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus (Orang)	1.01.02.1.03.0049 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.1.03.0050 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.03.0051 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	
					Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.03.0052 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.1.03.0059 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.1.03.0066 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.1.03.0069 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.1.03.0070 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.03.0071 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.1.03.0073 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.1.03.0076 - Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat (Ruang)	1.01.02.1.03.0079 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan		Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau (%)	1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
				Terselenggaranya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya (Orang)	1.01.03.1.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya (Orang)	1.01.03.1.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan		Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
					Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
					Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal Budaya Melayu Riau (%)	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Terlaksananya Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai Dasar Pelaksanaan Pendistribusian	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dokumen)	1.01.04.1.01 - Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Laporan)	1.01.04.1.01 - Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dokumen)	1.01.04.1.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Laporan)	1.01.04.1.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)		
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.01.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.01.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.01.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemenuhan Layanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.01.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.01.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

Selanjutnya hasil rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dituangkan mengacu pada Permendagri berserta pemutakhirannya yang mengatur nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 pada Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- Jumlah Program sebanyak 5 (lima) terdiri dari 1 (satu) Program Penunjang Urusan dan 4 (empat) Program Urusan
- Jumlah Kegiatan sebanyak 15 kegiatan
- Jumlah Sub Kegiatan sebanyak 116 sub kegiatan

Adapun Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Mencapai Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 mengacu pada tabel 4.3. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				2.745.574.350.653		2.752.518.431.797		2.806.478.641.148		2.861.756.665.548		2.910.991.639.260		
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.779.597.886.418		1.787.369.893.083		1.818.946.687.251		1.851.167.764.640		1.883.649.196.935		
Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	1.779.597.886.418	100	1.787.369.893.083	100	1.818.946.687.251	100	1.851.167.764.640	100	1.883.649.196.935	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.880.768.362		4.637.000.000		4.637.000.000		4.637.000.000		4.637.000.000		
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	4	7.880.768.362	4	4.637.000.000	4	4.637.000.000	4	4.637.000.000	4	4.637.000.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	3	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Daerah (Dokumen)													
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	0		1		1		1		1			
1.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.167.000.000		2.167.000.000		2.167.000.000		2.167.000.000		2.167.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	2.167.000.000	3	2.167.000.000	3	2.167.000.000	3	2.167.000.000	3	2.167.000.000		
1.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.683.091.347		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	5	4	3.683.091.347	4	2.000.000.000	4	2.000.000.000	4	2.000.000.000	4	2.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Daerah (Laporan)													
1.01.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				2.030.677.015		470.000.000		470.000.000		470.000.000		470.000.000		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	0	2.030.677.015	1	470.000.000	1	470.000.000	1	470.000.000	1	470.000.000		
1.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.747.814.879.471		1.758.589.084.472		1.790.165.057.926		1.822.386.135.315		1.854.867.567.610		
Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	14.890	17.990	1.747.814.879.471	17.990	1.758.589.084.472	17.990	1.790.165.057.926	17.990	1.822.386.135.315	17.990	1.854.867.567.610		
1.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.747.814.879.471		1.758.589.084.472		1.790.165.057.926		1.822.386.135.315		1.854.867.567.610		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	14.890	17.990	1.747.814.879.471	17.990	1.758.589.084.472	17.990	1.790.165.057.926	17.990	1.822.386.135.315	17.990	1.854.867.567.610		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				121.028.126		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	121.028.126	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
1.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				121.028.126		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	121.028.126	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
1.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.684.900.039		4.702.500.000		4.703.356.550		4.703.356.550		4.703.356.550		
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	17	17	4.684.900.039	17	4.702.500.000	17	4.703.356.550	17	4.703.356.550	17	4.703.356.550		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	54	54		54		54		54		54			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	460	510		510		510		510		510			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8.754	1.300		1.300		1.300		1.300		1.300			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	9		9		9		9		9			
1.01.01.1.06.0001 - Penyediaan				89.246.065		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	9	89.246.065	9	100.000.000	9	100.000.000	9	100.000.000	9	100.000.000		
1.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				800.777.663		802.000.000		801.778.678		801.778.678		801.778.678		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	54	54	800.777.663	54	802.000.000	54	801.778.678	54	801.778.678	54	801.778.678		
1.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				513.752.000		513.500.000		513.994.000		513.994.000		513.994.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8.754	1.300	513.752.000	1.300	513.500.000	1.300	513.994.000	1.300	513.994.000	1.300	513.994.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				812.594.311		777.000.000		777.313.872		777.313.872		777.313.872		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	17	17	812.594.311	17	777.000.000	17	777.313.872	17	777.313.872	17	777.313.872		
1.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.468.530.000		2.510.000.000		2.510.270.000		2.510.270.000		2.510.270.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	460	510	2.468.530.000	510	2.510.000.000	510	2.510.270.000	510	2.510.270.000	510	2.510.270.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.001.454.400		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	29	29	1.001.454.400	29	1.000.000.000	29	1.000.000.000	29	1.000.000.000	29	1.000.000.000		
1.01.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.001.454.400		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	29	29	1.001.454.400	29	1.000.000.000	29	1.000.000.000	29	1.000.000.000	29	1.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.827.381.880		12.930.363.292		12.930.327.456		12.930.327.456		12.930.327.456		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12.827.381.880	12	12.930.363.292	12	12.930.327.456	12	12.930.327.456	12	12.930.327.456		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	220		220		220		220		220			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3.077.017.168		3.179.998.580		3.179.962.744		3.179.962.744		3.179.962.744		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	3.077.017.168	12	3.179.998.580	12	3.179.962.744	12	3.179.962.744	12	3.179.962.744		
1.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				9.750.364.712		9.750.364.712		9.750.364.712		9.750.364.712		9.750.364.712		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	220	9.750.364.712	220	9.750.364.712	220	9.750.364.712	220	9.750.364.712	220	9.750.364.712		
1.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.124.816.737		2.218.287.916		2.218.287.916		2.218.287.916		2.218.287.916		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	45	45	2.124.816.737	45	2.218.287.916	45	2.218.287.916	45	2.218.287.916	45	2.218.287.916		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	17	17		17		17		17		17			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	17	17		17		17		17		17			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15	15		15		15		15		15			
1.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				268.360.000		290.000.000		290.000.000		290.000.000		290.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	17	17	268.360.000	17	290.000.000	17	290.000.000	17	290.000.000	17	290.000.000		
1.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				392.970.504		383.647.916		383.647.916		383.647.916		383.647.916		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	17	17	392.970.504	17	383.647.916	17	383.647.916	17	383.647.916	17	383.647.916		
1.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				324.330.000		330.000.000		330.000.000		330.000.000		330.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	45	45	324.330.000	45	330.000.000	45	330.000.000	45	330.000.000	45	330.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.139.156.233		1.214.640.000		1.214.640.000		1.214.640.000		1.214.640.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15	15	1.139.156.233	15	1.214.640.000	15	1.214.640.000	15	1.214.640.000	15	1.214.640.000		
1.01.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				3.142.657.403		3.142.657.403		3.142.657.403		3.142.657.403		3.142.657.403		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pemenuhan Layanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	21	21	3.142.657.403	21	3.142.657.403	21	3.142.657.403	21	3.142.657.403	21	3.142.657.403		
1.01.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				3.142.657.403		3.142.657.403		3.142.657.403		3.142.657.403		3.142.657.403		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	21	21	3.142.657.403	21	3.142.657.403	21	3.142.657.403	21	3.142.657.403	21	3.142.657.403		
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				951.087.408.993		948.625.544.205		970.258.964.452		992.543.348.681		1.008.735.533.795		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) (%)		79,77	951.087.408.993	80,41	948.625.544.205	81,06	970.258.964.452	81,70	992.543.348.681	82,34	1.008.735.533.795	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN	
	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (%)	56,75	74,05		75,14		76,23		77,32		78,41			
1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				573.444.724.647		575.048.247.187		584.350.294.791		598.158.677.152		612.126.353.047		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	2	1	573.444.724.647	1	575.048.247.187	1	584.350.294.791	1	598.158.677.152	1	612.126.353.047		
	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (Orang)	461	446		446		446		446		446			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.164	1.196		285		285		285		285			
	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	450	446		446		446		446		446			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	459	459		459		459		459		459			
	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1	1		1		1		1		2			
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	459	459		459		459		459		459			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	105	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat (Unit)	1	1		1		1		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	6	1		1		1		2		2			
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	13	1		1		1		2		2			
	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3	1		1		1		1		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	4	0		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	29	1		1		2		6		8			
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	11	5		1		4		16		20			
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	99	1		2		6		8		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3	5		1		1		2		4			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	13	1		1		1		2		2			
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	150	4.500		4.500		4.500		4.500		4.500			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	40		40		50		60		70			
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	4	1		1		1		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	1		1		1		2		2			
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	19	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	4.873	335		246		246		246		246			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	80		80		80		80		80			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	162	14		6		10		20		20			
	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3	1		1		3		6		8			
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	2		1		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	24		24		24		24		24			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	250	3		3		3		3		3			
1.01.02.1.01.0001 - Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)				6.000.000.000		7.816.025.686		8.059.329.082		8.197.124.054		16.414.248.108		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1	1	6.000.000.000	1	7.816.025.686	1	8.059.329.082	1	8.197.124.054	2	16.414.248.108		
1.01.02.1.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				587.000.000		587.000.000		587.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	13	1	587.000.000	1	587.000.000	1	587.000.000	2	1.200.000.000	2	1.200.000.000		
1.01.02.1.01.0010 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				490.500.000		490.500.000		490.500.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	13	1	490.500.000	1	490.500.000	1	490.500.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01.02.1.01.0011 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah				490.500.000		490.500.000		490.500.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	4	1	490.500.000	1	490.500.000	1	490.500.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000		
1.01.02.1.01.0012 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula				0		500.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	4	0	0	1	500.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000		
1.01.02.1.01.0013 - Pembangunan Asrama Sekolah				1.299.700.000		1.299.700.000		1.299.700.000		1.299.700.000		1.300.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1	1	1.299.700.000	1	1.299.700.000	1	1.299.700.000	1	1.299.700.000	1	1.300.000.000		
1.01.02.1.01.0014 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				197.000.000		197.000.000		197.000.000		197.000.000		200.000.000		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	105	1	197.000.000	1	197.000.000	1	197.000.000	1	197.000.000	1	200.000.000		
1.01.02.1.01.0019 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				988.422.250		997.000.000		2.800.000.000		7.509.153.614		8.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	11	5	988.422.250	1	997.000.000	4	2.800.000.000	16	7.509.153.614	20	8.000.000.000		
1.01.02.1.01.0020 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				986.552.250		995.000.000		1.995.000.000		2.400.000.000		2.800.000.000		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3	5	986.552.250	1	995.000.000	1	1.995.000.000	2	2.400.000.000	4	2.800.000.000		
1.01.02.1.01.0028 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				200.000.000		200.000.000		200.000.000		400.000.000		400.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000		
1.01.02.1.01.0029 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula				395.000.000		395.000.000		395.000.000		395.000.000		560.000.000		
Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3	1	395.000.000	1	395.000.000	1	395.000.000	1	395.000.000	2	560.000.000		
1.01.02.1.01.0036 - Pengadaan Mebel Sekolah				990.000.000		540.000.000		1.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	162	14	990.000.000	6	540.000.000	10	1.000.000.000	20	2.000.000.000	20	2.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01.02.1.01.0038 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				95.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	19	1	95.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
1.01.02.1.01.0041 - Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				746.000.000		746.000.000		746.000.000		746.000.000		746.000.000		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	250	3	746.000.000	3	746.000.000	3	746.000.000	3	746.000.000	3	746.000.000		
1.01.02.1.01.0045 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas				221.444.800.000		223.444.800.000		223.444.800.000		223.444.800.000		223.444.800.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	150	4.500	221.444.800.000	4.500	223.444.800.000	4.500	223.444.800.000	4.500	223.444.800.000	4.500	223.444.800.000		
1.01.02.1.01.0049 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				2.649.331.363		2.668.902.183		3.167.682.401		3.254.450.641		3.300.036.206		
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.164	1.196	2.649.331.363	285	2.668.902.183	285	3.167.682.401	285	3.254.450.641	285	3.300.036.206		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01.02.1.01.0051 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				2.997.053.950		2.997.053.950		2.997.053.950		2.997.053.950		2.997.053.950		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	4.873	335	2.997.053.950	246	2.997.053.950	246	2.997.053.950	246	2.997.053.950	246	2.997.053.950		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01.02.1.01.0052 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				1.405.931.000		1.410.850.000		1.430.335.000		1.451.768.500		1.462.864.321		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	459	459	1.405.931.000	459	1.410.850.000	459	1.430.335.000	459	1.451.768.500	459	1.462.864.321		
1.01.02.1.01.0053 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				284.189.074.000		284.189.074.000		284.189.074.000		284.189.074.000		284.189.074.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	450	446	284.189.074.000	446	284.189.074.000	446	284.189.074.000	446	284.189.074.000	446	284.189.074.000		
1.01.02.1.01.0054 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				1.200.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (Orang)	461	446	1.200.000.000	446	800.000.000	446	800.000.000	446	800.000.000	446	800.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01.02.1.01.0057 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				20.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	80	20.000.000	80	30.000.000	80	50.000.000	80	50.000.000	80	50.000.000		
1.01.02.1.01.0060 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				20.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	0	1	20.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.01.02.1.01.0063 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				80.000.000		87.641.043		160.000.000		160.000.000		160.000.000		
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	1	80.000.000	1	87.641.043	2	160.000.000	2	160.000.000	2	160.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01.02.1.01.0065 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				20.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	24	20.000.000	24	30.000.000	24	50.000.000	24	50.000.000	24	50.000.000		
1.01.02.1.01.0067 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah				489.000.000		489.000.000		489.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	6	1	489.000.000	1	489.000.000	1	489.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000		
1.01.02.1.01.0068 - Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		284.852.748		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	2	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	284.852.748		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01.02.1.01.0069 - Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah		2	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000		
Asrama Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)			786.000.000		786.000.000		1.700.000.000		4.716.000.000		6.288.000.000		
1.01.02.1.01.0070 - Pembangunan Ruang Laboratorium		29	1	786.000.000	1	786.000.000	2	1.700.000.000	6	4.716.000.000	8	6.288.000.000		
Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)			1.191.372.250		1.211.200.325		2.092.320.358		3.381.552.393		4.229.423.714		
1.01.02.1.01.0071 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium		2	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3	1	1.191.372.250	1	1.211.200.325	3	2.092.320.358	6	3.381.552.393	8	4.229.423.714		
1.01.02.1.01.0072 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				2.917.087.584		950.000.000		3.500.000.000		4.000.000.000		5.000.000.000		
Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	99	1	2.917.087.584	2	950.000.000	6	3.500.000.000	8	4.000.000.000	10	5.000.000.000		
1.01.02.1.01.0073 - Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah				199.400.000		200.000.000		200.000.000		400.000.000		400.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat (Unit)	1	1	199.400.000	1	200.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000		
1.01.02.1.01.0075 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				200.000.000		200.000.000		500.000.000		600.000.000		700.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	40	200.000.000	40	200.000.000	50	500.000.000	60	600.000.000	70	700.000.000		
1.01.02.1.01.0078 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				38.970.000.000		38.970.000.000		38.970.000.000		38.970.000.000		40.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	459	459	38.970.000.000	459	38.970.000.000	459	38.970.000.000	459	38.970.000.000	459	40.000.000.000		
1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				340.136.392.714		337.346.367.018		344.794.739.661		353.160.741.529		354.784.250.748		
Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1	0	340.136.392.714	1	337.346.367.018	1	344.794.739.661	1	353.160.741.529	1	354.784.250.748		
	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	0		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	0		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	24		24		24		24		24			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	2.017	66		66		66		66		66			
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	2		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	52	122		10		15		15		15			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	20		20		20		20		20			
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	71	1		1		1		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	336	132		132		132		132		132			
	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	300	298		298		298		298		298			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	2.017	311		311		311		311		311			
	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	300	3		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	31	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	2	0		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	7	0		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun (Ruang)	13	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	0	1		1		2		2		2			
	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	60	0		1		1		2		2			
	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	8	0		1		2		2		2			
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	4	7		1		4		6		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	18	6		1		2		5		5			
	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1	4		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	3	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	0	3.512		3.512		3.512		3.512		3.512			
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	200		44		50		60		70			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1	0		1		1		1		1			
1.01.02.1.02.0001 - Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)				100.355.000		7.949.336.629		8.558.746.768		12.000.000.000		12.000.000.000		
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1	1	100.355.000	1	7.949.336.629	1	8.558.746.768	1	12.000.000.000	1	12.000.000.000		
1.01.02.1.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				1.108.827.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	3	1	1.108.827.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000		
1.01.02.1.02.0004 - Pembangunan Ruang Praktik Siswa				2.110.557.000		2.110.557.000		2.110.557.000		2.110.557.000		2.321.612.700		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun (Ruang)	13	1	2.110.557.000	1	2.110.557.000	1	2.110.557.000	1	2.110.557.000	1	2.321.612.700		
1.01.02.1.02.0005 - Pembangunan Ruang Laboratorium				0		786.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		
Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	8	0	0	1	786.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000		
1.01.02.1.02.0006 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	7	0	0	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01.02.1.02.0007 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah				0		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1	0	0	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000		
1.01.02.1.02.0008 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula				0		500.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	0	0	0	1	500.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000		
1.01.02.1.02.0009 - Pembangunan Asrama Sekolah				2.355.259.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	2	1	2.355.259.000	1	1.100.000.000	1	1.100.000.000	1	1.100.000.000	1	1.100.000.000		
1.01.02.1.02.0010 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				2.014.704.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	31	1	2.014.704.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
1.01.02.1.02.0012 - Pembangunan Kantin Sekolah				0		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
1.01.02.1.02.0016 - Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				790.578.300		1.000.000.000		2.000.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1	4	790.578.300	1	1.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.200.000.000	1	2.200.000.000		
1.01.02.1.02.0018 - Rehabilitasi Ruang Laboratorium				790.552.250		1.200.000.000		2.200.000.000		2.800.000.000		2.800.000.000		
Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	60	0	790.552.250	1	1.200.000.000	1	2.200.000.000	2	2.800.000.000	2	2.800.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01.02.1.02.0028 - Pengadaan Mebel Sekolah				2.549.170.000		1.000.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	52	122	2.549.170.000	10	1.000.000.000	15	1.500.000.000	15	1.500.000.000	15	1.500.000.000		
1.01.02.1.02.0030 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		110.000.000		
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000		
1.01.02.1.02.0033 - Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				1.215.510.000		1.215.510.000		1.215.510.000		2.500.000.000		2.500.000.000		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	71	1	1.215.510.000	1	1.215.510.000	1	1.215.510.000	2	2.500.000.000	2	2.500.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01.02.1.02.0037 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				120.976.500.000		120.976.500.000		120.976.500.000		120.976.500.000		120.976.500.000		
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	0	3.512	120.976.500.000	3.512	120.976.500.000	3.512	120.976.500.000	3.512	120.976.500.000	3.512	120.976.500.000		
1.01.02.1.02.0041 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1.752.012.704		1.757.012.704		2.332.713.974		2.415.985.372		2.460.614.836		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	336	132	1.757.012.704	132	1.757.012.704	132	2.332.713.974	132	2.415.985.372	132	2.460.614.836		
1.01.02.1.02.0043 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				300.000.000		330.000.000		330.000.000		330.000.000		330.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	2.017	66	300.000.000	66	330.000.000	66	330.000.000	66	330.000.000	66	330.000.000		
1.01.02.1.02.0045 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				686.669.000		686.669.000		705.335.900		725.869.490		736.544.594		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	2.017	311	686.669.000	311	686.669.000	311	705.335.900	311	725.869.490	311	736.544.594		
1.01.02.1.02.0046 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				171.404.610.000		171.404.610.000		171.404.610.000		171.404.610.000		171.404.610.000		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	300	298	171.404.610.000	298	171.404.610.000	298	171.404.610.000	298	171.404.610.000	298	171.404.610.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01.02.1.02.0050 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				20.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	20	20.000.000	20	30.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000		
1.01.02.1.02.0053 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				20.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	0	1	20.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
1.01.02.1.02.0057 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				80.000.000		77.999.891		160.000.000		160.000.000		160.000.000		
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	2	80.000.000	1	77.999.891	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01.02.1.02.0059 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				20.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	24	20.000.000	24	30.000.000	24	50.000.000	24	50.000.000	24	50.000.000		
1.01.02.1.02.0062 - Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				304.526.250		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	2	1	304.526.250	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
1.01.02.1.02.0063 - Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik				498.097.198		500.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Ruang Praktik Peserta Didik yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	0	1	498.097.198	1	500.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000		
1.01.02.1.02.0064 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				4.396.014.000		650.000.000		1.300.000.000		3.250.000.000		3.250.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	18	6	4.396.014.000	1	650.000.000	2	1.300.000.000	5	3.250.000.000	5	3.250.000.000		
1.01.02.1.02.0065 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah				0		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	2	0	0	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000		
1.01.02.1.02.0066 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula				0		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	0	0	0	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000		
1.01.02.1.02.0069 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				5.945.444.918		1.085.942.250		2.064.536.475		2.750.990.123		3.998.139.074		
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	4	7	5.945.444.918	1	1.085.942.250	4	2.064.536.475	6	2.750.990.123	10	3.998.139.074		
1.01.02.1.02.0071 - Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah				500.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Asrama Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	2	1	500.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000		
1.01.02.1.02.0072 - Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik				18.206.229.544		18.206.229.544		18.206.229.544		18.206.229.544		18.206.229.544		
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	300	3	18.206.229.544	3	18.206.229.544	3	18.206.229.544	3	18.206.229.544	3	18.206.229.544		
1.01.02.1.02.0073 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				200.000.000		220.000.000		500.000.000		600.000.000		700.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	200	200.000.000	44	220.000.000	50	500.000.000	60	600.000.000	70	700.000.000		
1.01.02.1.02.0074 - Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah				1.790.776.550		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	1	1	1.790.776.550	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
1.01.02.1.02.0075 - Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah				0		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus				37.506.291.632		36.230.930.000		41.113.930.000		41.223.930.000		41.824.930.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.834	120	37.506.291.632	75	36.230.930.000	75	41.113.930.000	75	41.223.930.000	75	41.824.930.000		
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	695	470		470		470		470		470			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	47	47		47		47		47		47			
	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	47	49		49		49		49		49			
	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	47	47		47		47		47		47			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	8	1		2		4		4		4			
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun (Ruang)	2	0		0		2		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat (Ruang)	9	1		1		1		1		4			
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah (Ruang)	7	1		1		2		2		2			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun (Ruang)	1	0		0		2		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun (Ruang)	4	0		0		2		3		3			
	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0	998		1.098		1.098		1.098		1.098			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	100		44		50		55		55			
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	7	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus (Orang)	0	100		100		100		100		100			
	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	29	6		6		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	24		24		24		24		24			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	2	1		1		3		3		3			
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1	1		1		1		1		1			
1.01.02.1.03.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				4.996.940.000		5.500.000.000		5.500.000.000		5.500.000.000		5.500.000.0000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	0	1	4.996.940.000	1	5.500.000.000	1	5.500.000.000	1	5.500.000.000	1	5.500.000.000		
1.01.02.1.03.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				397.820.000		397.820.000		397.820.000		397.820.000		397.820.000		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	2	1	397.820.000	1	397.820.000	1	397.820.000	1	397.820.000	1	397.820.000		
1.01.02.1.03.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				397.850.000		397.850.000		397.850.000		397.850.000		397.850.000		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2	1	397.850.000	1	397.850.000	1	397.850.000	1	397.850.000	1	397.850.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01.02.1.03.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah				398.320.000		398.320.000		398.320.000		398.320.000		398.320.000		
Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1	1	398.320.000	1	398.320.000	1	398.320.000	1	398.320.000	1	398.320.000		
1.01.02.1.03.0007 - Pembangunan Asrama Sekolah				796.570.000		796.570.000		2.389.710.000		2.389.710.000		2.389.710.000		
Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	2	1	796.570.000	1	796.570.000	3	2.389.710.000	3	2.389.710.000	3	2.389.710.000		
1.01.02.1.03.0008 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				199.520.000		400.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	8	1	199.520.000	2	400.000.000	4	800.000.000	4	800.000.000	4	800.000.000		
1.01.02.1.03.0013 - Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas				0		0		450.000.000		660.000.000		660.000.000		
Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Terbangun	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun (Ruang)	2	0	0	0	0	2	450.000.000	3	660.000.000	3	660.000.000		
1.01.02.1.03.0014 - Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)				0		0		450.000.000		480.000.000		480.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Terbangun	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun (Ruang)	1	0	0	0	0	2	450.000.000	3	480.000.000	3	480.000.000		
1.01.02.1.03.0015 - Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)				0		0		660.000.000		480.000.000		480.000.000		
Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Terbangun	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun (Ruang)	4	0	0	0	0	2	660.000.000	3	480.000.000	3	480.000.000		
1.01.02.1.03.0035 - Pengadaan Mebel Sekolah				498.900.000		498.900.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	29	6	498.900.000	6	498.900.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000		
1.01.02.1.03.0037 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				49.700.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	7	1	49.700.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.01.02.1.03.0040 - Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				298.420.000		298.420.000		298.420.000		298.420.000		298.420.000		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1	1	298.420.000	1	298.420.000	1	298.420.000	1	298.420.000	1	298.420.000		
1.01.02.1.03.0044 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus				6.751.680.000		4.751.680.000		4.751.680.000		4.751.680.000		4.751.680.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0	998	6.751.680.000	1.098	4.751.680.000	1.098	4.751.680.000	1.098	4.751.680.000	1.098	4.751.680.000		
1.01.02.1.03.0048 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				693.100.000		693.100.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	695	470	693.100.000	471	693.100.000	471	800.000.000	471	800.000.000	471	800.000.000		
1.01.02.1.03.0049 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus (Orang)	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
1.01.02.1.03.0050 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus				350.000.000		375.000.000		375.000.000		375.000.000		375.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.834	70	350.000.000	75	375.000.000	75	375.000.000	75	375.000.000	75	375.000.000		
1.01.02.1.03.0051 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				492.641.632		495.000.000		495.000.000		495.000.000		495.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	47	49	492.641.632	49	495.000.000	49	495.000.000	49	495.000.000	49	495.000.000		
1.01.02.1.03.0052 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				15.630.130.000		15.630.130.000		15.630.130.000		15.630.130.000		15.630.130.000		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	47	47	15.630.130.000	47	15.630.130.000	47	15.630.130.000	47	15.630.130.000	47	15.630.130.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01.02.1.03.0059 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				16.560.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	16.560.000	1	30.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.01.02.1.03.0066 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				20.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	24	20.000.000	24	30.000.000	24	50.000.000	24	50.000.000	24	50.000.000		
1.01.02.1.03.0069 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				199.000.000		199.000.000		199.000.000		199.000.000		199.000.000		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1	1	199.000.000	1	199.000.000	1	199.000.000	1	199.000.000	1	199.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01.02.1.03.0070 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				598.140.000		598.140.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		
Ruang Kelas Sekolah Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah (Ruang)	7	1	598.140.000	1	598.140.000	2	1.200.000.000	2	1.200.000.000	2	1.200.000.000		
1.01.02.1.03.0071 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				3.823.000.000		3.773.000.000		3.773.000.000		3.773.000.000		3.773.000.000		
Terselenggaranya Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	47	47	3.823.000.000	47	3.773.000.000	47	3.773.000.000	47	3.773.000.000	47	3.773.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01.02.1.03.0073 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				200.000.000		220.000.000		300.000.000		350.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	40	200.000.000	44	220.000.000	50	300.000.000	55	350.000.000	55	350.000.000		
1.01.02.1.03.0076 - Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah				399.000.000		399.000.000		399.000.000		399.000.000		399.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Asrama Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1	1	399.000.000	1	399.000.000	1	399.000.000	1	399.000.000	1	399.000.000		
1.01.02.1.03.0079 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				199.000.000		199.000.000		199.000.000		199.000.000		800.000.000		
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabiltasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat (Ruang)	9	1	199.000.000	1	199.000.000	1	199.000.000	1	199.000.000	4	800.000.000		
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				149.999.757		148.677.215		155.425.820		162.377.495		167.428.691		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau (%)	90	90,50	149.999.757	91	148.677.215	91,5	155.425.820	92	162.377.495	92,5	167.428.691	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN	
1.01.03.1.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah				149.999.757		148.677.215		155.425.820		162.377.495		167.428.691		
Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya (Orang)	120	120	149.999.757	120	148.677.215	120	155.425.820	120	162.377.495	120	167.428.691		
1.01.03.1.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah				149.999.757		148.677.215		155.425.820		162.377.495		167.428.691		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya (Orang)	120	120	149.999.757	120	148.677.215	120	155.425.820	120	162.377.495	120	167.428.691		
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				14.739.055.485		16.294.317.294		17.032.563.625		17.793.174.732		18.344.479.839		
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	0	0,45 - 0,46	14.739.055.485	0,46 - 0,47	16.294.317.294	0,47 - 0,48	17.032.563.625	0,48 - 0,49	17.793.174.732	0,49 - 0,50	18.344.479.839	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN	
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	52,96	58,96		61,96		64,96		67,96		70,96			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal Budaya Melayu Riau (%)	66,05	67,05		67,55		68,05		65,55		69,05			
1.01.04.1.01 - Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi				14.739.055.485		16.294.317.294		17.032.563.625		17.793.174.732		18.344.479.839		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terpenuhinya kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Laporan)	1	1	14.739.055.485	1	16.294.317.294	1	17.032.563.625	1	17.793.174.732	1	18.344.479.839		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.01.04.1.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000		29.282.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	1	29.282.000		
1.01.04.1.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				14.719.055.485		16.272.317.294		17.008.363.625		17.766.554.732		18.315.197.839		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Laporan)	1	1	14.719.055.485	1	16.272.317.294	1	17.008.363.625	1	17.766.554.732	1	18.315.197.839		
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				0,00		80.000.000		85.000.000		90.000.000		95.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang mengajukan perizinan terlayani (Persentase)	100	100	0	100	80.000.000	100	85.000.000	100	90.000.000	100	95.000.000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN	
1.01.05.1.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				0		40.000.000		42.500.000		45.000.000		47.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat mendapatkan pertimbangan teknis perizinan	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	40	1	0	1	40.000.000	1	42.500.000	1	45.000.000	1	47.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	40	0		1		1		1		1			
1.01.05.1.01.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				0		20.000.000		20.000.000		22.000.000		23.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	40	1	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	22.000.000	1	23.000.000		
1.01.05.1.01.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				0		20.000.000		22.500.000		23.000.000		24.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	40	0	0	1	20.000.000	1	22.500.000	1	23.000.000	1	24.500.000		
1.01.05.1.02 - Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				0		40.000.000		42.500.000		45.000.000		47.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Satuan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat mendapatkan pertimbangan teknis perizinan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	10	0	0	1	40.000.000	1	42.500.000	1	45.000.000	1	47.500.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	10	0		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01.05.1.02.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				0		20.000.000		20.000.000		22.000.000		23.000.000		
Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	10	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	22.000.000	1	23.000.000		
1.01.05.1.02.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				0		20.000.000		22.500.000		23.000.000		24.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	10	0	0	1	20.000.000	1	22.500.000	1	23.000.000	1	24.500.000		

Adapun Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah disajikan pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN				
1.	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
			1.01.02.1.01.0001 - Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	
			1.01.02.1.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			1.01.02.1.01.0010 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
			1.01.02.1.01.0011 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
			1.01.02.1.01.0012 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	
			1.01.02.1.01.0013 - Pembangunan Asrama Sekolah	
			1.01.02.1.01.0014 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Penjangkauan anak Disabilitas yang masuk ke sekolah regular
			1.01.02.1.01.0019 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			1.01.02.1.01.0020 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			1.01.02.1.01.0028 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
			1.01.02.1.01.0029 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	
			1.01.02.1.01.0036 - Pengadaan Mebel Sekolah	
			1.01.02.1.01.0038 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
			1.01.02.1.01.0041 - Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
			1.01.02.1.01.0045 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	1. Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Untuk Pengurangan Beban Masyarakat 2.Bosda Arfimasi, dan Bantuan Perlatan Pendidikan seperti baju seragam gratis 3.Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik Miskin 4.ARG
			1.01.02.1.01.0049 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	ARG

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			1.01.02.1.01.0051 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	ARG
			1.01.02.1.01.0052 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	
			1.01.02.1.01.0053 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	1. Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Untuk Pengurangan Beban Masyarakat
			1.01.02.1.01.0054 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	
			1.01.02.1.01.0057 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
			1.01.02.1.01.0060 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.1.01.0063 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			1.01.02.1.01.0065 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	ARG
			1.01.02.1.01.0067 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
			1.01.02.1.01.0068 - Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.1.01.0069 - Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	
			1.01.02.1.01.0070 - Pembangunan Ruang Laboratorium	
			1.01.02.1.01.0071 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	
			1.01.02.1.01.0072 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Untuk Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan 2.Penyedian akses sarana pendidikan bagi masyarakat miskin 3.Penjangkauan anak Disabilitas yang masuk ke sekolah regular
			1.01.02.1.01.0073 - Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			1.01.02.1.01.0075 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	ARG
			1.01.02.1.01.0078 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
			1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
			1.01.02.1.02.0001 - Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	
			1.01.02.1.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			1.01.02.1.02.0004 - Pembangunan Ruang Praktik Siswa	
			1.01.02.1.02.0005 - Pembangunan Ruang Laboratorium	
			1.01.02.1.02.0006 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
			1.01.02.1.02.0007 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
			1.01.02.1.02.0008 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	
			1.01.02.1.02.0009 - Pembangunan Asrama Sekolah	
			1.01.02.1.02.0010 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Penjangkauan anak Disabilitas yang masuk ke sekolah regular

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			1.01.02.1.02.0012 - Pembangunan Kantin Sekolah	
			1.01.02.1.02.0016 - Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			1.01.02.1.02.0018 - Rehabilitasi Ruang Laboratorium	
			1.01.02.1.02.0028 - Pengadaan Mebel Sekolah	
			1.01.02.1.02.0030 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
			1.01.02.1.02.0033 - Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
			1.01.02.1.02.0037 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	
			1.01.02.1.02.0041 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	ARG
			1.01.02.1.02.0043 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	ARG
			1.01.02.1.02.0045 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	
			1.01.02.1.02.0046 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	1. Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Untuk Pengurangan Beban Masyarakat

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			1.01.02.1.02.0050 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
			1.01.02.1.02.0053 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.1.02.0057 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			1.01.02.1.02.0059 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	ARG
			1.01.02.1.02.0062 - Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.1.02.0063 - Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	
			1.01.02.1.02.0064 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Untuk Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan 2.Penyediaan akses sarana pendidikan bagi masyarakat miskin Penjangkauan anak 3.Disabilitas yang masuk ke sekolah regular

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			1.01.02.1.02.0065 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
			1.01.02.1.02.0066 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula	
			1.01.02.1.02.0069 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	
			1.01.02.1.02.0071 - Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	
			1.01.02.1.02.0072 - Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	1.Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Untuk Pengurangan Beban Masyarakat 2.Bosda Arfimasi, dan Bantuan Perlatan Pendidikan seperti baju seragam gratis 3.Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik Miskin 4. ARG
			1.01.02.1.02.0073 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	ARG
			1.01.02.1.02.0074 - Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			1.01.02.1.02.0075 - Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	
			1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
			1.01.02.1.03.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.Penjangkauan lembaga pendidikan yang inklusif sebagai pusat pelayanan disabilitas. 2.Penyediaan standar pelaksanaan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas di tingkat pendidikan menengah 3.Penjangkauan sekolah yang melaksanakan pelatihan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas. 4.Perluasan sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas 5.Penyediaan Layanan Asesmen dan Layanan Intervensi Terpadu Penyandang 6.Disabilitas.Penjangkauan siswa Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
			1.01.02.1.03.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.Penjangkauan lembaga pendidikan yang inklusif sebagai pusat pelayanan disabilitas. 2.Penyediaan standar pelaksanaan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas di tingkat pendidikan menengah 3.Penjangkauan sekolah yang melaksanakan pelatihan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas. 4.Perluasan sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas 5.Penyediaan Layanan Asesmen dan Layanan Intervensi Terpadu Penyandang 6.Disabilitas.Penjangkauan siswa Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			1.01.02.1.03.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.Penjangkauan lembaga pendidikan yang inklusif sebagai pusat pelayanan disabilitas. 2.Penyediaan standar pelaksanaan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas di tingkat pendidikan menengah 3.Penjangkauan sekolah yang melaksanakan pelatihan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas. 4.Perluasan sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas 5.Penyediaan Layanan Asesmen dan Layanan Intervensi Terpadu Penyandang 6.Disabilitas.Penjangkauan siswa Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
			1.01.02.1.03.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.Penjangkauan lembaga pendidikan yang inklusif sebagai pusat pelayanan disabilitas. 2.Penyediaan standar pelaksanaan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas di tingkat pendidikan menengah 3.Penjangkauan sekolah yang melaksanakan pelatihan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas. 4.Perluasan sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas 5.Penyediaan Layanan Asesmen dan Layanan Intervensi Terpadu Penyandang 6.Disabilitas.Penjangkauan siswa Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
			1.01.02.1.03.0007 - Pembangunan Asrama Sekolah	1.Penjangkauan lembaga pendidikan yang inklusif sebagai pusat pelayanan disabilitas. 2.Penyediaan standar pelaksanaan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas di tingkat pendidikan menengah 3.Penjangkauan sekolah yang melaksanakan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
				pelatihan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas. 4.Perluasan sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas 5.Penyediaan Layanan Asesmen dan Layanan Intervensi Terpadu Penyandang 6.Disabilitas.Penjangkauan siswa Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
			1.01.02.1.03.0008 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.Penjangkauan lembaga pendidikan yang inklusif sebagai pusat pelayanan disabilitas. 2.Penyediaan standar pelaksanaan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas di tingkat pendidikan menengah 3.Penjangkauan sekolah yang melaksanakan pelatihan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas. 4.Perluasan sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas 5.Penyediaan Layanan Asesmen dan Layanan Intervensi Terpadu Penyandang 6.Disabilitas.Penjangkauan siswa Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
			1.01.02.1.03.0013 - Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	1.Penjangkauan lembaga pendidikan yang inklusif sebagai pusat pelayanan disabilitas. 2.Penyediaan standar pelaksanaan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas di tingkat pendidikan menengah 3.Penjangkauan sekolah yang melaksanakan pelatihan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas. 4.Perluasan sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas 5.Penyediaan Layanan Asesmen dan Layanan Intervensi Terpadu Penyandang

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
				6.Disabilitas.Penjangkauan siswa Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
			1.01.02.1.03.0014 - Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	1.Penjangkauan lembaga pendidikan yang inklusif sebagai pusat pelayanan disabilitas. 2.Penyediaan standar pelaksanaan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas di tingkat pendidikan menengah 3.Penjangkauan sekolah yang melaksanakan pelatihan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas. 4.Perluasan sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas 5.Penyediaan Layanan Asesmen dan Layanan Intervensi Terpadu Penyandang 6.Disabilitas.Penjangkauan siswa Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
			1.01.02.1.03.0015 - Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	1.Penjangkauan lembaga pendidikan yang inklusif sebagai pusat pelayanan disabilitas. 2.Penyediaan standar pelaksanaan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas di tingkat pendidikan menengah 3.Penjangkauan sekolah yang melaksanakan pelatihan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas. 4.Perluasan sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas 5.Penyediaan Layanan Asesmen dan Layanan Intervensi Terpadu Penyandang 6.Disabilitas.Penjangkauan siswa Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
			1.01.02.1.03.0035 - Pengadaan Mebel Sekolah	1.Penjangkauan lembaga pendidikan yang inklusif sebagai pusat pelayanan disabilitas. 2.Penyediaan standar pelaksanaan pendidikan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
				inklusif Penyandang Disabilitas di tingkat pendidikan menengah 3.Penjangkauan sekolah yang melaksanakan pelatihan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas. 4.Perluasan sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas 5.Penyediaan Layanan Asesmen dan Layanan Intervensi Terpadu Penyandang 6.Disabilitas.Penjangkauan siswa Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
			1.01.02.1.03.0037 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.Penjangkauan lembaga pendidikan yang inklusif sebagai pusat pelayanan disabilitas. 2.Penyediaan standar pelaksanaan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas di tingkat pendidikan menengah 3.Penjangkauan sekolah yang melaksanakan pelatihan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas. 4.Perluasan sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas 5.Penyediaan Layanan Asesmen dan Layanan Intervensi Terpadu Penyandang 6.Disabilitas.Penjangkauan siswa Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
			1.01.02.1.03.0040 - Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.Penjangkauan lembaga pendidikan yang inklusif sebagai pusat pelayanan disabilitas. 2.Penyediaan standar pelaksanaan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas di tingkat pendidikan menengah 3.Penjangkauan sekolah yang melaksanakan pelatihan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas. 4.Perluasan sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
				5.Penyediaan Layanan Asesmen dan Layanan Intervensi Terpadu Penyandang 6.Disabilitas.Penjangkauan siswa Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
			1.01.02.1.03.0044 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	1. Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Untuk Pengurangan Beban Masyarakat 2. Bosda Arfimasi, dan Bantuan Perlatan Pendidikan seperti baju seragam gratis 3. Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik Miskin 4.ARG
			1.01.02.1.03.0048 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	ARG
			1.01.02.1.03.0049 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	
			1.01.02.1.03.0050 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	ARG
			1.01.02.1.03.0051 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Terbentuknya UPTD. Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (LDPI) yang memberikan layanan asesmen dan layanan intervensi terpadu kepada Penyandang Disabilitas (ULD)
			1.01.02.1.03.0052 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	1. Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Untuk Pengurangan Beban Masyarakat

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			1.01.02.1.03.0059 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.1.03.0066 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	ARG
			1.01.02.1.03.0069 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.1.03.0070 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Untuk Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan 2.Penyediaan akses sarana pendidikan bagi masyarakat miskin 3.Penjangkauan lembaga pendidikan yang inklusif sebagai pusat pelayanan disabilitas. 4. Penyediaan standar pelaksanaan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas di tingkat pendidikan menengah 5.Penjangkauan sekolah yang melaksanakan pelatihan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas. 6.Perluasan sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
				7.Penyediaan Layanan Asesmen dan Layanan Intervensi Terpadu Penyandang 8.Disabilitas.Penjangkauan siswa Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
			1.01.02.1.03.0071 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	ARG
			1.01.02.1.03.0073 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	ARG
			1.01.02.1.03.0076 - Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	
			1.01.02.1.03.0079 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	
2.	1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	1.01.03.1.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	
			1.01.03.1.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	
3.	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	1.01.04.1.01 - Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	
			1.01.04.1.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	
			1.01.04.1.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	
4.	1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	1.01.05.1.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			1.01.05.1.01.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			1.01.05.1.01.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			1.01.05.1.02 - Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			1.01.05.1.02.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			1.01.05.1.02.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi mengacu pada Tabel 4.5. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.4. IKU Dinas Pendidikan Provinsi Riau sedangkan Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Untuk target capaian IKU Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2025-2030 disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN									
2.	Skor Literasi Jenjang SMA	Skor	73,3	73,9	74,5	75,1	75,7	76,3	76,9	
3.	Skor Literasi Jenjang SMK	Skor	68,45	69,75	71,05	72,35	73,65	74,95	76,25	
4.	Skor Literasi SDLB	Skor	72,09	73,69	75,29	76,89	78,49	80,09	81,69	
5.	Skor Literasi Jenjang SMPLB	Skor	76,02	77,12	77,62	78,12	78,62	79,12	79,62	
6.	Skor Literasi Jenjang SMALB	Skor	71,71	72,21	72,71	73,21	73,71	74,21	74,71	
7.	Skor Numerasi Jenjang SMA	Skor	61,61	63,26	64,86	66,46	68,06	69,66	71,26	
8.	Skor Numerasi Jenjang SMK	Skor	57,88	60,08	62,28	64,48	66,68	68,88	71,08	
9.	Skor Numerasi Jenjang SDLB	Skor	66,49	67,09	67,69	68,29	68,89	69,49	70,09	
10.	Skor Numerasi Jenjang SMPLB	Skor	73,61	73,86	74,11	74,36	74,61	74,86	75,11	
11.	Skor Numerasi Jenjang SMALB	Skor	64,31	64,81	65,31	65,81	66,31	66,81	67,31	
12.	Rata - rata Lama Sekolah	Tahun	9,43	9.94-9.94	10.06-10.06	10.18-10.18	10.30-10.31	10.42-10.43	10.55-10.56	
13.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,42	13.56-13.57	13.63-13.64	13.70-13.71	13.77-13.79	13.84-13.86	13.91-13.93	
14.	Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Indeks	69,96	72	72,96	75,96	78,96	81,96	84,96	
15.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	74,6	74,8	75	75,18	75,36	75,52	75,66	
16.	APK SM Sederajat	Persentase	92,09	92,59	93,09	93,59	94,09	94,59	95,09	
17.	APM SM Sederajat	Persentase	68,17	68,47	68,77	69,07	69,37	69,67	69,97	

Selanjutnya Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2025-2030 disajikan pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
2.	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	positif	%	78,49	79,13	79,77	80,41	81,06	81,70	82,34	
3.	Persentase satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang mengajukan perizinan terlayani	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Indeks Pemerataan Guru	positif	Nilai	0	0	0,45 - 0,46	0,46 - 0,47	0,47 - 0,48	0,48 - 0,49	0,49 - 0,50	Indikator Baru
5.	Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau	positif	%	90,00	90,10	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50	
6.	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	positif	Persentase	52,96	55,96	58,96	61,96	64,96	67,96	70,96	
7.	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	positif	%	56,75	65,40	74,05	75,14	76,23	77,32	78,41	
8.	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal Budaya Melayu Riau	positif	%	66,05	66,55	67,05	67,55	68,05	65,55	69,05	

BAB V
P E N U T U P

Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau merupakan dokumen perencanaan yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi. Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitan ini diharapkan seluruh aparatur Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk melaksanakan program ini sehingga dapat berhasil dengan baik. Dengan demikian hasil pembangunan bidang Pendidikan dapat diterima secara lebih adil dan merata untuk masyarakat. Sangat dimungkinkan dapat terjadi perubahan pesat, tidak menentu yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat nasional maupun global yang dapat mengubah situasi maupun kebijakan sehingga perubahan renstra yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian.

Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2025-2029, merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Riau Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau ditetapkan dengan peraturan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah setelah disahkan Gubernur Riau.

Renstra ini selanjutnya menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Provinsi Riau

sekaligus sebagai alat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pertanggungjawaban dan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran.

Dinas Pendidikan Provinsi Riau akan mendukung pencapaian kesetaraan gender bidang pendidikan melalui pemenuhan akses dan peningkatan mutu pendidikan yang berkeadilan gender, dengan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan yang telah direncanakan dalam Renstra responsif gender ini. Akhir kata semoga Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Pekanbaru, 28 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

H. ERISMAN YAHYA, M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19761130 200112 1 003

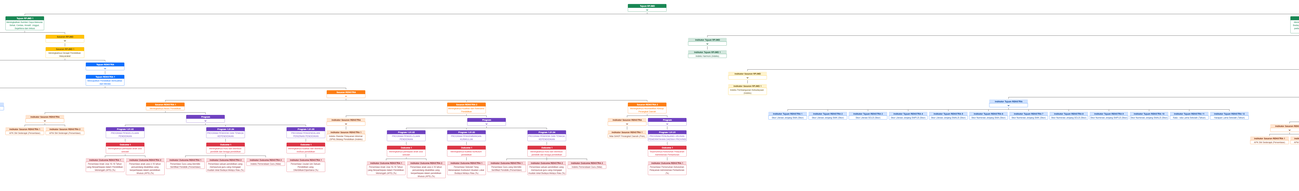

Form Penyelarasan
(dijadikan lampiran dalam Dokumen Renstra PD Tahun 2025 – 2029)

PENYELARASAN RENSTRA PD TERHADAP RPJMN TAHUN 2025 – 2029

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau melalui Mitra Bidang dan Perangkat Daerah melakukan Penyelarasan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan Kondisi, Karakteristik dan Otonomi Daerah, antara lain :

1. PERIODESASI

No	Periodesasi RPJMN	Periodesasi Renstra PD
(1)	(2)	(3)
1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 – 2029	Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2025 – 2029

2. SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) YANG TERDAPAT DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029;

NO	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 - 2029	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

3. **SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG PROYEK STRATEGIS NASIONAL YANG TELAH DITENTUKAN LOKASINYA DI DALAM RPJMN TAHUN 2025 – 2029; (Perpres RPJMN lampiran I tabel 2.2)**

NO	Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025 - 2029	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Makan Bergizi Gratis				
2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas				
3	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul				
4	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota				
5	Program Penuntasan TB				
6	Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat				
7	Layanan lrigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional				
8	Peningkatan Produksi Daging Nasional Sapi dan Susu Sapi				
9	*Biorefinary* Sumatra				
10	Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan				
11	Program hilirisasi sagu, singkong, ubi jalar Proyek : I Penguatan penyediaan bahan baku hilirisasi tepung sagu dan singkong II Pengembangan Industri Sagu		NIHIL		
12	Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut				
13	Program Pengembangan Industri Dirgantara; Pengembangan N2 19 Amfibi				
14	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu				
15	Penyediaan Peta Dasar Skala Nasional Besar (l:5.000) seluruh Wilayah Indonesia				
16	Kawasan Industri Futong				
17	Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas				
18	Pembangunan 3 Juta Rumah				

Ket : hanya diisi oleh OPD yang berkaitan dengan ProSN

4. **KINERJA TUJUAN, SASARAN DAN OUTCOME SERTA INDIKATOR RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 UNTUK MENDUKUNG RPJMN TAHUN 2025-2029;**

NO	SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2025 – 2029	INDIKATOR			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tujuan PD	Sasaran PD	Outcome Program PD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. 2. 3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) PDRB per kapita (Rp. Juta) Kontribusi PDRB Provinsi (%)	-	-	-	-
4 5	Tingkat Kemiskinan Rasio Gini	-	-	-	-
6	Indeks Modal Manusia	Mewujudkan pendidikan berkualitas dan merata	- Meningkatnya akses Pendidikan - Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan	- Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah - Meningkatnya kualitas kurikulum Pendidikan - Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan - Meningkatnya mutu dan distribusi institusi pendidkan	Dinas Pendidikan
7 8	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) IKLH Daerah	-	-	-	-
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	-	-	-	-

5. INDIKATOR KINERJA SASARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029 DENGAN INDIKATOR DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN PD	SASARAN PD	OUTCOME PROGRAM PD	2025	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase peserta didik satuan Pendidikan formal dan non formal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional (IKSS 2.2.) (persen) a. Literasi membaca b. Numerasi	68,62 67,35	76,62 75,35	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Skor Literasi Jenjang SMA			73,9	76,3	
					Skor Numerasi Jenjang SMK			60,08	68,88	
					Skor Numerasi Jenjang SDLB			67,09	69,49	
					Skor Numerasi Jenjang SMPLB			73,86	74,86	
					Skor Numerasi Jenjang SMALB			64,81	66,81	
					Rata - rata Lama Sekolah			9.94-9.94	10.42-10.43	

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN PD	SASARAN PD	OUTCOME PROGRAM PD	2025	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Harapan Lama Sekolah			13.56 - 13.57	13.84-13.86	
						APK SM Sederajat		92,59	94,59	
						APM SM Sederajat		68,47	69,67	
2	Angka partisipasi sekolah 7-18 tahun (IKSS 1.2.) (persen)	92,44	92,71				Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	79,13	81,70	
							Persentase satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang mengajukan perizinan terlayani	100	100	
							Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam	65,40	77,32	

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN PD	SASARAN PD	OUTCOME PROGRAM PD	2025	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							pendidikan khusus (APS)			
3	Persentase satuan Pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebhinekaan pada kategori baik (IKSS 2.3.) (persen)	33,24	34,08							
4	Persentase Angkatan kerja lulusan Pendidikan menengah vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun (IKSS 4.1.)	72,55	75,49							

Catatan : Perangkat Daerah menyesuaikan dengan Kementerian/Lembaga masing-masing

6. DUKUNGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029 TERHADAP PROGRAM STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2025 – 2029 (berdasarkan SEB Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 tahun 2025)

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D	**Perluasan Akses Pendidikan dengan Proyek/Kegiatan Pembangunan dan**	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Dinas Pendidikan

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah				
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
				Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	
				Pembangunan Asrama Sekolah	
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	
				Pengadaan Mebel Sekolah	
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
				Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah /Guru/Penjaga Sekolah	
				Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
				Rehabilitasi sedang/ berat Asrama Sekolah	
				Pembangunan Ruang Laboratorium	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	
				Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala	

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
				Pembangunan Ruang Praktik Siswa	
				Pembangunan Ruang Laboratorium	
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
				Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	
				Pembangunan Asrama Sekolah	
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
				Pembangunan Kantin Sekolah	
				Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Rehabilitasi Ruang Laboratorium	
				Pengadaan Mebel Sekolah	
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
				Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
				Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula	
\				Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	
				Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	
				Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepela Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala sekolah/TU	
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
				Pembangunan Asrama Sekolah	
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
				Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	
				Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama Untuk Tuna Rungu (B)	
				Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tuna Grahita (C)	
				Pengadaan Mebel Sekolah	

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
				Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Asrama Sekolah	
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	

Catatan : Diisi oleh OPD yang memiliki tugas dan fungsi mendukung Program Strategis Nasional (PSN)

Metadata

1. Literasi Jenjang SMA

Institusi Penghasil: Kemendikdasmen

Defenisi : Persentase peserta didik jenjang SMA yang telah mencapai atau melampaui standar kompetensi minimum dalam literasi membaca berdasarkan hasil Asesmen Nasional (AN). Indikator ini mengukur kemampuan siswa dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah.

Interpretasi

- Skor Mahir/Cakap (>70%): Menunjukkan sistem pendidikan di daerah tersebut berhasil membentuk siswa yang mampu berpikir kritis. Dinas dapat fokus pada program pengayaan dan kompetensi global.
- Skor Dasar (40% - 70%): Menunjukkan kualitas literasi cukup, namun terdapat kesenjangan dalam pemahaman teks yang kompleks. Dinas perlu memperkuat literasi lintas mata pelajaran (Reading across the curriculum).
- Skor Perlu Intervensi (<40%): Menunjukkan kondisi darurat literasi. Dinas wajib melakukan intervensi mendasar seperti pembenahan perpustakaan, distribusi buku bacaan bermutu, dan pelatihan intensif bagi guru mengenai metode pembelajaran literasi.

Metode/Rumus Perhitungan

$$\textit{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Siswa SMA Skor Literasi} \geq \text{Batas Minimun}}{\text{Total Siswa SMA Peserta Asesmen Nasional}} \times 100$$

Ukuran/Satuan : Skor/Persentase (%)

Judul Publikasi/Sumber Data : Rapor Pendidikan (Kemendikdasmen)

Tahun Data Tersedia : Tersedia secara berkala setiap tahun sejak 2021 (Pasca penghapusan Ujian Nasional).

Level Estimasi : Satuan Pendidikan (Sekolah), Kabupaten/Kota, dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan (Annual).

Apakah Indikator dapat diakses umum : Tidak, hanya dapat diakses melalui portal Rapor Pendidikan oleh publik secara agregat dan oleh Dinas Pendidikan melalui akun akses khusus daerah.

2. Literasi Jenjang SMK

Institusi Penghasil: Kemendikdasmen (Ditjen Pendidikan Vokasi)

Definisi : Definisi Persentase peserta didik jenjang SMK yang mencapai kompetensi minimum literasi membaca melalui Asesmen Nasional. Literasi pada SMK mencakup kemampuan memahami informasi teknis, instruksi kerja, serta kemampuan menganalisis teks informasi yang mendukung keahlian kejuruan.

Interpretasi :

- Pencapaian Tinggi: Menunjukkan bahwa lulusan SMK memiliki bekal kemampuan kognitif yang kuat untuk beradaptasi dengan teknologi baru di dunia kerja. Siswa dianggap mampu memahami manual kerja (SOP) yang kompleks.
- Pencapaian Rendah: Merupakan indikasi bahwa siswa akan kesulitan dalam menyerap instruksi teknis di dunia industri. Dinas Pendidikan perlu mengevaluasi integrasi literasi dalam pembelajaran praktik di bengkel atau laboratorium sekolah.
- Fungsi Pengawasan: Sebagai dasar bagi Dinas untuk mendorong program "Literasi Vokasi", yaitu penyediaan bahan bacaan yang relevan dengan masing-masing program keahlian (misal: jurnal otomotif, manual book kelistrikan, dll).

Metode/Rumus Perhitungan

$$\textit{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Siswa SMK Skor Literasi} \geq \text{Standar Minimun}}{\text{Total Siswa SMK Peserta Asesmen Nasional}} \times 100$$

Ukuran/Satuan : Skor/Persentase (%)

Judul Publikasi/Sumber Data : Rapor Pendidikan (Kemendikdasmen)

Tahun Data Tersedia : Tersedia setiap tahun mulai dari tahun 2021 hingga sekarang.

Level Estimasi : Satuan Pendidikan (Sekolah), Kabupaten/Kota, dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan : Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum? Tidak, hanya dapat diakses melalui portal Rapor Pendidikan oleh publik secara agregat dan oleh Dinas Pendidikan melalui akun akses khusus daerah.

3. Literasi Jenjang SDLB

Institusi Penghasil: Kemendikdasmen

Definisi : Persentase peserta didik jenjang SDLB yang menunjukkan capaian kompetensi literasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan jenis hambatan yang dimiliki, yang diukur melalui Instrumen Asesmen Nasional (AN) khusus Pendidikan Luar Biasa atau evaluasi pembelajaran yang diadaptasi.

Interpretasi :

- Fokus Kemandirian: Literasi pada SDLB tidak hanya soal membaca teks kompleks, tetapi lebih kepada literasi fungsional (kemampuan memahami instruksi dasar, rambu-rambu, atau informasi untuk kemandirian hidup sehari-hari).
- Adaptasi Kurikulum: Jika skor rendah, Dinas Pendidikan perlu memastikan sekolah telah menerapkan kurikulum adaptif dan menyediakan Alat Peraga Edukasi (APE) yang sesuai dengan kebutuhan khusus siswa (seperti buku Braille untuk tunanetra atau media visual untuk tunarungu).
- Indikator Inklusi: Capaian ini menjadi tolak ukur keberhasilan daerah dalam memberikan hak pendidikan yang setara dan berkualitas bagi penyandang disabilitas (Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal/SPM).

4. Metode/Rumus Perhitungan

$$\textit{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Siswa SDLB yang mencapai Target Literasi Adaptif}}{\text{Total Siswa SDLB Peserta Asesmen}} \times 100$$

Ukuran/Satuan : Skor/Persentase (%)

Judul Publikasi/Sumber Data : Rapor Pendidikan (Kemendikdasmen)

Tahun Data Tersedia : Tersedia secara bertahap mulai tahun 2021 (dengan penyesuaian instrumen asesmen untuk SLB).

Level Estimasi : Satuan Pendidikan (Sekolah) dan Provinsi (karena SLB biasanya di bawah wewenang Provinsi).

Frekuensi Pengumpulan : Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum? Tidak, hanya dapat diakses melalui portal Rapor Pendidikan oleh publik secara agregat dan oleh Dinas Pendidikan melalui akun akses khusus daerah.

4. Literasi Jenjang SMPLB

Institusi Penghasil: Kemendikdasmen

Definisi : Persentase peserta didik pada jenjang SMPLB yang memiliki kemampuan literasi (membaca/memahami simbol/isyarat) sesuai

dengan standar kompetensi yang telah diadaptasi berdasarkan jenis kekhususan siswa. Literasi di SMPLB menekankan pada kemampuan mengolah informasi untuk komunikasi sosial dan pemecahan masalah sehari-hari.

Interpretasi :

- Kesiapan Transisi: Capaian literasi yang baik pada jenjang SMPLB menunjukkan siswa memiliki kesiapan untuk menerima pelatihan keterampilan (vocational) di jenjang SMALB.
- Efektivitas Media Pembelajaran: Jika angka literasi rendah, Dinas Pendidikan perlu mengevaluasi ketersediaan media pendukung seperti perangkat bantu dengar (untuk tunarungu), software pembaca layar (tunanetra), atau buku cerita bergambar sederhana (tunagrahita).
- Pemantauan Guru Spesialis: Indikator ini mencerminkan kompetensi Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam mengadaptasi materi bacaan yang berat menjadi informasi yang mudah dicerna oleh siswa berkebutuhan khusus.

Metode/Rumus Perhitungan

$$\textit{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Siswa SMPLB yang Memenuhi Kriteria Literasi Adaptif}}{\text{Total Siswa SMPLB Peserta Asesmen}} \times 100$$

(Batas "Kriteria" merujuk pada profil pencapaian dalam Rapor Pendidikan Pendidikan Khusus).

Ukuran/Satuan : Skor/Persentase (%)

Judul Publikasi/Sumber Data : Rapor Pendidikan (Kemendikdasmen)

Tahun Data Tersedia : Tersedia secara rutin mulai tahun 2021 (Asesmen Nasional khusus SLB).

Level Estimasi : Satuan Pendidikan (Sekolah) dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan : Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum? Tidak, hanya dapat diakses melalui portal Rapor Pendidikan oleh publik secara agregat dan oleh Dinas Pendidikan melalui akun akses khusus daerah.

5. Literasi Jenjang SMALB

Institusi Penghasil: Kemendikdasmen

Definisi : Persentase peserta didik jenjang SMALB yang memiliki kemampuan literasi fungsional dan kritis sesuai dengan potensi dan jenis hambatannya. Hal ini mencakup kemampuan memahami informasi publik, instruksi keselamatan kerja, serta literasi digital dasar untuk mendukung kemandirian hidup setelah lulus sekolah.

Interpretasi :

• Indikator Kemandirian Lulusan: Capaian literasi SMALB yang optimal adalah sinyal bahwa lulusan siap dilepas ke masyarakat atau mengikuti program pelatihan kerja (kursus) tanpa ketergantungan penuh pada pendamping.

• Literasi Digital & Hak Pilih: Pada tingkat SMALB, literasi juga mencakup pemahaman hak-hak sebagai warga negara (misal: literasi dalam pemilu atau pengisian formulir administratif publik). Dinas perlu memastikan sekolah membekali siswa dengan kemampuan ini.

• Evaluasi Program Keterampilan: Jika skor rendah, Dinas perlu mengkaji ulang apakah buku panduan keterampilan di sekolah terlalu rumit secara bahasa sehingga sulit dipahami oleh siswa dengan hambatan intelektual atau sensorik.

Metode/Rumus Perhitungan

$$\textit{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Siswa SMALB yang Capaian Literasi Tuntas}}{\text{Total Siswa SMALB Peserta Asesmen}} \times 100$$

(Tuntas di sini berarti mencapai skor minimal pada instrumen Asesmen Nasional yang telah disesuaikan/adaptif).

Ukuran/Satuan : Skor/Persentase (%)

Judul Publikasi/Sumber Data : Rapor Pendidikan (Kemendikdasmen)

Tahun Data Tersedia : Tersedia setiap tahun sejak 2021.

Level Estimasi : Satuan Pendidikan (Sekolah) dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan : Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum? Tidak, hanya dapat diakses melalui portal Rapor Pendidikan oleh publik secara agregat dan oleh Dinas Pendidikan melalui akun akses khusus daerah.

6. Numerasi Jenjang SMA

Institusi Penghasil : Kemendikdasmen

Definisi : Persentase peserta didik jenjang SMA yang mencapai atau melampaui standar kompetensi minimum numerasi. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah praktis dalam berbagai jenis konteks yang relevan sebagai warga negara Indonesia dan dunia.

Interpretasi

• Kemampuan Logika & Analisis: Skor numerasi yang tinggi menunjukkan siswa memiliki daya nalar logis yang baik. Ini adalah fondasi utama bagi siswa yang akan melanjutkan ke rumpun sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).

• Efektivitas Kurikulum: Jika skor numerasi lebih rendah dari skor literasi (fenomena umum), Dinas Pendidikan perlu mengevaluasi metode pengajaran matematika agar tidak hanya menghafal rumus, tetapi lebih pada pemecahan masalah (problem solving).

• Kualitas SDM Masa Depan: Numerasi berkaitan dengan kemampuan pengelolaan finansial dan pengambilan keputusan berbasis data. Rendahnya angka ini di suatu daerah dapat menjadi peringatan bagi Dinas tentang rendahnya daya saing lulusan di era digital/data.

Metode/Rumus Perhitungan

$$\textit{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Siswa SMA Skor Numerasi} \geq \text{Batas Minimum}}{\text{Total Siswa SMA Peserta Asesmen Nasional}} \times 100$$

Ukuran/Satuan : Skor/Persentase (%)

Judul Publikasi/Sumber Data : Rapor Pendidikan (Kemendikdasmen)

Tahun Data Tersedia : Tersedia setiap tahun mulai dari tahun 2021 hingga sekarang.

Level Estimasi : Satuan Pendidikan (Sekolah), Kabupaten/Kota, dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan : Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum? Tidak, hanya dapat diakses melalui portal Rapor Pendidikan oleh publik secara agregat dan oleh Dinas Pendidikan melalui akun akses khusus daerah.

7. Numerasi Jenjang SMK

Institusi Penghasil: Kemendikdasmen

Definisi : Persentase peserta didik SMK yang mencapai atau melampaui kompetensi minimum numerasi. Numerasi SMK ditekankan pada kemampuan siswa untuk mengaplikasikan konsep angka, data, dan simbol matematika dalam konteks profesional, teknis, dan dunia kerja (misal: menghitung skala gambar teknik, menghitung dosis/campuran bahan, atau analisis data statistik produksi).

Interpretasi :

• Kesiapan Kerja (Link and Match): Skor numerasi yang baik menunjukkan siswa memiliki ketelitian teknis. Di industri, kesalahan numerasi (salah hitung) dapat menyebabkan kegagalan produk atau kerugian material.

• Kemampuan Berwirausaha: Numerasi adalah modal utama lulusan SMK untuk berwirausaha (menghitung modal, laba-rugi, dan bunga). Jika skor rendah, Dinas perlu memperkuat muatan kewirausahaan berbasis perhitungan yang akurat.

• Evaluasi Praktik Kejuruan: Rendahnya numerasi sering kali menjadi penyebab siswa sulit menguasai kompetensi kejuruan tertentu yang

membutuhkan logika matematika kuat (seperti Teknik Otomasi, Akuntansi, atau Konstruksi).

Metode/Rumus Perhitungan

$$\textit{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Siswa SMK Skor Numerasi} \geq \text{Batas Minimum}}{\text{Total Siswa SMK Peserta Asesmen Nasional}} \times 100$$

Ukuran/Satuan : Skor/Persentase (%)

Judul Publikasi/Sumber Data : Rapor Pendidikan (Kemendikdasmen)

Tahun Data Tersedia : Tersedia mulai tahun 2021 hingga sekarang.

Level Estimasi : Satuan Pendidikan (Sekolah), Kabupaten/Kota, dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan : Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum? Tidak, hanya dapat diakses melalui portal Rapor Pendidikan oleh publik secara agregat dan oleh Dinas Pendidikan melalui akun akses khusus daerah.

8. Numerasi Jenjang SDLB

Institusi Penghasil: Kemendikdasmen

Definisi : Persentase peserta didik jenjang SDLB yang menunjukkan capaian kompetensi numerasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan jenis hambatan yang dimiliki. Numerasi pada SDLB difokuskan pada pengenalan lambang bilangan, pemahaman kuantitas, serta penerapan matematika dasar dalam aktivitas sehari-hari (numerasi fungsional).

Interpretasi :

- Kemandirian Hidup (Life Skills): Keberhasilan numerasi di SDLB diukur dari kemampuan siswa melakukan transaksi sederhana (mengenal uang), mengenal waktu, atau menghitung benda-benda kebutuhan pribadi.
- Ketersediaan Alat Peraga: Jika skor rendah, Dinas Pendidikan perlu memastikan sekolah memiliki alat peraga manipulatif yang sesuai (misal: balok angka, jam dinding taktil untuk tunanetra, atau media visual bagi tunarungu).
- Pemenuhan Hak Pendidikan: Indikator ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan pendidikan inklusif yang tidak hanya fokus pada literasi, tetapi juga kemampuan nalar dasar bagi anak berkebutuhan khusus.

Metode/Rumus Perhitungan

$$\textit{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Siswa SDLB yang Mencapai Target Numerasi Adaptif}}{\text{Total Siswa SDLB Peserta Asesmen}} \times 100$$

Ukuran/Satuan : Skor/Persentase (%)

Judul Publikasi/Sumber Data : Rapor Pendidikan (Kemendikdasmen)

Tahun Data Tersedia : Tersedia setiap tahun mulai 2021 (Asesmen Nasional khusus SLB).

Level Estimasi : Satuan Pendidikan (Sekolah) dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan : Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum? Tidak, hanya dapat diakses melalui portal Rapor Pendidikan oleh publik secara agregat dan oleh Dinas Pendidikan melalui akun akses khusus daerah.

9. Numerasi Jenjang SMPLB

Institusi Penghasil: Kemendikdasmen

Definisi : Persentase peserta didik jenjang SMPLB yang mencapai standar kompetensi numerasi yang telah diadaptasi sesuai jenis hambatan. Numerasi di SMPLB mencakup kemampuan menggunakan konsep matematika (seperti pengukuran, estimasi, dan operasi hitung dasar) untuk memecahkan masalah praktis yang lebih kompleks dibanding jenjang SD.

Interpretasi :

- Kesiapan Pra-Vokasional: Skor numerasi di SMPLB menjadi dasar penilaian apakah siswa siap menerima materi keterampilan di jenjang berikutnya (SMALB), seperti menghitung bahan dalam tata boga atau mengukur dimensi dalam prakarya.
- Logika Interaksi Sosial: Numerasi di jenjang ini membantu siswa memahami konsep jarak, durasi waktu perjalanan, dan penggunaan alat hitung digital (kalkulator/HP), yang sangat penting untuk mobilitas sosial mereka.
- Evaluasi Sarana Laboratorium: Jika skor rendah, Dinas perlu meninjau ketersediaan ruang praktik atau laboratorium kemandirian di SLB yang memungkinkan siswa belajar matematika melalui pengalaman langsung (learning by doing).

Metode/Rumus Perhitungan

$$\textit{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Siswa SMPLB yang Memenuhi Capaian Numerasi Adaptif}}{\text{Total Siswa SMPLB Peserta Asesmen}} \times 100$$

Ukuran/Satuan : Skor/Persentase (%)

Judul Publikasi/Sumber Data : Rapor Pendidikan (Kemendikdasmen)

Tahun Data Tersedia : Tersedia setiap tahun mulai 2021.

Level Estimasi : Satuan Pendidikan (Sekolah) dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan : Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum? Tidak, hanya dapat diakses melalui portal Rapor Pendidikan oleh publik secara agregat dan oleh Dinas Pendidikan melalui akun akses khusus daerah.

10. Numerasi Jenjang SMALB

Institusi Penghasil: Kemendikdasmen

Definisi : Persentase peserta didik jenjang SMALB yang memiliki kemampuan numerasi fungsional untuk mengolah informasi angka, data, dan simbol dalam konteks kemandirian, kewirausahaan sederhana, dan partisipasi sosial. Indikator ini mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan logika matematika untuk kebutuhan pasca-sekolah.

Interpretasi

- Kesiapan Transisi Ekonomi: Skor numerasi yang baik pada SMALB menunjukkan siswa mampu melakukan manajemen keuangan dasar (seperti menghitung kembalian, menabung, atau memahami konsep harga) yang krusial untuk mencegah eksploitasi finansial terhadap penyandang disabilitas.
- Integrasi Keterampilan (Vokasional): Di jenjang SMALB, numerasi adalah penunjang utama mata pelajaran keterampilan. Dinas perlu memastikan kurikulum sekolah menyelaraskan hitungan matematika dengan praktik kerja (misal: mengukur kain dalam menjahit atau menimbang bahan dalam tata boga).
- Evaluasi Program Pasca-Sekolah: Jika skor rendah, Dinas Pendidikan harus memperkuat program pendampingan transisi agar lulusan tidak mengalami kesulitan dalam mengelola kebutuhan hidup mandiri di masyarakat.

Metode/Rumus Perhitungan

$$\textit{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Siswa SMALB yang Mencapai Kompetensi Numerasi Minimum}}{\text{Total Siswa SMALB Peserta Asesmen Nasional}} \times 100$$

(Kompetensi minimum merujuk pada standar adaptif yang ditetapkan untuk Pendidikan Menengah Atas Luar Biasa).

Ukuran/Satuan : Skor/Persentase (%)

Judul Publikasi/Sumber Data : Rapor Pendidikan (Kemendikdasmen)

Tahun Data Tersedia : Tersedia setiap tahun mulai 2021 hingga sekarang.

Level Estimasi : Satuan Pendidikan (Sekolah) dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan : Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum? Tidak, hanya dapat diakses melalui portal Rapor Pendidikan oleh publik secara agregat dan oleh Dinas Pendidikan melalui akun akses khusus daerah.

11. Rata – rata Lama Sekolah

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Defenisi : Jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Indikator ini menggambarkan kualitas sumber daya manusia (SDM) berdasarkan tingkat pendidikan yang telah diselesaikan.

Interpretasi

• Tolok Ukur Kualitas SDM: Semakin tinggi angka RLS, semakin baik kualitas modal manusia di daerah tersebut. Angka RLS yang tinggi berkorelasi positif dengan tingkat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

• Evaluasi Program Wajib Belajar: Jika RLS berada di bawah angka 9,00 (setara lulus SMP), berarti target Wajib Belajar 9 Tahun belum tercapai secara merata pada penduduk dewasa. Jika di bawah 12,00, maka target Wajib Belajar 12 Tahun masih perlu diakselerasi.

• Dasar Program Pendidikan Kesetaraan: Bagi Dinas Pendidikan, angka RLS yang rendah menjadi landasan kuat untuk memperbanyak program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C) guna memfasilitasi penduduk dewasa yang putus sekolah agar dapat meningkatkan jenjang pendidikannya.

Metode/Rumus Perhitungan

$$RLS = \frac{\sum \text{Tahun Lama Sekolah Penduduk Usia 25+}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 25+}}$$

Ukuran/Satuan: Tahun

Judul Publikasi/Sumber Data :

- Indeks Pembangunan Manusia (Publikasi BPS)
- Statistik Kesejahteraan Rakyat (Susenas - BPS)
- Profil Pendidikan Daerah

Tahun Data Tersedia: Tersedia setiap tahun

Level Estimasi: Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya

12. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Defenisi : Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Secara standar, HLS dihitung untuk anak usia 7 tahun ke atas. Indikator ini merepresentasikan peluang anak-anak untuk mengenyam pendidikan formal dari jenjang terendah hingga tertinggi.

Interpretasi

• Aksesibilitas Pendidikan: Skor HLS yang tinggi menunjukkan bahwa sistem pendidikan di daerah tersebut mampu menarik anak-anak untuk masuk sekolah dan bertahan di dalam sistem (tidak putus sekolah).

• Evaluasi Wajib Belajar: Jika HLS menunjukkan angka 12,00, artinya anak-anak di daerah tersebut memiliki peluang untuk menamatkan sekolah hingga jenjang SMA/SMK. Jika mencapai 13,00 - 16,00, berarti banyak anak yang berpeluang melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

• Deteksi Dini Putus Sekolah: Jika angka HLS stagnan atau menurun, ini adalah sinyal bagi Dinas Pendidikan bahwa terdapat kendala akses (ekonomi, jarak sekolah, atau sosial) yang membuat anak-anak enggan memulai atau melanjutkan sekolah.

Metode/Rumus Perhitungan

$$HLS = \sum_{i=7}^{n} \frac{E_i}{P_i}$$

Di mana:
• Ei: Jumlah penduduk usia i yang bersekolah.
• Pi: Jumlah penduduk usia i.

Ukuran/Satuan: Tahun

Judul Publikasi/Sumber Data :

- Indeks Pembangunan Manusia (Publikasi BPS).
- Statistik Pendidikan (BPS).
- Data Pokok Pendidikan (Dapodik) – sebagai data pendukung jumlah siswa.

Tahun Data Tersedia: Tersedia setiap tahun.

Level Estimasi: Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya

13. Angka Partisipasi Kasar (APK) SM Sederajat

Institusi Penghasil: Kemendikdasmen dan Badan Pusat Statistik (BPS)
Defenisi : Rasio antara jumlah siswa yang sedang sekolah di jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA/Paket C) tanpa memandang usia, terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia 16-18 tahun.
Interpretasi
• Daya Serap Sistem: APK menunjukkan seberapa besar kapasitas sekolah dalam menampung penduduk usia sekolah. Nilai APK yang tinggi menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan yang tinggi.
• Over-age Students: Jika nilai APK melebihi 100%, berarti terdapat banyak siswa yang usianya di luar batas standar (16-18 tahun) yang masih

menempuh pendidikan di jenjang tersebut (akibat terlambat masuk sekolah atau mengulang kelas).

- Target Akses: Jika APK rendah, Dinas Pendidikan perlu mengevaluasi apakah ada hambatan geografis (kurangnya jumlah sekolah) atau hambatan ekonomi yang menghalangi anak untuk masuk SMA sederajat.

Metode/Rumus Perhitungan

$$APK = \frac{\text{Jumlah Siswa SMA/SMK/MA/Paket C (Semua Usia)}}{\text{Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun}} \times 100$$

Ukuran/Satuan: Persentase (%)

Judul Publikasi/Sumber Data :

- Statistik Pendidikan (BPS - Susenas).
- Profil Pendidikan Daerah.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Pendidikan.

Tahun Data Tersedia: Tersedia setiap tahun secara konsisten.

Level Estimasi: Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya

14. Angka Partisipasi Murni (APM) SM Sederajat

Institusi Penghasil: Kemendikdasmen dan Badan Pusat Statistik (BPS)
Defenisi : Persentase penduduk kelompok usia 16-18 tahun yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang yang sesuai (SMA/SMK/MA atau Paket C). APM mengukur ketepatan waktu penduduk usia sekolah dalam mengenyam pendidikan di jenjangnya.
Interpretasi

- Efisiensi dan Ketepatan Waktu: Semakin tinggi nilai APM (mendekati 100%), semakin sedikit anak yang terlambat masuk sekolah atau mengulang kelas. Hal ini menunjukkan sistem pendidikan berjalan secara efisien.

- Identifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS): Selisih antara 100% dengan nilai APM menunjukkan persentase anak usia 16-18 tahun yang tidak sekolah atau masih tertahan di jenjang pendidikan bawahnya (SMP).

- Target Pemerataan: Dinas Pendidikan menggunakan APM untuk memastikan bahwa layanan pendidikan benar-benar dinikmati oleh penduduk di usia emasnya, bukan hanya tersedia secara umum.

Metode/Rumus Perhitungan

$$APM = \frac{\text{Jumlah Siswa Usia 16-18 Tahun pada Jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Total Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun}} \times 100$$

Ukuran/Satuan: Persentase (%)

Judul Publikasi/Sumber Data :

• Statistik Pendidikan (BPS - Susenas).

• Rapor Pendidikan Daerah.

• Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.

Tahun Data Tersedia: Tersedia setiap tahun.

Level Estimasi: Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

15. Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Institusi Penghasil: Kemendikdasmen
Definisi : Ukuran kumulatif yang menunjukkan tingkat pemenuhan hak dasar warga negara untuk mendapatkan layanan pendidikan sesuai standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Indeks ini mengukur ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan dasar hingga menengah.
Interpretasi

- Kepatuhan Daerah: Indeks ini merupakan instrumen kendali bagi kepala daerah untuk memastikan bahwa anggaran daerah (APBD) telah diprioritaskan pada pemenuhan pelayanan dasar (seperti sarana prasarana, kecukupan guru, dan bantuan biaya sekolah).
- Evaluasi Kinerja: Jika nilai indeks mendekati 100, artinya daerah tersebut telah memenuhi seluruh standar mutu (input, proses, dan hasil) yang diamanatkan undang-undang.
- Fungsi Pengawasan (Inspektorat): Hasil indeks ini menjadi dasar bagi Inspektorat untuk memberikan rekomendasi atau teguran jika ada indikator penyusun SPM yang tidak tercapai (misalnya angka putus sekolah yang tinggi atau jumlah guru yang kurang).

Metode/Rumus Perhitungan : Indeks SPM Pendidikan dihitung berdasarkan rata-rata capaian dari berbagai indikator penyusun (seperti APK, APM, Literasi, Numerasi, dan Sarpras).

$$IndeksSPM = \frac{\sum \text{Nilai Capaian Tiap Indikator SPM}}{\text{Jumlah Total Indikator SPM}} \times 100$$

Ukuran/Satuan : Indeks (Skala 0 - 100)
Judul Publikasi/Sumber Data

- Aplikasi e-SPM (Kemendagri).
- Rapor Pendidikan Daerah (Kemendikdasmen).
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Tahun Data Tersedia : Tersedia setiap tahun (Berjalan secara intensif sejak penerapan sistem Rapor Pendidikan).
Level Estimasi : Kabupaten/Kota dan Provinsi.
Frekuensi Pengumpulan : Tahunan
Apakah Indikator dapat diakses umum? Tidak, hanya dapat diakses melalui portal Rapor Pendidikan oleh publik secara agregat dan oleh Dinas Pendidikan melalui akun akses khusus daerah.

16. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah

Institusi Penghasil: Inspektorat Provinsi
Definisi : Nilai yang diberikan atas hasil evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja yang dihasilkan. SAKIP bukan sekadar serapan anggaran, melainkan pembuktian bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan berkontribusi pada pencapaian target (seperti Literasi, Numerasi, dan APK).
Interpretasi
- Predikat AA & A (Memuaskan): Dinas Pendidikan dianggap sangat efisien, memiliki keselarasan antara perencanaan (Renstra) dengan pelaksanaan di lapangan, serta memiliki sistem pelaporan data yang akurat.
- Predikat B & BB (Baik): Akuntabilitas sudah berjalan, namun masih ada beberapa program yang belum fokus pada hasil (outcome) atau masih ada pemborosan anggaran.
- Predikat C & CC (Cukup): Menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan cenderung hanya menghabiskan anggaran secara administratif, namun belum terlihat dampak nyata (hasil) terhadap mutu pendidikan di daerah.
- Peran Inspektorat: Nilai ini menjadi ukuran bagi Inspektorat untuk melihat apakah manajemen kinerja di Dinas Pendidikan sudah sesuai dengan aturan atau masih terdapat risiko penyimpangan.

Metode/Rumus Perhitungan : Nilai SAKIP dihitung berdasarkan bobot komponen berikut:
1. Perencanaan Kinerja (30%): Kualitas Renstra dan Rencana Kerja.
2. Pengukuran Kinerja (25%): Kedisiplinan mengukur capaian target.
3. Pelaporan Kinerja (15%): Kualitas dokumen LAKIP.
4. Evaluasi Internal (10%): Peran pengawasan internal.
5. Capaian Kinerja (20%): Keberhasilan realisasi target di lapangan.

Ukuran/Satuan : Indeks (Nilai 0 - 100) dan Predikat (AA, A, BB, B, CC, C, D).
Judul Publikasi/Sumber Data
- Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- Portal RB-Kunwas (Kemenpan RB).

Tahun Data Tersedia : Tersedia setiap tahun setelah proses evaluasi oleh Kemenpan RB/Inspektorat.
Level Estimasi : Instansi (Dinas Pendidikan), Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota/Provinsi).
Frekuensi Pengumpulan : Tahunan.
Apakah Indikator dapat diakses umum? Tidak

GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 276/III/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029

GUBERNUR RIAU,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029, diperlukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

b. bahwa berdasarkan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persiapan penyusunan Renstra meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025–2029;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025–2029.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari:

a. Ketua;

b. Wakil Ketua;

c. Sekretaris;

d. Koordinator;

e. Anggota.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Gubernur Riau.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 MARET 2025

GUBERNUR RIAU,

GUBERNUR RIAU

ABDUL WAHID

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 276/III/2025
TANGGAL : 19 Maret 2025

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2025 – 2029

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pendidikan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pendidikan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas	Dinas Pendidikan	Anggota
4	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	Dinas Pendidikan	Anggota
5	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Dinas Pendidikan	Anggota
6	Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	Anggota
7	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Dinas Pendidikan	Anggota
8	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Dinas Pendidikan	Anggota
9	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Dinas Pendidikan	Anggota
10	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Dinas Pendidikan	Anggota
11	Perencana Ahli Madya	Dinas Pendidikan	Anggota
12	Perencana Ahli Muda	Dinas Pendidikan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Pendidikan	Koordinator
2	Perencana Ahli Pertama	Dinas Pendidikan	Anggota
3	Pranata Komputer	Dinas Pendidikan	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pendidikan	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pendidikan	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat	Dinas Pendidikan	Anggota
7	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Pendidikan	Anggota
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Kesehatan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kesehatan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian	Dinas Kesehatan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Anggota
7	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan	Anggota
8	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Dinas Kesehatan	Anggota
9	Ketua Tim Kerja Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
10	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	Dinas Kesehatan	Anggota
11	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Dinas Kesehatan	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Pecegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Anggota
13	Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana	Dinas Kesehatan	Anggota
14	Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
15	Ketua Tim Kerja Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
16	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Dinas Kesehatan	Anggota
17	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	Anggota
18	Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
19	Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
20	Fungsional Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
21	Fungsional Nutrisionis Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
22	Pembimbing Kesehatan kerja Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
23	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kesehatan	Anggota
UPT Balai Pelatihan Kesehatan			
1	Kepala UPT Balai Pelatihan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Seksi Pengkajian, Pengembangan dan pengendalian Mutu	Dinas Kesehatan	Anggota
UPT Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan			
1	Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Kepala Seksi Pelayanan Klinis	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Seksi Pelayanan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Penata Laboratorium Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
6	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
7	Penelaah Kebijakan Teknis	Dinas Kesehatan	Anggota
UPT Instalasi Farmasi Dan Logistik			
1	Kepala UPT Instalasi Farmasi dan Logistik	Dinas Kesehatan	Anggota
2	Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Kepala Seksi Logistik Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Seksi Instalasi Farmasi	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Apoteker Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kesehatan	Anggota
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD			
1	Direktur	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Wakil Ketua
2	Kepala Bagian Perencanaan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
3	Wakil Direktur Keuangan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
4	Wakil Direktur Medik dan Keperawatan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
5	Wakil Direktur Umum, SDM dan Pendidikan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
6	Fungsional Perencana Ahli Pertama, Muda dan Madya	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
7	Penelaah Teknis Kebijakan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN			
1	Direktur	Rumah Sakit Jiwa Tampan	Wakil Ketua
2	Kepala Bagian Perencanaan	Rumah Sakit Jiwa Tampan	Anggota
3	Wakil Direktur Medik dan Keperawatan	Rumah Sakit Jiwa Tampan	Anggota
4	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	Rumah Sakit Jiwa Tampan	Anggota
5	Perencana Ahli Pertama, Muda dan Madya	Rumah Sakit Jiwa Tampan	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Rumah Sakit Jiwa Tampan	Anggota
7	Pelaksana Program Perencanaan	Rumah Sakit Jiwa Tampan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI			
1	Direktur	Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi	Wakil Ketua
2	Kepala Bagian Tata Usaha	RSUD Petala Bumi	Anggota
3	Kepala Bidang Pelayanan Medik	RSUD Petala Bumi	Anggota
4	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang	RSUD Petala Bumi	Anggota
5	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan, Kebidanan	RSUD Petala Bumi	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	RSUD Petala Bumi	Anggota
7	Fungsional Perencana Ahli Pertama, Muda dan Madya	RSUD Petala Bumi	Anggota
8	Pelaksana Program Perencanaan	RSUD Petala Bumi	Anggota
9	Pelaksana Program Keuangan	RSUD Petala Bumi	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Kesehatan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Fungsional Perencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan	Anggota
6	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Dinas Kesehatan	Anggota
7	Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Kesehatan	Anggota
8	Penelaah Kebijakan Teknis	Dinas Kesehatan	Anggota
9	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Kesehatan	Anggota
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
4	Kepala Bidang Bina Marga	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
6	Kepala Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
7	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
8	Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
9	Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
10	Kepala UPT Pengelolaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
11	Kepala UPT Peralatan Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
12	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
13	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah II	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
14	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah III	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
15	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah IV	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
16	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah V	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
17	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah VI	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
18	Perencana Ahli Madya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
19	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Madya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
20	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
3	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Satuan	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua
2	Sekretaris	Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
4	Kepala Bidang Operasi	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
6	Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
7	Kepala Seksi Bina Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
8	Kepala Seksi Peningkatan Fasilitasi Aparatur	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
9	Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
10	Kepala Seksi Pengamanan Asset	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
11	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
12	Kepala Seksi Penegakan dan Pengawasan	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
13	Kepala Seksi Data dan Informasi	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
14	Kepala Seksi Pengarahan dan Pengendalian	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Satuan Polisi Pamong Praja	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Muda	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
5	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
7	Pengadministrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Ketua
2	Sekretaris	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
4	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
6	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
7	Fungsional Analis Kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
8	Fungsional Penata Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Program Perencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
3	Ketua Tim Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
4	Perencana Ahli Pertama	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
6	Pengolah Data dan Informasi Sekretariat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Sosial	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Sosial	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial	Anggota
6	Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Sosial	Dinas Sosial	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial	Anggota
8	Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Dan Korban Perdangangan Orang	Dinas Sosial	Anggota
9	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Perorangan Pemberdayaan dan Keluarga	Dinas Sosial	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan masyarakat dan Kelembagaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
11	Ketua Tim Kerja Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Identifikasi dan Pengolahan Data Fakir miskin	Dinas Sosial	Anggota
13	Ketua Tim Kerja Pendampingan dan Pemberdayaan	Dinas Sosial	Anggota
14	Ketua Tim Kerja Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan	Dinas Sosial	Anggota
15	Ketua Tim Kerja Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Dinas Sosial	Anggota
16	Ketua Tim Kerja Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Dinas Sosial	Anggota
17	Ketua Tim Kerja Jaminan Sosial Keluarga	Dinas Sosial	Anggota
18	Penyuluh Sosial Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Sosial	Anggota
19	Pekerja Sosial Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Sosial	Anggota
UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha "Khusnul Khotimah"			
1	Kepala UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha, "Khusnul Khotimah"	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Pembinaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Pelayanan sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra "Tengku Yuk"			
1	Kepala UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra "Tengku Yuk"	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
UPT Bina Laras			
1	Kepala UPT Bina Laras	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak			
1	Kepala UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Kepala Seksi Pelayanan sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas			
1	Kepala UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Pembinaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Pelayanan Penyandang Disablilitas	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Dinas Sosial	Anggota
6	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Sosial	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Sosial	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Dinas Sosial	Anggota
5	Perencana Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Sosial	Anggota
7	Pengadministrasi Perencana dan Program	Dinas Sosial	Anggota
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sekretaris
3	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
4	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
5	Kepala Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
6	Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
7	Fungsional Pengantar Kerja Muda	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
8	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
9	Kepala Seksi Persyaratan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
10	Kepala Seksi Penyelesaian Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
11	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
12	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
13	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Kepala Seksi Pengawasan Norma, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
15	Kepala Seksi Penegakan Hukum	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
16	Fungsional Pengawas KK Ahli Madya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
17	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
18	Kepala Bidang Ketransmigrasian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
19	Analis Kebijakan Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
20	Analis Kebijakan Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
UPT Latihan Kerja			
1	Kepala UPT Latihan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
3	Kepala Seksi Pelatihan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Koordinator
2	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
3	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
4	Kepala Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Penduduk dan Keluarga Berencana	
5	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
6	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
7	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Data dan Informasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
8	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
5	Pengolah Data dan Informasi Sekretariat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sekretaris
3	Kepala Bidang Tanaman Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
4	Kepala Bidang Hortikultura	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
5	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
6	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
7	Kepala UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
8	Kepala UPT Perbenihan Sertifikst Benih Tanaman Pangan Hortikultura	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
9	Kepala UPT Pelatihan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
10	Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
11	Kepala Seksi Produksi Benih	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
4	Perencana Ahli Madya	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Perencana Ahli Muda	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
6	Perencana Ahli Pertama	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Penaatan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
4	Kepala Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
5	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
6	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
7	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Perhutanan Sosial	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
8	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
9	Kepala UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
10	Kepala UPT Perbenihan Tanaman Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
11	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Minas Tahura	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
12	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tasik Besar Serkap	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
13	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bagan Siapi-api	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
14	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bengkalis Pulau	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
15	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandau	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
16	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Rokan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
17	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Suligi - Batu Gajah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
18	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kampar Kiri	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
19	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sorek	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
20	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tebing Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
21	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
22	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Indragiri	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
23	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
24	Perencana Ahli Madya	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
25	Perencana Ahli Muda	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Sub Bagian Perencanaan Program	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
4	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Program	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
3	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
4	Ketua Tim Kerja Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
6	Ketua Tim Kerja Peningkatan Sumberdaya Manusia Lembaga Kemasyarakatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7	Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Pedesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Ketua Tim Kerja Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9	Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
10	Ketua Tim Kerja Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11	Kepala Bidang Pengeloaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
5	Perencana Ahli Muda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
6	Perencana Ahli Muda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
8	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Perhubungan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perhubungan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pelayaran	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Kepala Bidang Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan	Anggota
5	Kepala Bidang Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Anggota
6	Kepala Bidang Pengembangan Transportasi	Dinas Perhubungan	Anggota
7	Kepala Seksi Kepelabuhanan	Dinas Perhubungan	Anggota
8	Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP	Dinas Perhubungan	Anggota
9	Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek	Dinas Perhubungan	Anggota
10	Kepala Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana	Dinas Perhubungan	Anggota
11	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Anggota
12	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian LLAJ	Dinas Perhubungan	Anggota
13	Kepala Seksi Pengembangan Sistem Transportasi	Dinas Perhubungan	Anggota
14	Kepala Seksi Regulasi dan Pendataan Transportasi	Dinas Perhubungan	Anggota
UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I			
1	Kepala UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
2	Kepala Seksi Operasional UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
3	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II			
1	Kepala UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota
2	Kepala Seksi Operasional UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota
3	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	Dinas Perhubungan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Perhubungan	Anggota
3	Pejabat Pengurus Barang Milik Daerah	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Analis Kebijakan	Dinas Perhubungan	Anggota
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Sekretaris
3	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
4	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informatika dan Komunikasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
5	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
6	Kepala Bidang Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
7	Kepala Bidang Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
8	Perencana Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
9	Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
10	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
11	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
12	Manggala Informatika Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
13	Statistisi Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
Sekretariat			

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
4	Arsiparis Ahli Madya	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
3	Perencana Ahli Madya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
4	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Pokja Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
5	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Pokja Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
6	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Pokja Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
7	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinana Berusaha dan Non Perizinan A	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
8	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinana Berusaha dan Non Perizinan B	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
9	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinana Berusaha dan Non Perizinan C	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
10	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Umum	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
3	Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
4	Perencana Ahli Pertama	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Sekretaris
3	Kepala Bidang Layanan dan Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
4	Kepala Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
5	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
6	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
7	Analis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
3	Pranata Komputer Ahli Pertama	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Kebudayaan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kebudayaan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Bahasa dan Seni	Dinas Kebudayaan	Anggota
4	Kepala Bidang Sejarah Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Dinas Kebudayaan	Anggota
5	Kepala Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya	Dinas Kebudayaan	Anggota
6	Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya	Dinas Kebudayaan	Anggota
7	Kepala UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya	Dinas Kebudayaan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Pamong Budaya Madya	Dinas Kebudayaan	Anggota
9	Pamong Budaya Muda	Dinas Kebudayaan	Anggota
10	Pamong Budaya Pertama	Dinas Kebudayaan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda	Dinas Kebudayaan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kebudayaan	Anggota
3	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Dinas Kebudayaan	Anggota
4	Analis Perencanaan dan Anggaran	Dinas Kebudayaan	Anggota
5	Pelaksana Program dan Kegiatan	Dinas Kebudayaan	Anggota
6	Analis Kebijakan	Dinas Kebudayaan	Anggota
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
4	Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
5	Kepala Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
6	Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
7	Pustakawan Ahli Madya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
8	Arsiparis Ahli Madya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
9	Pustakawan Ahli Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
10	Arsiparis Ahli Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
11	Perencana Ahli Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
3	Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
5	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
6	Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
7	Kepala UPT Pelabuhan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
8	Kepala UPT Budidaya Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
9	Kepala UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
10	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan Wilayah I	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
11	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan Wilayah II	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
12	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan Wilayah III	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
13	Analis Akuakultur Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
14	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
15	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
16	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
17	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
18	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
19	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
20	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
21	Kepala Sub Bagian Tata usaha UPT Pelabuhan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
22	Kepala Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
23	Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
24	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Budidaya Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
25	Kepala Seksi Teknis Pembenihan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
26	Kepala Seksi Teknis Pembudidayaan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
27	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
28	Kepala Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
29	Kepala Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
30	Kepala Seksi Kerja sama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
31	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
32	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Wilayah I	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
33	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Wilayah II	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
34	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Wilayah III	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pariwisata	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pariwisata	Sekretaris
3	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
4	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
5	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Anggota
6	Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata	Anggota
8	Ketua Tim Kerja Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata	Anggota
9	Ketua Tim Kerja Objek Daya Tarik Wisata	Dinas Pariwisata	Anggota
10	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Anggota
11	Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Dinas Pariwisata	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Ketua Tim Kerja Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Anggota
13	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata (Pendampingan Desa Wisata, ADWR dan ADWI dan Pelatihan Pengelola Desa Wisata)	Dinas Pariwisata	Anggota
14	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata (Pelatihan Kepariwisataan)	Dinas Pariwisata	Anggota
15	Ketua Tim Kerja Fasilitasi Sertifikasi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Pelaku Usaha Jasa Pariwisata)	Dinas Pariwisata	Anggota
16	Ketua Tim Kerja Promosi Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
17	Ketua Tim Kerja Pengembangan Pasar Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
18	Ketua Tim Kerja Sarana Promosi Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
UPT Bandar Serai			
1	Kepala UPT Bandar Serai	Dinas Pariwisata	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Pariwisata	Anggota
3	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	Dinas Pariwisata	Anggota
4	Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan	Dinas Pariwisata	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Pariwisata	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pariwisata	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Substansi Keuangan, Perlengkapan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pariwisata	Anggota
4	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Dinas Pariwisata	Anggota
5	Pranata Komputer Terampil	Dinas Pariwisata	Anggota
6	Operator Layanan Operasional	Dinas Pariwisata	Anggota
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Perkebunan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perkebunan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Produksi	Dinas Perkebunan	Anggota
4	Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan	Dinas Perkebunan	Anggota
5	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	Dinas Perkebunan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Dinas Perkebunan	Anggota
7	Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan	Dinas Perkebunan	Anggota
8	Kepala UPT Pengawasan dan sertifikasi Benih Perkebunan	Dinas Perkebunan	Anggota
9	Perencana Ahli Madya	Dinas Perkebunan	Anggota
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Perkebunan	Koordinator
2	Ketua Tim Keuangan dan Aset	Dinas Perkebunan	Anggota
3	Perencana Ahli Muda	Dinas Perkebunan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat	Dinas Perkebunan	Anggota
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Produksi Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
4	Kepala Bidang Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
5	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
6	Kepala Bidang Agribisnis	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
7	Kepala UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
8	Kepala UPT Inseminasi Buatan Ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
9	Kepala UPT Pengembangan Ternak dan Pakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
10	Medik Veteriner Ahli Madya	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
11	Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
12	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
13	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
14	Medik Veteriner Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
15	Perencana Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
16	Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
17	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
18	Perencana Ahli Pertama	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
Sekretariat			

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
3	Analis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Sekretaris
3	Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
4	Kepala Bidang Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
5	Kepala Bidang Mineral dan Batubara	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
6	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
7	Kepala Cabang Dinas Wilayah I	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
8	Kepala Cabang Dinas Wilayah II	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
9	Kepala Cabang Dinas Wilayah III	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
10	Kepala Cabang Dinas Wilayah IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
11	Kepala UPT Laboratorium Pengujian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
12	Kepala Sub Bagian TU Cabang Dinas Wilayah I s.d IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
13	Kasi Pengeolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Energi Cabang Dinas Wilayah I s.d IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
14	Kasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Cabang Dinas Wilayah I s.d IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
15	Kepala Sub Bagian TU UPT Laboratorium Pengujian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
16	Kasi Pengujian UPT Laboratorium Pengujian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
17	Kasi Pelayanan dan Pengembangan Peralatan Laboratorium	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Koordinator
2	Perencana Ahli Pertama Sekretariat	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Kerjasama dan Promosi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
4	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
5	Kepala Bidang Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
6	Kepala Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
7	Kepala Bidang Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
8	Kepala UPT Industri Pangan, Olahan dan Kemasan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
9	Kepala UPT Logam	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
10	Kepala UPT Penguji dan Sertifikasi Mutu Barang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
11	Kepala UPT Pelatihan Koperasi dan UMKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
12	Kepala UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
Sekretariat			
1	Fungsional Ahli Muda	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koordinator
2	Fungsional Ahli Pertama	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Ketua
2	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua I
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua II
4	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua III
5	Kepala Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Sekretaris
6	Kepala Biro Umum	Sekretariat Daerah	Anggota
7	Kepala Biro Organisasi	Sekretariat Daerah	Anggota
8	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	Anggota
9	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Anggota
10	Kepala Biro Hukum	Sekretariat Daerah	Anggota
11	Kepala Biro Perekonomian	Sekretariat Daerah	Anggota
12	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Anggota
13	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Koordinator

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pimpinan (Ketua Tim Perencanaan dan Pelaporan)	Sekretariat Daerah	Anggota
3	Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum	Sekretariat Daerah	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi	Sekretariat Daerah	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	Anggota
9	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Anggota
10	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum	Sekretariat Daerah	Anggota
11	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Perekonomian	Sekretariat Daerah	Anggota
12	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Anggota
13	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	Anggota
14	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
15	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
16	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Sekretaris Dewan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ketua
2	Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
4	Kepala Bagian Umum	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Protokol	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Koordinator
2	Ketua Tim Kerja Keuangan dan Perjalanan Dinas	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Verifikasi dan Pelaporan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
4	Ketua Tim Kerja Komisi, Fraksi dan Hubungan Antar Lembaga	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
5	Ketua Tim Kerja Produk Hukum	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
6	Ketua Tim Kerja Rapat dan Risalah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Rumah Tangga, Perlengkapan dan PBMD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
8	Ketua Tim Kerja Humas dan Perpustakaan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
6	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
7	Perencana Ahli Utama	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
8	Perencana Ahli Madya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
9	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
10	Perencana Ahli Pertama	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
11	Ketua Tim Perencanaan dan Pendanaan Bidang Perencanaan,	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		
12	Ketua Tim Data dan Informasi Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
13	Ketua Tim Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
14	Ketua Tim Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
15	Ketua Tim Pendidikan, Budaya dan Pemuda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
16	Ketua Tim Kesehatan dan Keluarga Berencana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
17	Ketua Tim Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
18	Ketua Tim Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
19	Ketua Tim Pariwisata Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
20	Ketua Tim Tata Ruang dan Pertanahan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
21	Ketua Tim Pekerjaan Umum dan Perumahan Kawasan Permukiman Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
22	Ketua Tim Perhubungan, Energi, Sumber Daya Mineral, Komunikasi. Informatika, Statistik dan Persandian Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Pendapatan Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Retribusi, PADL dan dana Bagi Hasil	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
6	Kepada Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Substansi Pengolahan Data dan Pendapatan	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Substansi Perencanaan Program	Badan Pendapatan Daerah	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Substansi Keuangan, Perlengkapan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
5	Perencana Ahli Pertama	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
6	Penelaah Kebijakan Teknis	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
7	Pengolah data dan Informasi	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Anggaran Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
7	Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Pertama	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
8	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
9	Pengolah Data Dan Informasi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Substansi Perencanaan Program	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
3	Kepala Tim Substansi Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Kepegawaian Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Kepegawaian Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Mutasi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
6	Kepala Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
7	Ketua Tim Perencanaan dan Pengadaan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
8	Ketua Tim Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
9	Ketua Tim Pemberhentian dan Pensiun	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
10	Ketua Tim Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
11	Ketua Tim Penataan Jabatan Fungsional	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Ketua Tim Kepangkatan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
13	Ketua Tim Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
14	Ketua Tim Pengembangan Pendidikan Formal	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
15	Ketua Tim Pengembangan Kompetensi Manajerial, Teknis dan Fungsional	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
16	Ketua Tim Penghargaan dan Penilaian Kinerja	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
17	Ketua Tim Disiplin dan Pengawasan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
18	Ketua Tim Pendayagunaan dan Evaluasi Organisasi Profesi ASN	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
19	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
20	Kepala Seksi Pengembangan Penilaian Kompetensi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
21	Kepala Seksi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Kepegawaian Daerah	Koordinator
2	Perencana Ahli Muda	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
3	Perencana Ahli Pertama	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
3	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Penjamin Mutu	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Dan Fungsional	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
6	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Dan Sosiokultural	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
7	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
10	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
11	Ketua Tim Kerja Kerja Sistem Informasi Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Kerja Pengelolaan Sumber Belajar, Kerjasama dan Penjamin Mutu	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
13	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
14	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Jabatan Administrator dan Pengawas	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
15	Ketua Tim Pengembangan Kompetensi Dasar dan Kader	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
16	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrator Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
17	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrator Urusan Konkuren Wajib Non Pelayanan Dasar	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
18	Ketua Tim Kerja Pengembangan Integritas dan Sosiokultural Jabatan Administrator Perangkat Daerah Penunjang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
19	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Jabatan Administrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
20	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan dan Jabatan Administrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
21	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2	Widyaiswara Ahli Utama	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
3	Widyaiswara Ahli Madya	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Pengadministrasi Perkantoran Sekretariat	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Penghubung	Ketua
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Badan Penghubung	Sekretaris
3	Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga	Badan Penghubung	Anggota
4	Kepala Sub Bidang Humas dan Protokol	Badan Penghubung	Anggota
5	Kepala Sub Bidang Pengelola Anjungan Riau	Badan Penghubung	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penghubung	Anggota
Sekretariat			
1	Fungsional Perencana Ahli Muda	Badan Penghubung	Koordinator
2	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Badan Penghubung	Anggota
3	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penghubung	Anggota
4	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Penghubung	Anggota
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Inspektur Daerah	Inspektorat Daerah	Ketua
2	Sekretaris	Inspektorat Daerah	Sekretaris
3	Inspektur Pembantu I, II, III, IV dan V	Inspektorat Daerah	Anggota
4	Fungsional Auditor Ahli Madya, Muda Pertama, dan Penyelia, Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan	Inspektorat Daerah	Anggota
5	Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama, Madya, Muda dan Pertama	Inspektorat Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan	Inspektorat Daerah	Koordinator
2	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Inspektorat Daerah	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Analisa dan Evaluasi	Inspektorat Daerah	Anggota
4	Fungsional Arsiparis Madya	Inspektorat Daerah	Anggota
5	Fungsional Perencana Ahli Muda	Inspektorat Daerah	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Inspektorat Daerah	Anggota
7	Pengelola Program dan Kegiatan	Inspektorat Daerah	Anggota
8	Pengolah Data dan Informasi	Inspektorat Daerah	Anggota
9	Pengadministrasi Perkantoran	Inspektorat Daerah	Anggota
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
3	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
4	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
6	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
7	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
8	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
9	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
10	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
5	Penelaah Kebijakan Teknis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
6	Penelaah Kebijakan Teknis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
7	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Ketua
2	Sekretaris	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Sekretaris
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Koordinator
2	Fungsional Peneliti Ahli Madya	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
3	Fungsional Peneliti Ahli Pertama	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
4	Fungsional Perekayasa Ahli Madya	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
5	Fungsional Perekayasa Ahli Muda	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
6	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
UPT Riau Science Techno Park			
1	Kepala UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
3	Kepala Seksi Riset dan Inovasi Teknologi UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
4	Kepala Seksi Inkubasi Teknologi dan Bisnis UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota

GUBERNUR RIAU,

ABDUL WAHID

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 276/III/2025
TANGGAL : 19 Maret 2025

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025–2029

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS
1	*2*	*3*	*4*
1	Ketua	Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan, Sekretaris Dewan	1. Memimpin Tim penyusun Renstra dalam pelaksanaan penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2. Mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam proses penyusunan Renstra
2	Wakil Ketua	Asisten Sekretariat Daerah, Direktur Rumah Sakit	Membantu Ketua Tim penyusun Renstra dalam pelaksanaan penyusunan Renstra Perangkat Daerah
3	Sekretaris	Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Kepala Biro	1. Memfasilitasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dari rancangan awal sampai dengan penetapan Renstra 2. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah 3. Mengoordinasikan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau 4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Strategis
4	Koordinator	Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Perencana Ahli Muda/Madya	Menyiapkan materi pendukung/orientasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS
1	*2*	*3*	*4*
5	Anggota	Kepala Bidang, Kepala UPT, Fungsional, Pelaksana	1. Menyusun tujuan, sasaran, program, outcome, kegiatan, output dan sub kegiatan beserta indikator dan target perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan bidang Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif 2. Menghimpun data yang diperlukan dalam penyusunan Renstra sesuai dengan sistematika; 3. Melaksanakan perbaikan atas verifikasi rancangan dan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan melakukan penajaman rancangan akhir Renstra sebelum dilakukan penetapan Renstra Perangkat Daerah

GUBERNUR RIAU,

ABDUL WAHID

Lampiran Formulir E.27
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Riau
Tahun 2025-2029

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja	√			
2.	Penyiapan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah provinsi	√			
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi		√	- Dok. Renstra K/L Belum tersedia - Dok. Renstra Kab./Kota dalam masa penyusunan	
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi	√			
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah provinsi	√			
7.	Perumusan isu-isu strategis	√			
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi	√			
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	√			
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi	√			
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi	√			
12.	Mempelajari Surat Edaran Gubernur perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah provinsi beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah provinsi	√			
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi	√			
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan				
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi	√			
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah provinsi	√			
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	√			
18.	Perumusan rancangan akhir Rentra Perangkat Daerah provinsi		√	Masih Proses	
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi.		√	Masih Proses	
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah provinsi yang telah disyahkan		√	Masih Proses	

Pekanbaru, tanggal 15 Agustus 2025

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

(**H. ERISMAN YAHYA, M.H**)

MATRIK VERIFIKASI
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan Provinsi Riau

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1.	**COVER**	JUDUL COVER : "RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2025 - 2029 DINAS/BADAN ……..*(sesuai Perangkat Daerah masing - masing)*	V	V	-	
2.	**PERGUB PENETAPAN**	Keputusan Gubernur Riau Nomor : 35 Tahun 2025 tanggal 28 Oktober 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	-	-	-	
3.	**DAFTAR ISI**	Sesuai dengan sistematika Renstra Perangkat Daaerah	-	V	-	-
4.	**DAFTAR TABEL**	Judul Tabel dan Halaman Tabel	-	V	-	-
5	**DAFTAR GAMBAR**	Judul Gambar dan Halaman Gambar	-	V	-	-
6.	**BAB I** **PENDAHULUAN**					
	1.1. Latar Belakang	Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025 - 2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025 - 2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD. Tambahan:	-	V	-	-

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		Narasi Terkait Inmendagri No 2 Tahun 2025				
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025 - 2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.	V	V		
	1.3 Maksud dan Tujuan	Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.	-	V	-	-
	1.4 Sistematika Penulisan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.	-	V	-	-
7.	**BAB II** GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	Sub bab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat sekurang-kurangnya hal - hal sebagai berikut:: a. Tugas, fungsi dan struktur PD; b. Sumber daya PD; c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan d. Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah). *Catatan*: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya				

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		sesuai dengan kondisi daerah, seperti: a. Mitra PD dalam pemberian pelayanan (Apabila ada); b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (Apabila ada); dan c. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (Apabila ada). Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat: a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan b. Isu strategis.				
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).	-	V	-	
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.	-	V	-	-

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	- Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik. - Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). - Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan menarasikan data)	V	V		
		Dapat menggunakan Tabel T-C.23 dan T-C.24 Peremendagri No. 86 Tahun 2017.		V	-	-
	2.4 Kelompok Sasaran Layanan	Kelompok Sasaran Layanan (dapat ditambahkan beberapa sub bab lainnya sesuai dengan kondisi daerah)	-	V	-	-

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
	2.5. Mitra Perangkat Daerah	Jika ada	-	V	-	-
	2.6. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	- Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan. - Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.	-	V		
	2.7 Isu Strategis	- Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan		V	-	-

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertangungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD. - Merumuskan isu strategis daerah dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari: a. permasalahan: b. isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan c. potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan				
		Untuk rumusan permasalahan dapat menggunakan Tabel T-B.35 Permendagri No. 86 Tahun 2017.				

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		Untuk rumusan isu strategis dapat menggunakan Tabel 2.1. Inmendagri No. 2 Tahun 2025		V		
8.	**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**	- Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada: a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; dan b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 - Mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat ini, direkomendasikan agar Renstra PD cukup memiliki 1 (satu) tujuan. - Jika PD mengampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra PD direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan kedua urusan dimaksud. Namun untuk sasarannya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu. - Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan : a. kalimat kondisi;		V		

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; dan d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan *intermediate outcome.* - Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. - Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. - Penyajian lokus Renstra PD untuk provinsi dapat disajikan berdasarkan kabupaten/kota dan/ atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan				

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		kebutuhan pengembangan daerah. - Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.				
	3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	Tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Tahun 2025 – 2029;	V	V		
		Menggunakan Tabel 3.3. Inmendagri No. 2 Tahun 2025.	V	V	-	-
	3.2. Strategi Renstra Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029 (memperhatikan Tabel. Tabel T-B.35 Permendagri No. 86 Tahun 2017 Bab II Permasalahan Perangkat Daerah)	V	V	-	-
	3.3. Penahapan	Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah	V	V	-	-
		Menggunakan Tabel 3.4. Inmendagri No. 2 Tahun 2025.	V	V	-	-
	3.4. Lokus (*bila ada)*	Lokus Rensta Perangkat Daerah (Jika ada) dimana penyajian lokus Renstra Perangkat Daerah untuk Provinsi berdasarkan kabupaten/kota dan atau	-	-	-	-

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		berdasarkan wilayah pengembangan serta disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan daerah				
	3.5. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025–2029 atau untuk menyelesaikan Masalah PD	V	V		
		Menggunakan Tabel 3.5. Inmendagri No. 2 Tahun 2025	V	V	-	
9	**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**	Bab IV paling sedikit memuat: - Uraian Program; - Uraian Kegiatan - Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; - Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; - Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan - Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)				.
	4.1 Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan	- Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan,	V	V		

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		sasaran, outcome, dan output. - Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. - Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambung perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.				
		- Menggunakan Tabel 4.2. Inmendagri No. 2 Tahun 2025	V	V	-	-
		- Menggunakan Tabel 4.3. Inmendagri No. 2 Tahun 2025 (Dapat diunduh melalui SIPD)	-	V	-	-
		- Menggunakan Tabel 4.4. Inmendagri No. 2 Tahun 2025 (Dapat diunduh melalui SIPD)	V	V	-	-
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	- Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator	V	V		-

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. - Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). - IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.				
		- Menggunakan Tabel 4.5. Inmendagri No. 2 Tahun 2025 (Dapat diunduh melalui SIPD)	-	V	-	-
		- Menggunakan Tabel 4.6. Inmendagri No. 2 Tahun 2025 (Dapat diunduh melalui SIPD)	-	V	-	-
10	**BAB V** **PENUTUP**	Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah	-	V	-	-
	LAMPIRAN	Antara lain : - Matrik penyelarasan RPJMN-Renstra PD - Reviu Renstra PD - Metadata IKU dan IKK - Formulasi dan Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		V		-

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		- Form Pengendalian dan Evaluasi (E.27 Permendagri 86 Tahun 2017) - Dan lain-lain yang dianggap perlu				

Pekanbaru, 28 Oktober 2025

Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Dr. Arden Simeru, S.Pd., M.Kom .....
2. M. Hidayat Syah, S.STP., M.Si .....
3. Siska Anjarohani, SE., M.Si .....
4. Ade Adriansyah, ST. .....

Verifikator :

Bappeda Provinsi Riau

1. Raja Juarisman, S.T., M.Si .....
2. Neil Yulia, S.E., M.Si .....
3. Muhammad Ikhsan, S.IP .....
4. Dini Gustiza, S.E .....